

**PERKEMBANGAN  
EKONOMI DAN KEUANGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**Triwulan III - 2005**

**Kantor Bank Indonesia  
Bandung**

Kantor Bank Indonesia Bandung  
Jl. Braga No. 108  
Tlp. 022-4230223  
Fax.022-4214326

**Visi Bank Indonesia**

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

**Misi Bank Indonesia**

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan.

**Nilai-nilai Strategi Organisasi Bank Indonesia**

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

**Visi Kantor Bank Indonesia Bandung**

Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai economic intelligence dan unit penelitian.

**Misi Kantor Bank Indonesia Bandung**

Berperan secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan perkenanNya sehingga penyusunan buku Kajian Triwulanan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Jawa Barat Triwulan III-2005 dapat diselesaikan. Kajian triwulanan ini kami susun guna memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia, sekaligus sebagai laporan kepada stakeholder mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Buku ini memuat pula hal-hal yang terkait dengan tugas Bank Indonesia, antara lain mengenai perkembangan ekonomi daerah secara umum.

Data dan informasi yang kami sajikan dalam buku ini berasal dari Bank Indonesia, termasuk laporan perbankan dan perusahaan-perusahaan, serta hasil-hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, data dan informasi juga kami peroleh dari berbagai pihak, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinas-dinas terkait, Badan Pusat Statistik, serta Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, baik dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan, maupun dalam pembahasannya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa isi buku ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dengan sepenuh hati untuk menerima segala kritik dan saran membangun guna meningkatkan kualitas isi buku tersebut.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kerjasama yang ada selama ini dapat lebih ditingkatkan.

Bandung, Oktober 2005

M.D. Soegiarto  
Pemimpin

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Tabel .....	
Daftar Grafik .....	
Keterangan dan Sumber Data .....	
Indikator Ekonomi dan Moneter Provinsi Jawa Barat .....	
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	
<b>BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO .....</b>	
1 Kondisi Umum .....	
2. Perkembangan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Indikator Kesejahteraan .	
PDRB per Kapita Kabupaten/Kota .....	
Tingkat Pengangguran dan Jumlah Keluarga Miskin .....	
Indeks Pembangunan Manusia .....	
3 Sisi Produksi .....	
3.1 Sektor Ekonomi Dominan .....	
3.1.1. Sektor Industri Pengolahan .....	
Boks 1. Industri Kerajinan Rotan Cirebon:Permasalahan yang	
Dihadapi Saat ini .....	
3.1.2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran .....	
3.1.3. Sektor Pertanian.....	
Boks 2. Perkembangan Produksi Beras Jawa Barat: Permasalahan	
dan Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan	
Daya	
Beli Petani .....	
Boks 3. Perkembangan Peternakan Sapi Perah Jawa Barat:: Potensi	
dan Permasalahan Penetapan Harga Jual Susu ke Industri	
Pengolahan Susu .....	
Perkembangan Industri Agro di Jawa Barat .....	
3.2. Sektor-sektor Lain .....	
4. Sisi Pengeluaran .....	
4.1. Konsumsi .....	
4.2. Investasi .....	

4.3. Ekspor dan Impor .....	
5. Ketenagakerjaan .....	
6. Keuangan Daerah .....	
Boks 4. Potensi Peningkatan Sumber Pembiayaan Daerah: Bagi Hasil Laba BUMN dan Tax Sharing .....	
<b>BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI .....</b>	
.....	
1. Kondisi Umum .....	
2. Perkembangan Inflasi di Jawa Barat .....	
Inflasi Inti, Inflasi Volatile Food, Inflasi Administered Price .....	
Boks 5. Inflasi Inti .....	
Survei Kegiatan Dunia Usaha .....	
Survei Konsumen .....	
Boks 6. Peranan Ekspektasi Terhadap Pembentukan Inflasi di Jawa Barat .....	
.....	
Boks 7. Dampak Kenaikan Harga BBM untuk Industri 1 September 2005 Terhadap Perkembangan Inflasi di Jawa Barat .....	
Survei Penjualan Eceran .....	
2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa .....	
2.2. Inflasi di Tujuh Kota .....	
<b>BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN .....</b>	
.....	
1. Perkembangan Umum Perbankan Jawa Barat .....	
1.1. Bank Umum Konvensional .....	
1.1.1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga .....	
1.1.2. Penyaluran Kredit .....	
1.1.2.1. Penyaluran Kredit Bank Pelapor .....	
1.1.2.2. Penyaluran Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek .....	
1.1.2.3. Persetujuan Kredit Baru .....	
1.1.3. Loan to Deposit Ratio (LDR) .....	
1.1.4. NPLs/Resiko kredit .....	
1.1.5. Perkembangan Kredit UMKM .....	
a. Penyaluran Kredit UMKM .....	
b. Upaya Pengembangan UMKM .....	
Boks 8. Sensitivitas Permintaan Kredit UMKM Terhadap Suku Bunga Kredit Perbankan .....	
1.1.6. Perkembangan Kredit Ekspor Bank Umum di Jawa Barat .....	
1.2. Kinerja Bank Umum yang Berkantor Pusat di Bandung .....	
1.3. Bank Umum Syariah .....	
Boks 9. Perbankan Syariah: Prospek dan Kendala Perkembangannya di Jawa Barat .....	
1.4. Bank Asing dan Bank Campuran .....	
1.5. Bank Perkreditan Rakyat .....	
Boks 10. Gerakan Peningkatan dan Pengembangan PD BPR di Wilayah Kerja KBI Bandung .....	
2. Perkembangan Sistem Pembayaran .....	

2.1. Pengedaran Uang Kartal ..	.....
2.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow) .....	.....
2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar .....	.....
2.3. Penukaran Uang Pecahan Kecil .....	.....
2.4. Lalu Lintas Pembayaran Non Tunai .....	.....
2.4.1. Kliring Lokal .....	.....
2.4.2. Real Time Gross Settlement (RTGS) .....	.....
2.5. Uang Palsu .....	.....
2.6. Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing Oleh Pedagang Valuta Asing .....	.....

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.PDRB Sisi Produksi (Rp Miliar) .....	
Tabel 1.2.Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Agro Utama (USD Juta).....	
Tabel 1.3.Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp Miliar) .....	
Tabel 2.1.Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%) .....	
Tabel 2.2.Inflasi Triwulanan Tujuh Kota di Jawa Barat dan Gabungannya Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan III-2005 .....	
Tabel 3.1.Lima Wilayah Kabupaten/Kota dengan NPLs Tertinggi	
Tabel 3.2.Lima Wilayah Kabupaten/Kota dengan NPLs Terendah	
Tabel 3.3.Perkembangan Outflow Uang Kertas dan Uang Logam Melalui KBI Bandung .....	
Tabel 3.4.Perkembangan Penyelesaian Transaksi Pembayaran Melalui Kliring Lokal KBI dan RTGS di Jawa Barat Triwulan III-2005 (Rp Triliun)	
Tabel 3.5.Perkembangan Penyelesaian Transaksi Pembayaran Melalui Penyelenggaraan Kliring Lokal KBI di Jawa Barat (Rata-rata per Bulan)	
Tabel 3.6 Perkembangan Transaksi RTGS Rata-rata per Bulan di Jawa Barat.....	

# DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1. Perkembangan Realisasi Kegiatan Usaha Menurut SKDU .....
- Grafik 1.2. Perkembangan Pangsa Sektor Terhadap PDRB (%) .....
- Grafik 1.3. Pangsa Tiap Industri dalam Subsektor Industri Pengolahan Tanpa Migas Triwulan III-2005 .....
- Grafik 1.4. Perkembangan Nilai Tambah Subsektor Industri Pengolahan Tanpa Migas .....
- Grafik 1.5. Perkembangan Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya (Rp Miliar) .....
- Grafik 1.6. Perkembangan Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki (Rp Miliar) .....
- Grafik 1.7. Perkembangan Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (Rp Miliar) .....
- Grafik 1.8. Pangsa Subsektor dalam Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Triwulan III-2005 .....
- Grafik 1.9. Perkembangan Subsektor Hotel dan Subsektor Restoran (Rp Miliar) ...
- Grafik 1.10. Perkembangan Subsektor Perdagangan Besar & Eceran (Rp Miliar) .....
- Grafik 1.11. Pangsa Subsektor dalam Sektor Pertanian Triwulan III-2005 .....
- Grafik 1.12. Perkembangan Subsektor Tanaman Bahan Makanan (Rp Miliar) .....
- Grafik 1.13. Perkembangan Nilai Ekspor Kumulatif Beberapa Komoditas Agro Utama di Jawa Barat (USD Juta) .....
- Grafik 1.14. Perkembangan Volume Ekspor Kumulatif Beberapa Komoditas Agro Utama di Jawa Barat (Ribuan Ton) .....
- Grafik 1.15. Pangsa Terhadap PDRB Triwulan III-2005 (%) .....
- Grafik 1.16. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Hasil Survei Konsumen ..
- Grafik 1.17. Perkembangan Nilai Kumulatif Persetujuan PMA di Jawa Barat (USD Juta) .....
- Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Kumulatif Persetujuan PMDN di Jawa Barat (Rp Miliar) .....
- Grafik 1.19. Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) .....

- Grafik 1.20. Perkembangan Volume Ekspor Nonmigas (Ribuan Ton) .....
- Grafik 1.21. Perkembangan Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) .....
- Grafik 1.22. Perkembangan Volume Impor Nonmigas (Ribuan Ton) .....
- Grafik 1.23. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD .....
- Grafik 1.24. Perkembangan Nilai Kumulatif Ekspor dan Impor Nonmigas (USD  
Juta)
- Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat  
dan Inflasi Nasional .....
- Grafik 2.2. Dekomposisi Inflasi di Jawa Barat Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.3. Pergerakan Inflasi Umum, Inflasi Inti, Administered Price, dan Volatile  
Food Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat .....
- Grafik 2.4. Perkembangan Harga Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha dan  
Inflasi Aktual Tahunan di Jawa Barat .....
- Grafik 2.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Survei Kegiatan  
Dunia Usaha dan Inflasi Aktual di Jawa Barat .....
- Grafik 2.6. Perkembangan Harga Berdasarkan Survei Konsumen  
.....
- Grafik 2.7. Perkembangan Harga Berdasarkan Survei Penjualan Eceran dan  
Inflasi Bulanan Aktual Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat .....
- Grafik 2.8. Inflasi Triwulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut  
Kelompok Barang dan Jasa Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.9. Pembentukan Inflasi di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan  
Jasa Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.10. Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa  
Barat Kelompok Bahan Makanan  
.....
- Grafik 2.11. Pembentukan Inflasi Kelompok Bahan Makanan Menurut  
Subkelompok Triwulan III-2005  
.....
- Grafik 2.12. Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat  
Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga .....
- Grafik 2.13. Pembentukan Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga  
Menurut Subkelompok Triwulan III-2005  
.....
- Grafik 2.14. Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa  
Barat Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau  
.....
- Grafik 2.15. Pembentukan Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan  
Tembakau Menurut Subkelompok Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.16. Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat  
Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan .....
- Grafik 2.17. Pembentukan Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa  
Keuangan Menurut Subkelompok Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.18. Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

- .....
- Grafik 2.19. Pembentukan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Menurut Subkelompok Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.20. Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Kesehatan .....
- Grafik 2.21. Pembentukan Inflasi Kelompok Kesehatan Menurut Subkelompok Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.22. Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Sandang .....
- Grafik 2.23. Pembentukan Inflasi Kelompok Sandang Menurut Subkelompok Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.24. Inflasi Triwulanan di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Gabungannya Triwulan III-2005 .....
- Grafik 2.25. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bandung .....
- Grafik 2.26. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bekasi .....
- Grafik 2.27. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bogor .....
- Grafik 2.28. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Sukabumi .....
- Grafik 2.29. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Cirebon .....
- Grafik 2.30. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Tasikmalaya .....
- Grafik 2.31. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Banjar .....
- Grafik 3.1. Pangsa Penghimpunan DPK Perbankan di Jawa Barat Triwulan III-2005
- Grafik 3.2. Pangsa Penyaluran Kredit Perbankan di Jawa Barat Triwulan III-2005
- Grafik 3.3. Perkembangan DPK dan Kredit .....
- Grafik 3.4. Perkembangan LDR dan NPLs .....
- Grafik 3.5. Penghimpunan DPK .....
- Grafik 3.6. Pangsa Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Bank
- .....
- Grafik 3.7. Pangsa DPK Berdasarkan Golongan Pemilik .....
- Grafik 3.8. Perkembangan DPK Berdasarkan Golongan Pemilik .....
- Grafik 3.9. Penghimpunan DPK Bank Umum dalam Rupiah dan Valas .....
- Grafik 3.10. Pangsa Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
- .....
- Grafik 3.11. Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
- .....
- Grafik 3.12. Pangsa Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyerapan Kredit
- .....
- Grafik 3.13. Perkembangan Sektor Ekonomi Terbesar Penyerap Kredit
- .....
- Grafik 3.14. Perkembangan Kredit Bank Pelapor dan Lokasi Proyek
- .....
- Grafik 3.15. Pangsa Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Jenis Penggunaan
- .....
- Grafik 3.16. Sektor Dominan Penyerap Kredit Lokasi Proyek

# KETERANGAN DAN SUMBER DATA

Buku Kajian Triwulanan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Jawa Barat berisi kajian mengenai perkembangan ekonomi Jawa Barat pada triwulan berjalan, diterbitkan secara berkala oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung.

Bab I Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan angka perkiraan atas dasar tahun 1993 hasil penghitungan dengan menggunakan dua pendekatan. PDRB dari sisi produksi, diestimasi berdasarkan perolehan nilai tambah pada setiap sektor. PDRB dari sisi pengeluaran diestimasi berdasarkan prediksi pengeluaran setiap komponen. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data historis bersumber dari data BPS dan peranan PDRB Jawa Barat terhadap PDB.

Survei dilakukan untuk memperoleh data/informasi pendukung dengan mengambil sampel dari sektor produksi (310 responden) dan konsumen (300 responden) yang lokasinya tersebar di Jawa Barat.

Untuk kepraktisan, beberapa nama sektor dan subsektor disingkat sesuai kelaziman.

Bab II Perkembangan inflasi regional dari pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Banjar. Data IHK bersumber dari BPS Provinsi Jawa Barat, diolah lebih lanjut untuk keperluan analisis.

Bab III Data perbankan bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) bank-bank yang berlokasi di wilayah Jawa Barat, khusus untuk data penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Jawa Barat.

Data sistem pembayaran merupakan data di wilayah kerja KBI Bandung yang meliputi wilayah Bandung, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Subang, Sumedang dan Garut, kecuali angka transaksi pembayaran melalui kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS).

Bab IV Prospek perekonomian regional dibuat atas dasar perkembangan indikator ekonomi dan moneter dengan didukung oleh hasil survei yang dilakukan KBI Bandung.

Buku ini diterbitkan pada akhir periode triwulan laporan sehingga angka dalam triwulan dimaksud sebagian merupakan angka sementara hasil estimasi. Selanjutnya, adakalanya angka yang

# INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER

## Provinsi Jawa Barat

INDIKATOR	2004				2005		
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3
<b>MAKRO</b>							
Laju Inflasi Tahunan Tiga Kota (yoy) (%)	5.17	6.16	5.29	5.81	8.59	7.51	8.78
Laju Inflasi Tahunan Tujuh Kota (yoy) (%)	n.a.	n.a.	n.a.	7.41	9.05	8.56	9.69
Laju Inflasi Triwulanan Tujuh Kota (qtq) (%):	1.95	1.74	0.82	2.71	3.51	1.26	1.86
- Bahan Makanan (%)	0.16	2.12	-2.86	7.61	1.49	1.72	2.66
- Makanan Jadi (%)	5.28	0.23	0.47	0.75	2.02	2.31	1.59
- Perumahan (%)	1.90	2.09	1.21	2.38	3.09	0.66	0.59
- Sandang (%)	3.41	1.33	2.22	1.26	0.52	0.87	2.41
- Kesehatan (%)	2.07	0.37	1.38	0.70	0.72	1.79	3.36
- Pendidikan (%)	0.25	0.79	9.81	0.62	0.16	0.78	5.24
- Transport (%)	0.17	3.88	1.78	0.68	14.08	0.52	1.13
Pertumbuhan PDRB (qtq) (%)	0.41	-1.33	1.88	2.20	2.60	0.07	0.88
Ekspor Nonmigas (USD Juta)	3,576.59	3,556.25	3,889.85	3,188.54	3,682.58	3,755.00	3,611.00
Impor Nonmigas (USD Juta)	186.19	113.94	140.38	223.35	187.34	323.00	261.00
<b>PERBANKAN (Bank Umum)</b>							
Total Aset (Rp Triliun)	82.93	87.11	87.40	92.06	91.14	95.73	99.77
DPK (Rp Triliun)	68.77	71.19	70.47	72.31	70.89	74.90	79.32
- Tabungan (Rp Triliun)	23.81	24.88	25.55	27.67	26.74	31.93	26.86
- Giro (Rp Triliun)	13.28	14.11	14.42	14.66	14.72	15.84	16.83
- Deposito (Rp Triliun)	31.68	32.20	30.50	29.98	29.43	27.13	35.63
Kredit (Rp Triliun)	33.77	35.65	37.79	40.70	41.86	45.45	48.94
Suku Bunga Kredit (%)	16.48	16.11	16.00	14.66	14.63	14.52	15.51
Suku Bunga Deposito (%)	5.67	5.40	5.25	5.19	6.07	5.62	6.73
Rasio NPLs (%)	4.56	4.15	3.68	3.25	3.54	4.12	4.95
LDR	49.11	50.08	53.63	56.22	59.05	60.68	61.69
Bank Syariah:							
- Aset bank syariah (Rp Triliun)	0.98	1.36	1.69	1.93	2.00	2.44	2.67
- Simpanan dalam bank syariah (Rp Triliun)	0.69	0.92	1.10	1.36	1.35	1.71	1.70
- Pembiayaan dalam syariah (Rp Triliun)	0.67	1.02	1.23	1.36	1.51	1.75	1.98
- Rasio NPLs (%)	4.06	3.53	3.82	2.92	2.89	2.80	3.58
- FDR (%)	97.39	110.33	111.82	100.00	111.56	101.87	116.51
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>							
Posisi Kas Gabungan (Rp Triliun)	3.30	3.38	7.89	5.12	5.17	4.81	5.44
Inflow (Rp Triliun)	4.66	4.57	4.55	5.26	4.93	4.67	6.38
Outflow (Rp Triliun)	2.95	3.63	3.18	4.26	3.17	3.75	4.35
PTTB (Rp Triliun)	1.72	1.94	1.18	1.35	1.90	1.55	0.75
Nominal Kliring (Rp Triliun)	26.77	28.11	30.99	32.83	30.92	32.19	23.50*
Volume Kliring (Rp Juta)	1.88	1.96	2.13	2.08	2.04	2.15	1.47*
<b>KEUANGAN DAERAH (Rp Miliar)</b>							
APBD	748	1,083	1,083	420	977	1,319	1,277
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	477	844	801	232	777	1,011	976
Dana Perimbangan	271	239	282	187	199	308	301
Belanja	644	644	964	1,582	316	1,005	837

Keterangan:

- Angka pertumbuhan PDRB triwulanan merupakan angka perkiraan
- Data suku bunga merupakan tingkat bunga rata-rata bank di Jawa Barat
- Data keuangan daerah berdasarkan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

\* Sampai dengan Agustus 2005

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## KAJIAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### PROVINSI JAWA BARAT

#### TRIWULAN III - 2005

#### PERKEMBANGAN EKONOMI

Pada triwulan III-2005 PDRB Jawa Barat atas dasar harga konstan tahun 1993 diperkirakan tumbuh 0,88% (qtq) atau 5,86% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor ekonomi dominan, yakni sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Pertumbuhan sektor industri pengolahan didorong oleh peningkatan produksi pada industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya khususnya industri otomotif dan elektronik. Sementara pertumbuhan sektor PHR, didorong oleh peningkatan penjualan di subsektor perdagangan besar dan eceran.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi. Konsumsi yang pada triwulan lalu sempat mengalami penurunan, pada triwulan ini kembali mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu, investasi yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan-triwulan sebelumnya, masih terus tumbuh pada triwulan III-2005.

Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan konsumsi Jawa Barat, sedangkan konsumsi pemerintah, yang pada triwulan lalu meningkat cukup signifikan, pada triwulan ini memberikan kontribusi negatif. Peningkatan konsumsi pada triwulan ini dipengaruhi oleh faktor musiman sehubungan dengan tahun ajaran baru, yang mendorong peningkatan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk keperluan pendidikan. Di samping itu, peningkatan konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang cenderung meningkat pada triwulan mendatang, sebagaimana diindikasikan oleh hasil survei KBI Bandung yang mengungkapkan bahwa sebagian besar responden lebih memilih untuk melakukan konsumsi pada saat ini karena pertimbangan akan adanya kenaikan harga. Indikasi lain peningkatan konsumsi rumah tangga terlihat pula dari perkembangan kredit

**Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor industri pengolahan dan sektor PHR.**

**Disisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

perbankan, yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan kredit konsumsi oleh masyarakat.

Peningkatan investasi pada triwulan ini masih terkait dengan pembangunan infrastruktur dan properti, sebagaimana yang telah terjadi pada triwulan sebelumnya. Di samping itu, peningkatan kegiatan investasi didorong pula oleh meningkatnya kegiatan perluasan pabrik/peningkatan kapasitas produksi di bidang otomotif. Peningkatan investasi yang terjadi pada triwulan ini diindikasikan oleh hasil survei KBI Bandung, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi/pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di sektor industri, sejalan dengan meningkatnya kegiatan usaha di sektor tersebut. Peningkatan investasi pada triwulan ini diindikasikan pula oleh perkembangan kredit perbankan, yang menunjukkan adanya peningkatan penyaluran kredit investasi oleh perbankan ke sektor-sektor ekonomi dominan di Jawa Barat, seperti sektor industri pengolahan dan sektor PHR; serta sektor konstruksi dan bangunan.

Nilai ekspor dan impor nonmigas mengalami sedikit penurunan.

Di sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor dan impor nonmigas Jawa Barat mengalami sedikit penurunan. Pada triwulan ini, nilai ekspor nonmigas 3,8% (qtq) menjadi USD3,61 miliar. Penurunan ekspor terjadi pada hampir semua kelompok komoditas, kecuali pakaian jadi, buah-buahan dan sayur-sayuran, serta produk hasil susu dan telur. Nilai impor non migas turun 19,44% menjadi USD262 juta. Penurunan impor terjadi pada hampir semua kelompok komoditas, termasuk produk impor utama seperti barang-barang modal (turun 14,56%).

Penyerapan tenaga kerja meningkat, namun lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja.

Di sisi tenaga kerja, meskipun pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara umum dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, namun jumlah tenaga kerja yang terserap relatif lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Saat ini, jumlah pengangguran diperkirakan sekitar 12% dari angkatan kerja di tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor PHR belum cukup mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sektor pertanian sebagai sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sementara itu, peran konsumsi yang cukup besar dalam PDRB belum mencerminkan daya beli riil masyarakat Jawa Barat karena sumber pembiayaan konsumsi diluar pendapatan, seperti dari kredit perbankan,

nilainya cenderung meningkat.

## **INFLASI**

Pada triwulan III-2005, laju inflasi di Jawa Barat yang diindikasikan oleh perkembangan IHK di tujuh kota di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Banjar menunjukkan percepatan. Secara triwulanan, laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,29% menjadi 1,86%, dan lebih rendah daripada inflasi nasional (2,03%).

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (5,24%), sementara andil inflasi tertinggi berasal dari kelompok bahan makanan (0,61%). Dibandingkan enam kota lainnya, secara triwulanan, Kota Banjar mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 3,05%.

Sumber inflasi triwulan ini terutama berkaitan dengan tahun ajaran baru dan gangguan pasokan beberapa bahan makanan, seperti beras dan cabe merah.

Inflasi di Jawa Barat triwulan ini didominasi oleh inflasi inti (60,13%), sementara peranan inflasi volatile food dan inflasi administered price masing-masing 29,39% dan 10,47%. Laju inflasi inti yang mencapai 1,92% diperkirakan karena memburuknya ekspektasi masyarakat sehubungan beredarnya wacana mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang kedua kalinya pada tahun ini.

Laju inflasi secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2005 (Januari-September 2005) mencapai 6,79% (ytd), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (6,39%). Tekanan inflasi sampai dengan September 2005 ini masih berasal dari kenaikan harga BBM 1 Maret 2005.

Secara tahunan (September 2004-September 2005), inflasi gabungan tujuh kota juga mencapai 9,69% pada triwulan ini, lebih tinggi daripada inflasi nasional (9,06%). Inflasi tahunan juga masih disebabkan oleh

**Inflasi di Jawa Barat mengalami percepatan.**

**Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga.**

**Tahun ajaran baru dan gangguan pasokan bahan makanan**

**Inflasi inti mendominasi laju inflasi di Jawa Barat.**

**Inflasi secara kumulatif sampai dengan September 2005 mencapai 6,79%.**

**Inflasi secara tahunan masih disebabkan oleh kenaikan harga BBM.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

kenaikan harga BBM pada bulan Maret 2005.

Realisasi total pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepenuhnya dapat dibiayai dari PAD.

### KEUANGAN DAERAH

Secara umum, posisi keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Agustus 2005 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sebesar Rp1.871 miliar dapat dipenuhi dari pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp2.439 miliar. Rasio total belanja terhadap PAD sebesar 77%, menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah yang relatif mandiri sampai saat ini.

Realisasi pendapatan mengalami penurunan.

Secara triwulanan, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya penurunan. Pendapatan mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan PAD, yaitu penurunan pemasukan pendapatan dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Realisasi belanja mengalami penurunan.

Realisasi belanja pemerintah provinsi Jawa Barat mengalami penurunan disebabkan oleh relatif rendahnya belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan justru meningkat pada triwulan III dan triwulan IV.

Kondisi ekonomi makro pada triwulan ini menimbulkan dampak yang kurang menggembirakan terhadap kinerja perbankan di Jawa Barat, tercermin dari meningkatnya NPLs.

### PERBANKAN

Perkembangan ekonomi makro dalam triwulan III-2005 yang ditandai dengan kenaikan harga BBM untuk industri, melemahnya nilai tukar, serta meningkatnya suku bunga, telah menimbulkan dampak yang kurang menggembirakan terhadap kinerja dunia usaha, termasuk perbankan di Jawa Barat. Hal ini terlihat pada meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPLs). Namun demikian, stabilitas perbankan di Jawa Barat secara umum masih tetap terjaga, NPLs perbankan di Jawa Barat masih berada di bawah 5% (4,95%) dan CAR berada pada kisaran 10-30%.

Meskipun NPLs meningkat, fungsi intermediasi perbankan masih tetap mengalami peningkatan, tercermin dari tumbuhnya DPK dan kredit yang disalurkan.

Dalam periode laporan, dana pihak ketiga dan kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Demikian halnya dengan aset perbankan juga menunjukkan peningkatan, terutama didukung oleh meningkatnya portofolio kredit. Dengan melihat perkembangan berbagai indikator perbankan saat ini dan prospek perekonomian triwulan mendatang yang

diperkirakan mendapat tekanan cukup berat, menuntut perbankan untuk lebih meningkatkan kinerjanya, terutama dalam menjaga kondisi rentabilitas dan kualitas kredit.

**Total aset tumbuh sebesar 5,20% (qtq), DPK 6,21% (qtq) dan kredit 7,93% (qtq)**

Total aset perbankan yang meliputi bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) di Jawa Barat pada akhir triwulan III-2005 mencapai Rp105,20 triliun, meningkat 5,20% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya (qtq). Lebih dari 90% aset perbankan Jawa Barat masih didominasi oleh bank umum konvensional (Rp99,77 triliun), sedangkan pangsa bank umum syariah baru mencapai 2,54% (Rp2,67 triliun) dan BPR sebesar 2,62% (Rp2,76 triliun).

Sampai dengan triwulan III-2005, total DPK perbankan mencapai Rp83,67 triliun, tumbuh 6,21% dibandingkan triwulan sebelumnya. Pangsa bank umum konvensional dalam penghimpunan DPK tersebut mencapai 94,80% (Rp79,32 triliun), sementara pangsa bank umum syariah dan BPR masing-masing baru mencapai 2,03% (Rp1,70 triliun) dan 3,17% (Rp2,65 triliun).

Meskipun suku bunga kredit mengalami kenaikan pada kisaran 1-2%, namun nilai kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat masih tetap mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 7,93% (qtq). Total kredit/pembiayaan sampai dengan triwulan ini mencapai Rp53,21 triliun, terdiri dari Rp48,94 triliun (91,98%) kredit dari bank umum, Rp1,98 triliun (3,72%) pembiayaan oleh bank syariah, dan Rp2,29 triliun (4,30%) kredit yang disalurkan oleh BPR. Dilihat dari pertumbuhannya, pembiayaan oleh bank umum syariah mengalami peningkatan tertinggi, yakni 13,47%, sementara peningkatan kredit bank umum konvensional dan BPR masih dibawah 10%.

**Aktivitas pembayaran di Jawa Barat mengalami peningkatan.**

Sementara itu, aktivitas pembayaran di Jawa Barat mengalami peningkatan, tercermin dari meningkatnya nilai transaksi dengan pembayaran tunai dan non tunai, setelah mengalami penurunan pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, penemuan uang palsu yang dilaporkan ke KBI Bandung mengalami penurunan.

**PDRB pada triwulan mendatang diperkirakan masih tumbuh positif.**

### PROSPEK EKONOMI

Berbagai situasi yang kurang mendukung, seperti volatilitas nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga akan berdampak pada perekonomian Jawa Barat. Namun demikian, PDRB Jawa Barat pada

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Disisi produksi pertumbuhan terutama didorong oleh sektor PHR dan sektor angkutan/komunikasi

triwulan mendatang diperkirakan masih tumbuh positif, meski mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan triwulan ini.

Disisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh konsumsi dan investasi.

Di sisi produksi, pertumbuhan diperkirakan terutama didorong oleh peningkatan pada sektor PHR dan sektor angkutan/komunikasi. Peningkatan pada kedua sektor ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dalam rangka hari raya Idul Fitri, hari raya Natal dan tahun baru.

Laju inflasi triwulan IV-2005 diperkirakan meningkat dan merupakan inflasi triwulanan tertinggi sepanjang tahun 2005.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan peningkatan pembentukan modal tetap bruto. Konsumsi masyarakat meningkat berkaitan dengan faktor musiman, yakni kegiatan perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru. Investasi diperkirakan meningkat didorong oleh peningkatan sektor properti dan ditandai pula oleh tingginya minat berinvestasi pada industri manufaktur antara lain pada industri otomotif. Indonesia masih dianggap sebagai pasar potensial produk otomotif sehingga minat produsen otomotif untuk meningkatkan kapasitas produksinya diperkirakan masih relatif tinggi.

Pada triwulan mendatang, laju inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan III-2005 dan merupakan inflasi triwulanan tertinggi sepanjang tahun 2005. Faktor pendorong inflasi pada triwulan IV-2005 diperkirakan berasal dari administered price sebagai dampak dari kenaikan harga BBM dan faktor musiman, yaitu meningkatnya permintaan menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru.

Fungsi intermediasi perbankan diperkirakan masih tetap meningkat.

Inflasi tertinggi diperkirakan terjadi pada bulan Oktober 2005. Kenaikan harga pada bulan tersebut tersebut selain terkait dengan masa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri juga berkaitan dengan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM kembali pada bulan Oktober. Kenaikan harga BBM tersebut akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga pada kelompok transpor, khususnya tarif angkutan, sedangkan dampak tidak langsung akan mendorong kenaikan harga kelompok barang dan jasa lainnya, sebagai akibat naiknya biaya transportasi dan biaya produksi.

Pada triwulan IV-2005, fungsi intermediasi perbankan diperkirakan masih tetap mengalami peningkatan. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya DPK yang dihimpun dan kredit yang disalurkan, meskipun dengan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III-2005.

Melambatnya pertumbuhan DPK pada triwulan mendatang antara lain disebabkan oleh berkurangnya kemampuan masyarakat untuk menyetor sebagian dari pendapatannya sebagai simpanan. Situasi tersebut terjadi karena meningkatnya pengeluaran masyarakat, baik untuk keperluan konsumsi maupun produksi, menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal.

Kredit diperkirakan masih tetap tumbuh, karena adanya realisasi kredit baru atas kredit yang disetujui perbankan pada triwulan sebelumnya, khususnya pada triwulan II-2005, yang mencapai Rp8,10 triliun. Selain itu, faktor pendorong pertumbuhan kredit lainnya adalah pemenuhan pencapaian target penyaluran kredit perbankan sebagaimana ditetapkan dalam bussiness plan pada awal tahun.

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan sistem pembayaran di Jawa Barat pada triwulan IV-2005, juga akan ditandai dengan peningkatan volume dan nominal transaksi tunai maupun non tunai. Transaksi tunai akan mengalami peningkatan, khususnya pada kegiatan penukaran uang kecil oleh masyarakat umum dan penarikan uang tunai oleh perbankan guna memenuhi kebutuhan transaksi sehubungan dengan hari raya Idul Fitri dan Natal.

**Volume dan nominal transaksi, baik tunai maupun non tunai masih akan mengalami peningkatan.**

# BAB 1

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

### 1. KONDISI UMUM

Pada triwulan III-2005, perekonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 0,88% (qtq) atau 5,86% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan II-2005, sebesar 0,07%. Pertumbuhan ekonomi yang masih berlanjut sampai dengan triwulan ini ditopang oleh sektor-sektor ekonomi dominan (leading sectors) dalam perekonomian Jawa Barat, yang relatif masih dapat mempertahankan produktivitasnya dari tekanan beberapa faktor yang kurang kondusif, seperti kenaikan harga BBM yang terjadi pada triwulan I, meningkatnya suku bunga, dan faktor eksternal berupa kenaikan harga minyak dunia, serta cenderung melemahnya nilai tukar rupiah pada triwulan III-2005.

Sektor ekonomi dominan yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan ini adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Di sektor industri pengolahan, subsektor industri nonmigas masih merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Industri yang memberikan kontribusi paling signifikan di subsektor tersebut adalah industri alat angkutan, mesin dan peralatannya. Sementara di sektor PHR, penyumbang terbesarnya adalah subsektor perdagangan besar dan eceran. Perkembangan di kedua sektor ini<sup>1</sup> sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung, yang menunjukkan adanya peningkatan produksi dan kegiatan usaha di sektor industri pengolahan dan PHR pada triwulan III-2005.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi. Konsumsi yang pada triwulan lalu sempat mengalami penurunan, pada triwulan ini kembali mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu, investasi yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan-triwulan sebelumnya, masih terus tumbuh pada triwulan III-2005.

---

<sup>1</sup> Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan konsumsi Jawa Barat, sedangkan konsumsi pemerintah, yang pada triwulan lalu meningkat cukup signifikan, pada triwulan ini memberikan kontribusi negatif. Peningkatan konsumsi pada triwulan ini dipengaruhi oleh faktor musiman sehubungan dengan tahun ajaran baru, yang mendorong peningkatan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk keperluan pendidikan. Di samping itu, peningkatan konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang cenderung meningkat pada triwulan mendatang, sebagaimana diindikasikan oleh hasil survei KBI Bandung yang mengungkapkan bahwa sebagian besar responden lebih memilih untuk melakukan konsumsi pada saat ini karena pertimbangan akan adanya kenaikan harga. Indikasi lain peningkatan konsumsi rumah tangga terlihat pula dari perkembangan kredit perbankan, yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan kredit konsumsi oleh masyarakat.

Peningkatan investasi pada triwulan ini masih terkait dengan pembangunan infrastruktur dan properti, sebagaimana yang telah terjadi pada triwulan sebelumnya. Di samping itu, peningkatan kegiatan investasi didorong pula oleh meningkatnya kegiatan perluasan pabrik/peningkatan kapasitas produksi di bidang otomotif. Peningkatan investasi yang terjadi pada triwulan ini diindikasikan oleh hasil survei KBI Bandung, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi/pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di sektor industri, sejalan dengan meningkatnya kegiatan usaha di sektor tersebut. Peningkatan investasi pada triwulan ini diindikasikan pula oleh perkembangan kredit perbankan, yang menunjukkan adanya peningkatan penyaluran kredit investasi oleh perbankan ke sektor-sektor ekonomi dominan di Jawa Barat, seperti sektor industri pengolahan dan sektor PHR; serta sektor konstruksi dan bangunan.

Berbeda dengan perkembangan yang terjadi pada sisi konsumsi dan investasi, kegiatan perdagangan luar negeri pada triwulan III-2005 sedikit mengalami penurunan, baik ekspor maupun impor nonmigas. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan kredit ekspor triwulan ini yang menjadi salah satu sumber pembiayaan eksportir, mengalami penurunan pada triwulan III-2005 bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, kredit ekspor masih

---

<sup>2</sup> Survei Penjualan Eceran (SPE)

<sup>3</sup> SKDU, SPE dan Survei Harga Properti Residensial (SHPR)

mengalami pertumbuhan, terutama pada sektor industri pengolahan. Penurunan ekspor pada triwulan ini diperkirakan bersifat sementara.

Di sisi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan III-2005, secara umum dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, dimana pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan. Namun demikian, jumlah tenaga kerja yang terserap pada triwulan ini masih relatif kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja tinggi. Berdasarkan <sup>4</sup>survei yang dilakukan oleh KBI Bandung, dari sembilan sektor ekonomi, empat sektor diantaranya mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja, yakni sektor konstruksi dan bangunan; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian, sejalan dengan pertumbuhan produksi yang terjadi pada sektor-sektor tersebut. Peningkatan tenaga kerja yang relatif tinggi terjadi pada industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, sejalan dengan meningkatnya kegiatan produksi di industri tersebut.

Pertumbuhan positif yang terjadi sampai dengan triwulan III-2005 menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat masih dapat berkembang secara berkesinambungan. Untuk menjaga perkembangan tersebut serta dalam rangka pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2005 yang sebesar 4,8%, antara lain memerlukan efisiensi investasi dalam perekonomian, yang salah satu indikatornya dicerminkan oleh incremental capital<sup>5</sup> output ratio (ICOR). Berdasarkan perkembangan ICOR di Jawa Barat yang menunjukkan penurunan selama tiga tahun terakhir, yakni dari 3,77 pada tahun 2003 menjadi 3,30 pada tahun 2004, dan pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 3,00, efisiensi investasi dalam perekonomian Jawa Barat diharapkan dapat meningkat.

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahunan Jawa Barat seyogyanya dapat mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap kabupaten/kota dapat diperkecil. Selama ini, pencapaian target pertumbuhan ekonomi belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sebagaimana dicerminkan oleh perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif lambat. Hal ini

---

<sup>4</sup> SKDU

<sup>5</sup> Formula yang digunakan: persentase investasi terhadap PDRB (harga konstan)/pertumbuhan PDRB (tahunan dengan harga konstan); sesuai dengan buku Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Suseno Triyanto, 1990, yang digunakan pula dalam Laporan Akhir Analisis Indikator Ekonomi Makro Regional Jawa Barat, Kerjasama Bapeda Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, 2003.

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

menunjukkan bahwa besaran-besaran pertumbuhan ekonomi masih belum mencerminkan kualitas pembangunan ekonomi itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang selama ini didominasi oleh sektor industri pengolahan dan PHR belum cukup mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Sementara itu, peran sektor pertanian yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong laju pertumbuhan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Di samping itu, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat juga masih bertumpu pada konsumsi. Peran konsumsi yang cukup besar dalam PDRB ini pun tampaknya belum mencerminkan daya beli riil masyarakat Jawa Barat, karena sumber pembiayaan konsumsi tersebut tidak hanya berasal dari pendapatan, melainkan juga dari sumber-sumber pembiayaan lainnya, seperti pinjaman dari perbankan, yang nilainya cenderung mengalami peningkatan.

## 2. PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN PDRB per Kapita Kabupaten/Kota <sup>6</sup>

Perekonomian Jawa Barat yang cenderung mengalami pertumbuhan positif sampai dengan triwulan III-2005 ini tampaknya belum merata di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi mampu mendorong peningkatan PDRB per kapita (atas dasar harga berlaku) Jawa Barat hingga mencapai Rp7.880 ribu, atau tumbuh 10,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, ketimpangan distribusi PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Barat belum menunjukkan perubahan yang berarti, dimana baru tujuh kota/kabupaten yang PDRB per kapita-nya diatas PDRB per kapita Jawa Barat, sedangkan sebagian besar lainnya masih dibawah PDRB perkapita Jawa Barat. PDRB per kapita kota/kabupaten di Jawa Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Jawa Barat, meliputi:

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota, Cirebon, Kota Cimahi.

---

<sup>6</sup>Sumber data: PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 2002-2004, kerjasama BPS Provinsi Jawa Barat dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat

- PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Jawa Barat, meliputi:

Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Bila komponen migas dikeluarkan dari PDRB, jumlah kota/kabupaten yang PDRB per kapita-nya diatas PDRB per kapita Jawa Barat tidak mengalami perubahan. Namun, Kota Bekasi menggantikan posisi Kabupaten Indramayu yang kini masuk ke dalam kelompok PDRB per kapita dibawah PDRB per kapita Jawa Barat.

Sementara itu, dilihat dari perbandingan besar kecilnya PDRB per kapita kabupaten/kota, perbedaan antara PDRB per kapita tertinggi (Rp22.451 ribu) dan yang terendah (Rp3.716 ribu) mengalami peningkatan, dari sebesar Rp17.916 ribu menjadi Rp18.735. Demikian halnya dengan perbandingan besar kecilnya PDRB per kapita kabupaten/kota tanpa migas, perbedaan antara PDRB per kapita tertinggi (Rp22.106 ribu) dan yang terendah (Rp3.716 ribu) juga mengalami peningkatan, yakni dari Rp17.782 ribu menjadi Rp18.390 ribu. Dengan masih banyaknya kabupaten/kota yang PDRB per kapita-nya dibawah PDRB per kapita Jawa Barat dan relatif tingginya perbedaan PDRB per kapita antar kabupaten/kota tersebut, upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat masih menghadapi tantangan yang cukup berat.

### Tingkat Pengangguran dan Jumlah Keluarga Miskin

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sampai dengan triwulan III-2005 secara kualitas belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara memuaskan, termasuk dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sebagaimana yang terjadi dalam periode tahun 2003-2004 pengangguran dan jumlah keluarga miskin di Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran di Jawa Barat meningkat dari 1,5 juta orang pada tahun 2003 (9,2%), menjadi 2 juta orang pada tahun 2004 (12,25%). Peningkatan jumlah pengangguran ini tersebar di setiap wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk wilayah yang memiliki PDRB perkapita cukup tinggi, seperti Kota Bekasi, Bandung, dan Bogor.

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Pada tahun 2005 ini, peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran pada tahun 2005 diperkirakan masih relatif tinggi. Lemahnya penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha, antara lain disebabkan oleh melemahnya kemampuan perusahaan untuk menanggung beban biaya produksi yang semakin meningkat, sehubungan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bagi industri pada saat beban puncak, kenaikan harga BBM serta tuntutan kenaikan upah oleh para pekerja.

Selain pengangguran, jumlah keluarga miskin di Jawa Barat pada tahun ini juga diperkirakan mengalami peningkatan. Peningkatan pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat, sebagai dampak dari tingginya laju inflasi, diperkirakan mendorong peningkatan angka kemiskinan di Jawa Barat. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2005 dalam rangka mendata jumlah keluarga<sup>7</sup> miskin penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM, jumlah keluarga miskin di Jawa Barat mencapai 2,5 juta keluarga atau sekitar 25% dari total jumlah keluarga di Jawa Barat. Dari 25 kota/kabupaten di Jawa Barat, sebelas diantaranya (44%) memiliki persentase jumlah keluarga miskin di atas persentase jumlah keluarga miskin di Jawa Barat.

Bila penyebaran jumlah keluarga miskin ini dikaitkan dengan PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Barat, maka kabupaten/kota di Jawa Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- I. PDRB di atas rata-rata (PDRB Jawa Barat) dan persentase keluarga miskin di bawah rata-rata (persentase keluarga miskin Jawa Barat).
- II. Terdapat lima kota/kabupaten (20%) yang masuk dalam kategori berpendapatan dan kesejahteraan relatif tinggi, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Cimahi.
- III. PDRB di atas rata-rata dan persentase keluarga miskin di atas rata-rata.

Terdapat dua kota/kabupaten (8%) yang masuk dalam kategori berpendapatan relatif

---

<sup>7</sup> Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

tinggi namun kurang merata, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta.

#### IV. PDRB di bawah rata-rata dan persentase keluarga miskin di atas rata-rata

Terdapat sembilan kota/kabupaten (36%) yang berpendapatan relatif rendah, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang.

#### V. PDRB dan persentase keluarga miskin di bawah rata-rata.

Terdapat sembilan kota/kabupaten (36%) yang berpendapatan relatif rendah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

Selanjutnya, bila pengelompokan tersebut di atas memasukkan pula angka laju pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah, maka hanya dua kota/kabupaten (8%) yang berada dalam posisi cukup baik, yakni pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi. Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung. Perekonomian di kedua kota ini didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor PHR, yang juga menjadi sektor pendorong utama perekonomian Jawa Barat.

Sebaliknya, kota/kabupaten yang berada dalam posisi kurang berkembang, yakni pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah, jumlahnya cukup banyak, meliputi delapan kota/kabupaten (32%) dengan sektor pertanian dan sektor jasa sebagai sektor dominan dalam perekonomiannya. Sehubungan dengan besarnya peranan sektor pertanian di wilayah yang kurang berkembang, pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pertumbuhan sektor tersebut, termasuk industri agro (lihat sub bab 3.3. Sektor Pertanian).

### Indeks Pembangunan Manusia

Sebagaimana halnya tingkat pengangguran dan jumlah keluarga miskin, IPM yang ditargetkan menjadi indikator keberhasilan pembangunan di Jawa Barat masih belum menunjukkan perkembangan yang memuaskan. Meskipun target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini 4,8% diperkirakan dapat terlampaui, namun target IPM sebesar 74,5

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

diperkirakan sulit untuk dicapai.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selalu mampu mencapai target yang ditetapkan atau mengalami deviasi yang relatif kecil dari target tersebut. Namun, untuk IPM, deviasi antara target dan pencapaiannya dari tahun ketahun relatif masih cukup besar. Hal ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dalam faktor pembentuk IPM, yakni indeks pendidikan, kesehatan, maupun indeks daya beli.

Indeks daya beli yang pada tahun ini ditargetkan sebesar 72,3 diperkirakan sulit untuk dapat terpenuhi, seiring dengan kenaikan harga barang secara umum tanpa diikuti peningkatan pendapatan masyarakat. Dua indeks lainnya, yaitu indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang masing-masing ditargetkan sebesar 82,0 dan 69,6, juga diperkirakan relatif sulit untuk terpenuhi.

Sulitnya pencapaian target indeks pendidikan tercermin dalam beberapa perkembangan terakhir yang terjadi pada triwulan ini, seperti menurunnya daya beli riil sebagian masyarakat dan kenaikan biaya pendidikan yang tercermin dari inflasi biaya jasa pendidikan pada triwulan ini yang mencapai 7,48% (qtq). Hal ini menyebabkan semakin banyak warga yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, tahun ini pemerintah melakukan program dana bantuan operasional sekolah guna membantu pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Dilihat dari aspek kesehatan, kemampuan sebagian besar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik juga diperkirakan menurun. Perkembangan pada triwulan ini menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan kesehatan mengalami peningkatan, sedangkan pendapatan riil masyarakat justru mengalami penurunan. Pada triwulan III-2005, tarif rumah sakit, puskesmas, tarif dokter, dan harga obat meningkat relatif tinggi. Jasa kesehatan mengalami inflasi mencapai 7,54% (qtq). Bila kondisi tersebut terus berlanjut, maka kualitas kesehatan masyarakat dikhawatirkan akan menurun. Kondisi ini semakin terbebani pula dengan cenderung naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras yang mengalami inflasi 7,38% (qtq), sehingga alokasi pengeluaran masyarakat untuk

---

<sup>8</sup> Inflasi yang dimaksud adalah inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat

keperluan kesehatan akan semakin berkurang.

Untuk mendorong pencapaian target IPM Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengembangkan berbagai program kegiatan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas variabel-variabel yang menjadi penentu perkembangan indeks-indeks pembentuk IPM. Salah satu program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dalam rangka mendorong peningkatan IPM adalah Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat yang bertujuan untuk memacu motivasi dan inovasi pemerintah daerah bersama masyarakat kabupaten/kota dalam menjalankan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target IPM tersebut. Total dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk program tersebut adalah sekitar Rp190 miliar untuk tahun anggaran 2006.

### 3. SISI PRODUKSI

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III-2005 tercatat sebesar 0,88% (qtq), dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 1993 sebesar Rp17,58 triliun, atau tumbuh 5,86% dibandingkan triwulan III-2004. Pertumbuhan

Tabel 1.1. PDRB Sisi Produksi (Rp Miliar)

NAMA SEKTOR	2004*		2005*		
	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3
1. Pertanian	2,102	2,063	2,283	2,102	2,115
2. Pertambangan	726	739	731	737	737
3. Industri Pengolahan	6,399	6,560	6,646	6,757	6,764
4. Listrik, Gas, Air Bersih	572	581	573	561	562
5. Bangunan/Konstruksi	592	606	610	627	650
6. PHR	2,797	2,887	3,003	3,023	3,034
7. Pengangkutan & Kom.	999	1,039	1,018	1,024	1,031
8. Keuangan	815	842	851	882	883
9. Jasa Jasa	1,603	1,654	1,698	1,711	1,735
<b>PDRB</b>	<b>16,606</b>	<b>16,972</b>	<b>17,413</b>	<b>17,426</b>	<b>17,579</b>

Keterangan:

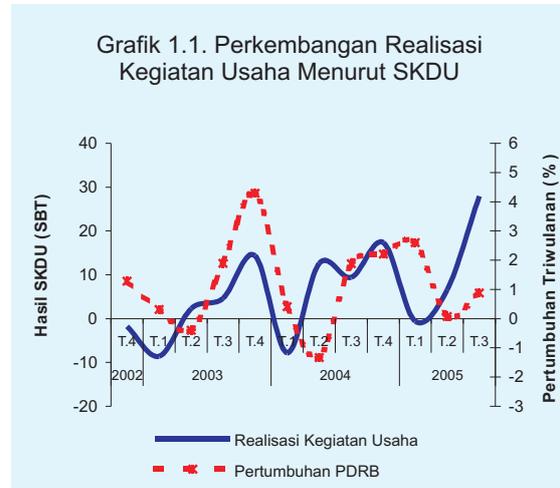
\* Angka perkiraan, atas dasar harga konstan 1993.

Nama sektor disingkat untuk kepraktisan.

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

tersebut terutama didorong oleh sektor industri pengolahan serta sektor PHR (lihat Tabel 1.1).

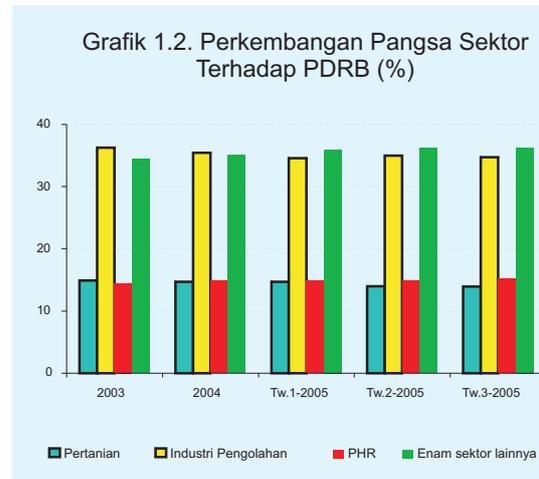
Pertumbuhan positif PDRB Jawa Barat pada triwulan ini sejalan dengan hasil SKDU triwulan III-2005 yang dilakukan terhadap 310 pelaku usaha di Jawa Barat. Hasil SKDU mengindikasikan bahwa pada triwulan ini terjadi ekspansi atau peningkatan jumlah produksi dan penjualan, yang didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat (Grafik 1.1).



Perkembangan kegiatan usaha di Jawa Barat pada triwulan III-2005 ini ditandai pula dengan peningkatan jumlah perusahaan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, sampai dengan triwulan ini tercatat 16.690

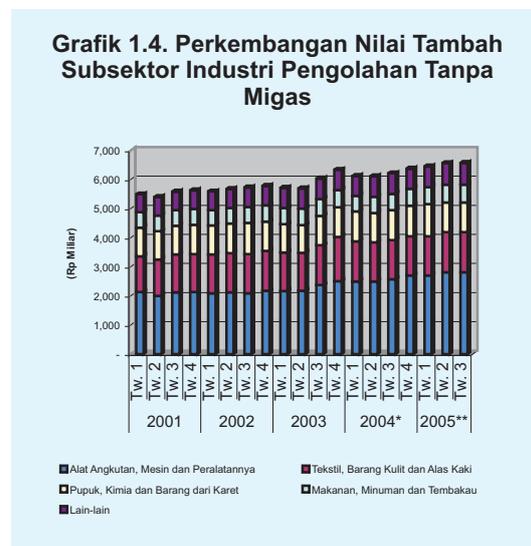
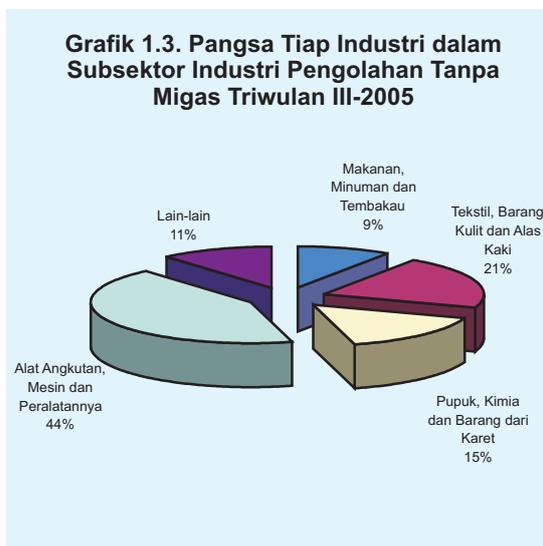
perusahaan yang mengajukan tanda daftar perusahaan (TDP). Jumlah tersebut meningkat signifikan (74,57%) dibandingkan tahun 2004 yang hanya 9.560 perusahaan.

Berdasarkan pangsaanya terhadap PDRB Jawa Barat, peranan seluruh sektor ekonomi relatif tidak berubah. Sektor penyumbang terbesar PDRB sampai dengan triwulan III-2005 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor PHR, dan sektor pertanian.



Rata-rata pangsa industri pengolahan dalam tiga triwulan terakhir merupakan yang terbesar, yakni mencapai 38%, kemudian diikuti oleh sektor PHR dan sektor pertanian, masing-masing 14% dan 12%. Secara keseluruhan, ketiga sektor ini mendominasi pembentukan PDRB Jawa Barat, dengan pangsa rata-rata selama tiga triwulan terakhir lebih dari 60% (Grafik 1.2).

### 3.1. SEKTOR EKONOMI DOMINAN (LEADING SECTORS)



#### 3.1.1. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan pada triwulan III-2005 masih terus tumbuh, seperti terjadi pada triwulan-triwulan sebelumnya. Sektor tersebut tumbuh 0,1% (qtq), melambat dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan II-2005 yang mencapai 1,68% (qtq), antara lain disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku.

Sampai dengan triwulan III-2005, sektor industri pengolahan masih didominasi oleh

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

subsektor industri tanpa migas dengan pangsa mencapai 97%. Hal ini menunjukkan bahwa produksi industri tanpa migas berpengaruh besar terhadap kinerja sektor industri pengolahan. Pertumbuhan pada subsektor industri tanpa migas terutama didorong oleh peningkatan produksi pada industri angkutan, mesin dan peralatannya; industri tekstil, barang kulit dan alas kaki; industri pupuk, kimia dan barang dari karet; serta industri makanan, minuman dan tembakau (Grafik 1.3 & Grafik 1.4).



Industri yang dominan pada subsektor industri pengolahan tanpa migas adalah industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, dengan pangsa terhadap subsektor industri pengolahan tanpa migas mencapai 42,85%, meningkat dibandingkan dengan pangsa triwulan III-2004 (sebesar 41,32%). Peningkatan jumlah produksi di industri tersebut (Grafik 1.5) seiring dengan meningkatnya investasi di industri otomotif. Pada akhir triwulan ini PT Astra Honda Motor melakukan investasi sebesar USD140 juta untuk pembangunan pabrik ketiganya di Cikarang-Bekasi. Pabrik dengan investasi 140 juta dolar AS ini direncanakan untuk memproduksi 1 juta unit sepeda motor setiap tahunnya dan menyerap tenaga kerja sekitar 4.000 orang.

Peningkatan kapasitas produksi di industri otomotif, baik untuk produksi motor maupun mobil didorong oleh meningkatnya permintaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa produsen besar yang sedang meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi peningkatan permintaan ini, adalah produsen mobil Toyota, Suzuki dan Yamaha. Produsen mobil Toyota meningkatkan kapasitas produksinya dari 70.000 unit menjadi

100.000 unit per tahun. Sementara itu, produsen kendaraan merk Suzuki juga telah meningkatkan kapasitas produksinya untuk sepeda motor, yakni dari 800.000 unit menjadi 1,2 juta unit. Kapasitas produksi ini selanjutnya akan ditingkatkan hingga mencapai 2 juta unit per tahun pada 2006-2007, dengan investasi mencapai USD200 juta. Produsen Suzuki juga berencana menjadikan Indonesia sebagai



basis ekspor mobil Suzuki APV. Demikian halnya dengan produsen Yamaha, juga akan meningkatkan kapasitas produksinya, khususnya untuk sepeda motor dengan kapasitas 600 ribu unit pada Januari 2006 dengan investasi mencapai USD80 juta.

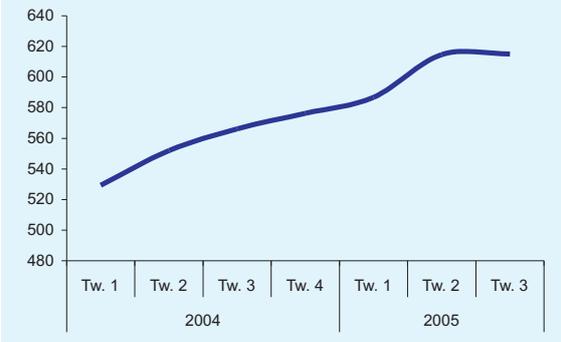
Pangsa industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki dalam subsektor industri pengolahan tanpa migas pada triwulan III-2005 sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.6), dengan pertumbuhan sekitar 0,35%. Meskipun masih menunjukkan perkembangan positif pada triwulan III-2005, industri ini masih menghadapi beberapa permasalahan. Kendala tersebut antara lain kebutuhan peremajaan mesin produksi, masuknya produk TPT impor ilegal, serta meningkatnya biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan biaya energi. Beban ini akan semakin bertambah jika para pekerja menuntut kenaikan gaji sehubungan dengan menurunnya pendapatan riil pekerja sebagai dampak dari relatif tingginya laju inflasi. Permasalahan-permasalahan tersebut seyogyanya perlu segera diatasi, agar daya saing industri TPT Jawa Barat dapat ditingkatkan dan perannya baik bagi perekonomian Jawa Barat maupun nasional dapat semakin besar.

Pada triwulan III-2005, industri pupuk, kimia dan barang dari karet masih mengalami penurunan produksi. Penurunan tersebut mulai melambat pada triwulan ini jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada triwulan II-2005. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah akibat ketidaklancaran/menurunnya produksi pupuk urea PT Pupuk

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Kujang, karena berkurangnya pasokan gas yang dibutuhkan untuk produksi pupuk tersebut sejak awal tahun 2005. Namun demikian, dengan adanya kepastian pasokan gas dari PT Pertamina mulai Agustus 2005 sampai tahun 2008, termasuk kepastian pasokan gas untuk pabrik baru PT Pupuk Kujang di Cikampek-Karawang, produksi pupuk pada periode-periode mendatang diharapkan dapat lebih ditingkatkan.

**Grafik 1.7. Perkembangan Nilai Tambah Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (Rp Miliar)**



Saat ini kebutuhan pupuk di seluruh Jawa Barat sekitar 700.000 - 800.000 ton per tahun. Jumlah kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi oleh produsen pupuk yang selama

**BOKS 1. INDUSTRI KERAJINAN ROTAN CIREBON:  
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SAAT INI**

Industri kerajinan rotan (mebel/furnitur rotan) di kabupaten Cirebon selama ini menjadi pemasok bagi sebagian besar pasar dunia, terutama di negara-negara Eropa. Industri tersebut juga termasuk dalam kategori strategis bagi Jawa Barat. Selain menyerap banyak tenaga kerja (terdapat kurang lebih 200 ribu pekerja di industri mebel/furnitur rotan Kabupaten Cirebon pada tahun 2002<sup>1</sup>), juga merupakan salah satu sumber pemasukan bagi devisa negara (nilai ekspor mebel/furnitur rotan Cirebon tahun 2003 sebesar US\$122 juta dan meningkat mencapai US\$135 juta pada tahun 2004<sup>2</sup>). Oleh karena itu, produksi industri kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Mulai bulan Januari 2005, pemerintah memberlakukan peraturan menteri perdagangan (permenperdag) No. 12/2005, tentang pembukaan ekspor rotan bahan baku. Sejak pemberlakuan ketentuan baru tersebut kinerja industri kerajinan rotan di kabupaten Cirebon mengalami penurunan, bahkan kesinambungan produksinya dikhawatirkan dapat terhenti. Dengan dibukanya kembali ekspor rotan bahan baku ini menyebabkan persediaan rotan untuk memenuhi kebutuhan industri kerajinan rotan dalam negeri menjadi berkurang. Perbedaan harga antara pasar luar negeri dan dalam negeri yang cukup tinggi semakin mendorong eksportir rotan memasarkan produknya di luar negeri, sehingga pasokan rotan bahan baku bagi industri mebel/furnitur rotan dalam negeri semakin berkurang. Untuk mengatasi kekurangan pasokan rotan bahan baku tersebut, beberapa kebijakan dan kerjasama antar-daerah/pemerintah daerah telah dilakukan (seperti kerjasama antara Badan Kerjasama Pembangunan Sulawesi (BKPRS) dengan Pemda Jawa Barat untuk menjamin ketersediaan pasokan rotan bahan baku dari Sulawesi).

Di samping permasalahan tersebut, ekspor rotan bahan baku Indonesia ke beberapa negara, seperti China dan Vietnam, mengakibatkan industri kerajinan rotan negara tersebut menjadi bangkit dan akan mengambil alih kurang lebih 40% pangsa furnitur rotan Indonesia di pasar global<sup>3</sup>. Kebangkitan industri kerajinan rotan Cina dan Vietnam ini dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan industri kerajinan rotan Cirebon yang selama ini telah menguasai pasar kerajinan rotan dunia. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya yang serius untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon saat ini, baik mengenai aspek regulasi maupun daya saing produk kerajinan rotan dan ketersediaan pasokan rotan bahan baku. Dengan teratasinya masalah ini, kelangsungan industri rotan di Kabupaten Cirebon dan perkembangannya ke depan diharapkan dapat dipertahankan.

<sup>1</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon

<sup>2</sup> Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

<sup>3</sup> Informasi dari Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo)

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

ini menjadi pemasok utama di Jawa Barat, yakni PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Sriwijaya.

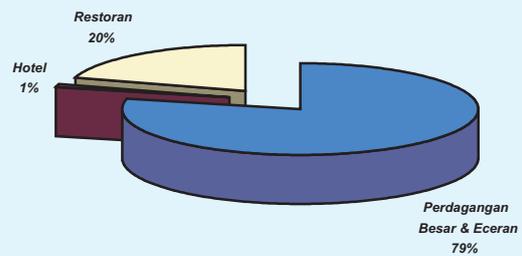
Sementara itu, industri makanan, minuman dan tembakau (mamin) masih terus mengalami peningkatan produksi (Grafik 1.7). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat, khususnya pada saat liburan sekolah di awal triwulan ini. Hal ini diindikasikan oleh hasil SKDU, yang menunjukkan adanya peningkatan volume produksi dan penjualan industri mamin pada triwulan III-2005 yang dipengaruhi oleh faktor musiman. Selain itu, hasil SPE juga mengindikasikan adanya peningkatan penjualan ritel produk makanan dan tembakau, dari 8,54% pada triwulan II-2005 menjadi 13,96% pada triwulan ini.

### 3.1.2 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

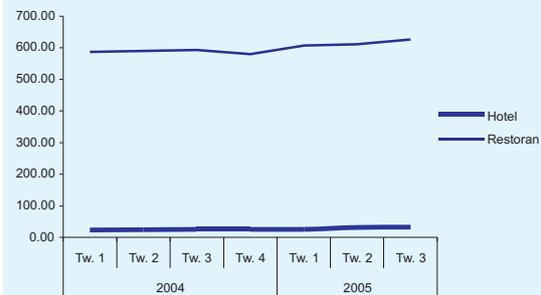
Pada triwulan III-2005, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni 2,24% (qtq), dengan sumbangan terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,39%. Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh kenaikan nilai penjualan pada semua subsektor, dengan kontribusi terbesar masih didominasi subsektor perdagangan besar dan eceran, diikuti oleh restoran dan kemudian hotel (Grafik 1.8).

Pertumbuhan pada subsektor hotel dan restoran pada triwulan III-2005 didorong oleh meningkatnya permintaan, terutama oleh masyarakat DKI Jakarta terhadap jasa hotel

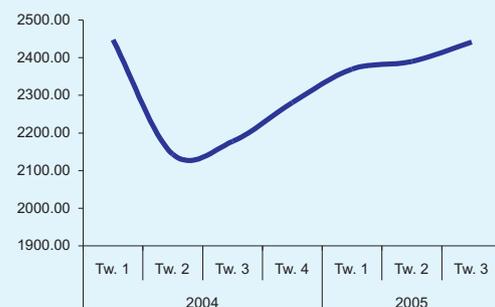
**Grafik 1.8. Pangsa Subsektor dalam Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Triwulan III-2005**



**Grafik 1.9. Perkembangan Nilai Tambah Subsektor Hotel dan Subsektor Restoran (Rp Miliar)**



**Grafik 1.10. Perkembangan Nilai Tambah Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp Miliar)**



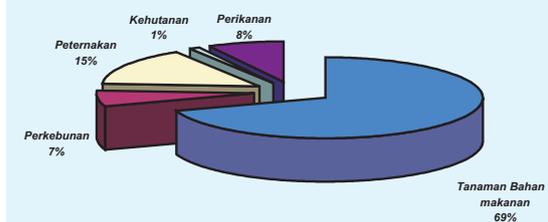
dan restoran di Kota Bandung. Peningkatan ini antara lain sebagai dampak dari meningkatnya kemudahan akses ke kota Bandung dengan adanya jalan tol Cipularang. Di

yang kemudian diikuti oleh subsektor peternakan dengan pangsa sebesar 15% (Grafik 1.11).

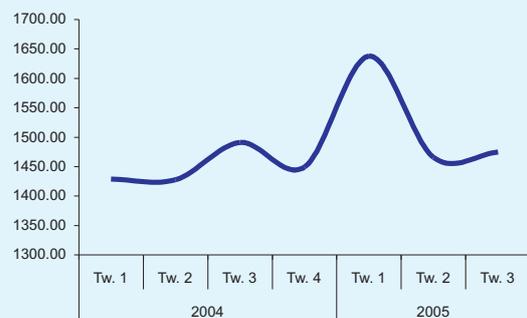
Peningkatan jumlah produksi subsektor tabama pada triwulan III-2005 (Grafik 1.12), terutama didorong oleh meningkatnya permintaan dalam negeri. Di samping itu, keadaan cuaca yang kondusif dalam triwulan ini turut mendukung peningkatan produksi subsektor tabama. Hasil SKDU triwulan III-2005 juga menunjukkan peningkatan produksi di subsektor tersebut. Terkait dengan hal ini, pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan produksi sektor pertanian dengan melakukan revitalisasi sektor tersebut, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli petani.

Beberapa kebijakan pemerintah yang akan digulirkan pada akhir triwulan ini, yang dimaksudkan pula sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM kepada petani, adalah kebijakan menaikkan harga pembelian

**Grafik 1.11. Pangsa Subsektor dalam Sektor Pertanian Triwulan III-2005**



**Grafik 1.12. Perkembangan Nilai Tambah Subsektor Tanaman Bahan Makanan (Rp Miliar)**



## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

pemerintah (HPP) gabah produksi petani dan penghapusan mekanisme operasi pasar (OP) beras (lihat Boks 2. Perkembangan Produksi Beras Jawa Barat: Permasalahan dan Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Beli Petani).

Peternakan merupakan subsektor dengan pangsa terbesar kedua dalam sektor pertanian Jawa Barat. Salah satu jenis peternakan yang sangat potensial di Jawa Barat adalah peternakan sapi perah, yang telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap produksi susu nasional selama lima tahun terakhir ini, yakni sebesar 38%. Di samping itu, peternakan sapi perah Jawa Barat dinilai cukup strategis, dikaitkan antara lain dengan penyerapan tenaga kerja dan pasokan susu bagi industri-industri lanjutan yang menggunakan susu sebagai bahan bakunya.

Namun demikian, perkembangan produksi susu dari peternakan sapi perah Jawa Barat dikhawatirkan dapat menurun, karena belum adanya insentif untuk menstimulir peningkatan produksi atau untuk mempertahankan usaha peternakan sapi perah. Salah satu faktor yang menjadi disinsentif dalam usaha peternakan sapi perah adalah faktor harga jual susu yang tidak pernah naik. Selama 5 tahun terakhir ini, harga jual susu dari para peternak sapi perah Jawa Barat kepada industri pengolahan susu (IPS) belum pernah naik sementara, biaya produksi dan biaya hidup yang harus ditanggung para peternak semakin meningkat. (lihat Boks 3. Perkembangan Peternakan Sapi Perah Jawa Barat: Potensi dan Permasalahan Penetapan Harga Jual Susu ke Industri Pengolahan Susu).

### Perkembangan Industri Agro di Jawa Barat

Industri agro merupakan salah satu industri yang potensial pada sektor pertanian. Selama tahun 2004, industri agro mencatat perkembangan yang relatif signifikan terutama dalam jumlah tenaga kerja. Jumlah pekerja di industri agro pada tahun 2004 mencapai 1,1 juta tenaga kerja atau tumbuh 76,7% dibandingkan tahun sebelumnya (625 ribu). Sementara itu, jumlah pelaku usaha pun meningkat, meskipun tidak setinggi peningkatan jumlah tenaga

## BOKS 2. PERKEMBANGAN PRODUKSI BERAS JAWA BARAT: PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN DAYA BELI PETANI

Kontribusi sektor pertanian di Jawa Barat terhadap pertumbuhan PDRB selama 5 tahun terakhir sekitar 13%. Subsektor yang mendominasi sektor pertanian di Jawa Barat sendiri adalah tanaman bahan makanan (tabama), khususnya padi, yang memiliki pangsa sekitar 70% untuk 5 tahun terakhir (2000 - 2005). Selama 5 tahun terakhir, kontribusi Jawa Barat terhadap produksi padi (beras) nasional sekitar 18%<sup>1</sup>. Untuk tahun 2004, misalnya, jumlah produksi beras Jawa Barat sekitar 9.299.506 ton (senilai lebih kurang Rp12,37 triliun), sedangkan total produksi beras nasional adalah 51.209.433 ton (senilai lebih kurang Rp68,1 triliun).

Salah satu daerah di Jawa Barat yang menjadi pemasok beras terbesar adalah Kabupaten Karawang, yang telah lama dikenal sebagai lumbung beras Jawa Barat. Pada tahun 2004, sekitar 53% dari 175.327 hektar wilayah Kabupaten Karawang adalah lahan persawahan, yakni sekitar 92.923 hektar<sup>2</sup>. Namun demikian, lahan persawahan di Kabupaten Karawang pada tahun 10 tahun yang lalu sekitar 94.742 hektar, lebih luas dari lahan persawahan yang ada saat ini. Sejak tahun 1993 sampai dengan 2003, telah terjadi penyusutan lahan persawahan di Kabupaten Karawang, dengan rata-rata penyusutan mencapai 181,87 hektar per tahun.

Selain itu, dengan berkurangnya lahan persawahan di Kabupaten Karawang, komposisi ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang pun mengalami perubahan. Di sektor pertanian, jumlah pekerja mengalami penurunan dari 41,9% (sekitar 281.155 orang) pada tahun 2003 menjadi 27,67% (sekitar 185.667 orang) pada tahun 2004. Sementara itu, di sektor industri terjadi peningkatan jumlah pekerja dari 19,75% (sekitar 107.204 orang) pada tahun 2003 menjadi 22,73% (sekitar 152.522 orang) pada tahun 2004, dan sektor jasa meningkat dari 38,35% (sekitar 257.495 orang) menjadi 49,6% (sekitar 332.823 orang).

Penyusutan luas lahan persawahan yang diikuti dengan penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian sebenarnya tidak terlepas dari belum adanya insentif pada sektor tersebut, terutama karena rendahnya harga jual gabah/beras petani di satu sisi dan biaya hidup yang terus meningkat di sisi lain. Hal ini pada akhirnya membuat petani kurang bergairah untuk menanam padi. Apabila hal ini terus berlanjut, dampaknya bukan saja pada penyusutan lahan persawahan, tetapi juga dapat menurunkan jumlah produksi beras di sentra-sentra produksi beras, termasuk di Jawa Barat.

Untuk mengatasi permasalahan menurunnya kegairahan petani menanam padi dan penyusutan lahan persawahan, karena tidak adanya insentif dari usaha menanam padi. Pemerintah (Departemen Pertanian), telah mengusulkan beberapa kebijakan, diantaranya Kebijakan yang akan direalisasikan adalah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah produksi petani. Selain itu, pada akhir 2005 Pemerintah juga akan memperbaiki regulasi perberasan nasional, seperti penghapusan mekanisme operasi pasar, karena telah adanya mekanisme bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin), dan penutupan celah yang memungkinkan perusahaan umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) mengimpor beras ketika terjadi surplus beras nasional. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan stok beras nasional oleh Perum Bulog, yang bukan dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan raskin, ke depan, Perum Bulog akan membeli gabah atau beras dari petani domestik, sepanjang produksi dalam negeri mencukupi walaupun harga pasar gabah/beras di atas HPP.

Dengan adanya realisasi kenaikan HPP dan perbaikan regulasi perberasan nasional, ditambah penerapan metode penanaman yang dapat meningkatkan jumlah produksi beras pada lahan yang terbatas (yang dikenal dengan sistem Legowo II), jumlah produksi gabah/beras pada sentra-sentra produksi beras, termasuk di Jawa Barat, diharapkan akan dapat ditingkatkan. Dengan peningkatan jumlah produksi beras yang berkelanjutan, tujuan akhir dari kebijakan-kebijakan Pemerintah yang akan segera digulirkan, yaitu swasembada beras, dapat segera diraih. Pencapaian swasembada beras kelak diharapkan akan dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan penguatan ketahanan sosial politik. Selain itu, apabila ada kelebihan produksi, hal tersebut dapat menjadi tambahan sumber penerimaan devisa melalui ekspor surplus beras.

### BOKS 3. PERKEMBANGAN PETERNAKAN SAPI PERAH JAWA BARAT: POTENSI DAN PERMASALAHAN PENETAPAN HARGA JUAL SUSU KE INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU

Subsektor dengan pangsa terbesar kedua dalam sektor pertanian di Jawa Barat adalah subsektor peternakan, dengan pangsa dalam lima tahun terakhir sekitar 15%. Selama lima tahun terakhir (2000 - 2005), kontribusi produksi peternakan sapi perah Jawa Barat terhadap produksi susu nasional sekitar 38%<sup>1</sup>. Untuk tahun 2004, misalnya, jumlah produksi susu Jawa Barat sekitar 215.330 ton (senilai lebih kurang Rp371,44 milyar), sedangkan total produksi susu nasional adalah 549.950 ton (senilai lebih kurang Rp948,67 milyar). Peternak sapi perah di Jawa Barat sampai dengan bulan September 2005 berjumlah sekitar 27.000 peternak, dan harga susu yang dijual oleh para peternak ke Industri Pengolahan Susu (IPS) selama 5 tahun terakhir belum pernah mengalami kenaikan<sup>2</sup>.

Saat ini, permasalahan yang dihadapi para peternak adalah ketidaksesuaian kenaikan harga susu yang diusulkan para peternak melalui Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dengan kenaikan harga yang diusulkan IPS<sup>3</sup>. Kenaikan harga susu yang diusulkan para peternak sebenarnya lebih didasarkan pada kenaikan biaya pokok produksi, seperti biaya pakan ternak. Sedangkan kenaikan harga susu yang diusulkan IPS dikaitkan dengan grade/tingkat kualitas susu, yang ditentukan berdasarkan kandungan bakteri dalam susu (total pleate count-TPC).

Berkaitan dengan tingkat kualitas susu, grade yang dapat dipenuhi oleh sebagian besar peternak adalah grade yang paling rendah, di mana nilai kenaikan harga pembeliannya oleh IPS sangat kecil, lebih kecil dari nilai kenaikan harga yang diminta para peternak. Selain itu, untuk menaikkan grade guna mendapatkan harga jual yang lebih tinggi ke IPS, para peternak harus mengeluarkan dana sendiri (dengan kata lain, IPS tidak mengeluarkan biaya untuk peningkatan kualitas susu). Dengan demikian, kenaikan harga yang ditentukan dengan cara yang diusulkan IPS tidak akan dapat menutupi kenaikan biaya pokok produksi para peternak, bahkan akan merugikan para peternak karena adanya tambahan biaya untuk meningkatkan kualitas susu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, GKSI Jawa Barat telah menandatangani memorandum of understanding (MOU) di bidang perkreditan dengan salah satu bank umum yang berkantor pusat di Bandung dalam rangka pengembangan peternakan sapi perah dan teknologi pemrosesan/pemerahan susu oleh para peternak. Dengan terealisirnya penyaluran kredit tersebut kepada para peternak sapi perah Jawa Barat (pada tanggal 20 September 2005), diharapkan hampir 60% peternak sapi perah Jawa Barat akan berkembang menjadi pemasok susu nasional dengan kualitas yang lebih baik dan memberikan daya tawar harga yang lebih kuat kepada para peternak sapi perah<sup>4</sup>.

-----  
1 Berdasarkan data Departemen Pertanian

2 Menurut GKSI Jawa Barat

3 Menurut GKSI Jawa Barat dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Jawa Barat

4 Menurut Dinas KUKM Jawa Barat

kerja. Pada tahun 2004, pelaku usaha di industri agro tumbuh 2% dari 103,5 ribu perusahaan menjadi 105,6 ribu perusahaan.

Peningkatan pelaku usaha dan jumlah tenaga kerja telah mendorong terjadinya peningkatan produksi dan nilai ekspor. Nilai ekspor beberapa komoditas agro utama sampai dengan bulan September 2005 diperkirakan meningkat 12% dibanding periode yang sama (Januari-September) tahun lalu (Grafik 1.13).

Secara triwulanan, nilai ekspor beberapa komoditas agro utama pada triwulan III-2005 mengalami penurunan. Namun demikian, nilai ekspor kumulatif selama tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 1.2). Peningkatan nilai ekspor ini didorong oleh tingginya peningkatan ekspor komoditas ikan, kerang, moluska & olahannya, gandum & olahan gandum, kopi, teh, coklat & rempah-rempah, serta hasil olahan makanan lainnya yang tumbuh di atas 10%.

Tabel 1.2. Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Agro Utama (USD Juta)

Nama Komoditas	2004				2005		
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3*
Hasil susu dan telur	3.16	2.42	2.03	3.14	2.44	2.19	3.53
Ikan, kerang, moluska dan olahannya	4.28	4.60	7.50	7.71	5.96	6.53	5.98
Gandum dan olahan gandum	12.85	18.66	15.26	13.99	14.14	21.78	16.38
Buah-buahan dan sayur-sayuran	2.80	1.63	1.80	2.94	1.57	1.87	2.24
Gula, olahan gula dan madu	10.21	9.59	10.12	9.22	9.50	11.56	7.46
Kopi, teh, coklat rempah <sup>2</sup>	31.22	38.62	41.65	48.00	40.87	44.23	42.27
Hasil olahan makanan lainnya	5.74	6.13	7.13	8.25	9.26	11.28	9.79
Kayu dan gabus	4.75	3.73	2.48	1.95	2.83	2.97	3.20
Bahan nabati dan hewani lainnya	3.69	4.84	4.11	3.91	4.70	4.28	4.02
<b>Jumlah</b>	<b>78.69</b>	<b>90.23</b>	<b>92.08</b>	<b>99.11</b>	<b>91.27</b>	<b>106.69</b>	<b>94.87</b>

Keterangan: \* Perkiraan untuk bulan September, atas dasar data sampai bulan Agustus

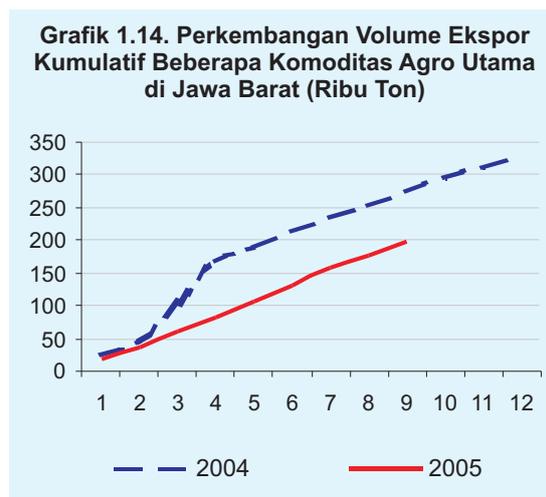
Penurunan nilai ekspor beberapa komoditas agro utama sejalan dengan penurunan volume ekspor komoditas tersebut. Secara kumulatif, volume ekspor beberapa komoditas agro utama selama Januari-September 2005 mencapai 197,45 ribu ton, menurun 27%

<sup>9</sup> Sumber: Dinas Indag Agro Prop. Jabar dari data BPS

<sup>10</sup> Sumber: DSM-PDIE, Bank Indonesia, dari dokumen pemberitahuan ekspor barang dengan klasifikasi SITC

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 1.14). Penurunan ini terutama didorong oleh berkurangnya volume ekspor tiga komoditas, yakni hasil susu & telur, gula, olahan gula & madu serta kayu & gabus. Volume ekspor ketiga komoditas tersebut turun



signifikan, lebih dari 20%. Sebaliknya, volume ekspor komoditas yang lain justru mengalami peningkatan, bahkan volume ekspor dua komoditas (komoditas ikan, kerang, moluska & olahannya; serta gandum & olahan gandum) diantaranya mencatat pertumbuhan yang signifikan, lebih dari 10%.

### 3.2. SEKTOR-SEKTOR LAIN

Pada triwulan III-2005, sektor jasa-jasa masih tumbuh positif, yang didorong oleh peningkatan nilai tambah jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Demikian pula dengan sektor pertambangan dan penggalian, masih mengalami pertumbuhan, meskipun relatif kecil, dimana pertumbuhan pada sektor ini hanya didorong oleh kenaikan nilai tambah produksi pada subsektor minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha subsektor minyak dan gas bumi di Jawa Barat masih memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Sumber daya alam lainnya di Jawa Barat, seperti panas bumi, juga memiliki potensi yang besar untuk mendorong perekonomian daerah, karena sumber daya tersebut masih belum dikelola secara optimal.

Sektor listrik, gas dan air bersih kembali mengalami pertumbuhan positif pada triwulan

III-2005, didorong oleh kenaikan nilai tambah pada subsektor listrik dan subsektor gas kota. Walaupun kenaikan harga BBM pada akhir triwulan I-2005 mempengaruhi biaya produksi listrik, namun karena pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk terus menyediakan produksi listrik sesuai permintaan dan PLN sendiri mampu mengefisienkan kegiatan-kegiatan lainnya di luar kegiatan produksi (termasuk efisiensi kegiatan transmisi dan distribusi), volume dan nilai produksi subsektor listrik tidak mengalami penurunan, bahkan relatif meningkat karena permintaan listrik terus meningkat seiring antara lain dengan peningkatan jumlah properti baru.

Sektor bangunan/konstruksi masih terus mengalami pertumbuhan positif, sejalan dengan terus berkembangnya pembangunan infrastruktur dan properti di Jawa Barat. Pembangunan properti, khususnya di kawasan perkotaan, masih terus berlanjut meliputi properti residensial maupun properti komersial. Tingginya minat masyarakat terlihat dari peningkatan nilai transaksi jual-beli pada pameran-pameran properti di Jawa Barat, sebagaimana yang terjadi di kota Bandung, dimana pembangunan properti residensial untuk kelas premium, baik dalam bentuk real estate maupun apartemen cukup pesat akhir-akhir ini. Hal ini tercermin pula dari peningkatan penjualan perlengkapan konstruksi. Hasil SPE yang dilakukan KBI Bandung menunjukkan bahwa pada triwulan III-2005 masih terjadi peningkatan penjualan perlengkapan konstruksi yang signifikan, mencapai sekitar 300%.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan positif tertinggi pada triwulan III-2005, yang didorong oleh kenaikan nilai tambah produksi pada semua subsektor, terutama subsektor sewa bangunan dan diikuti oleh subsektor bank, subsektor jasa perusahaan dan subsektor lembaga keuangan lainnya. Pertumbuhan subsektor sewa bangunan didorong baik oleh peningkatan jumlah properti komersial dan residensial baru yang disewakan maupun oleh peningkatan jumlah properti yang disewakan untuk kegiatan usaha. Untuk subsektor bank, pertumbuhannya antara lain tercermin dari peningkatan baki debit kredit perbankan sebesar 5,7% (qtq) dan nilai persetujuan kredit baru yang mencapai Rp23,5 triliun pada Januari-September 2005 (tumbuh 21,2% yoy).

Sektor pengangkutan dan komunikasi masih mengalami pertumbuhan positif yang relatif kecil, yang didukung oleh pertumbuhan positif pada semua subsektornya. Peningkatan nilai tambah produksi/jasa subsektor angkutan didukung antara lain dengan adanya pengembangan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol Purwakarta-Bandung dan

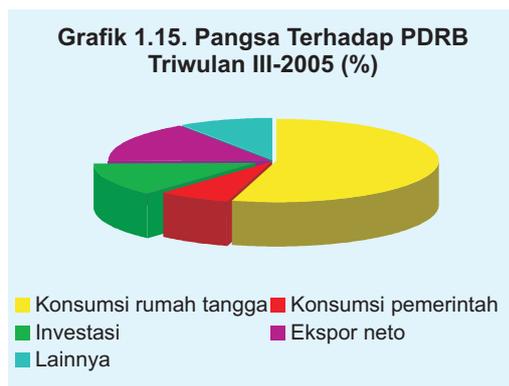
## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

penerbangan langsung Bandung-Singapore/Kuala Lumpur.

### 4. SISI PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, pada triwulan ini konsumsi masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Barat. Namun demikian, peranan investasi dan ekspor mengalami peningkatan. Dalam beberapa triwulan terakhir, pertumbuhan investasi lebih tinggi daripada pertumbuhan konsumsi.

Berdasarkan pangsa terhadap PDRB, pangsa dari setiap komponen pembentuk PDRB relatif tidak berubah. Konsumsi masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB, sementara, kontribusi ekspor dan investasi semakin meningkat.



(Grafik 1.15).

#### 4.1. KONSUMSI

Pada triwulan III-2005, konsumsi mengalami pertumbuhan positif, setelah mengalami penurunan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang pada

triwulan ini mengalami peningkatan. Sebaliknya, konsumsi pemerintah yang pada triwulan lalu meningkat cukup signifikan, pada triwulan ini mengalami penurunan (lihat Subbab 6. Keuangan Pemerintah).

Peningkatan konsumsi secara umum di Jawa Barat terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan, seperti Bandung, Bogor dan Bekasi. Peningkatan konsumsi pada triwulan ini dipengaruhi oleh faktor musiman sehubungan dengan tahun ajaran baru, yang mendorong meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, terutama konsumsi produk-produk peralatan tulis dan makanan. Hal tersebut diindikasikan pula oleh hasil SK Bank Indonesia, yang mengungkapkan bahwa konsumsi sebagian besar responden pada triwulan ini terutama untuk keperluan pendidikan. Indikasi lain peningkatan konsumsi rumah tangga terlihat pula dari pertumbuhan kredit perbankan sebesar 5,73%,

yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan kredit konsumsi oleh masyarakat.

Peningkatan konsumsi pada triwulan ini telah mendorong peningkatan penjualan di tingkat eceran pada triwulan III-2005 sebagaimana diindikasikan oleh hasil SPE yang menunjukkan adanya peningkatan penjualan ritel hingga mencapai 100% (qtq) dengan peningkatan relatif besar pada kelompok barang makanan dan tembakau, peralatan tulis serta bahan bakar. Penjualan subkelompok barang elektronik (audio/video) dan minyak pelumas meningkat signifikan, yakni diatas 500% (qtq).

Sementara itu, hasil SK menunjukkan secara umum terjadi peningkatan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi. Namun demikian, pada akhir triwulan, yakni pada bulan September, terjadi penurunan optimisme masyarakat sehubungan dengan rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan kembali harga BBM (Grafik 1.16).

Terjadinya penurunan indeks keyakinan konsumen pada bulan September disebabkan oleh rendahnya keyakinan responden terhadap kondisi ekonomi saat ini. Hal ini dipengaruhi pula oleh rendahnya keyakinan responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini.



Sumber: Survei Konsumen oleh KBI Bandung  
Keterangan: indeks di bawah 100 berarti pesimis, indeks di atas seratus berarti optimis

Namun demikian, keyakinan responden terhadap perekonomian pada 3-6 bulan mendatang masih optimis, didukung oleh tingginya ekspektasi konsumen terhadap kenaikan penghasilan mereka.

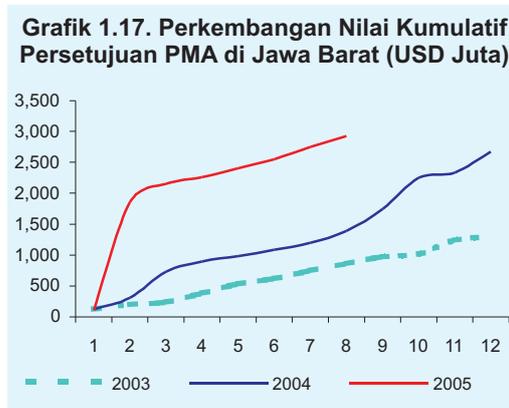
#### 4.2. INVESTASI

Investasi pada triwulan ini masih mengalami pertumbuhan, didorong oleh adanya

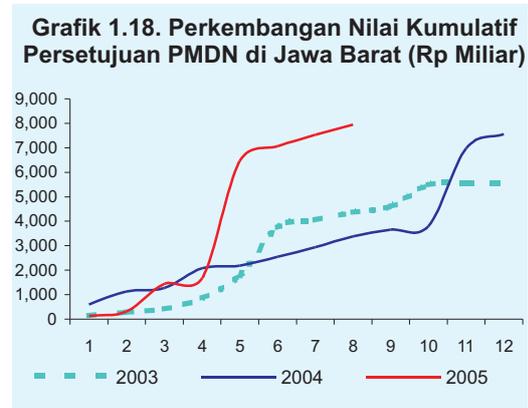
## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

peningkatan investasi dibandingkan periode sebelumnya, baik berupa barang modal (bangunan, mesin) maupun infrastruktur. Pertumbuhan investasi ini tercermin dari peningkatan persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam beberapa bulan terakhir, serta peningkatan kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Barat. Kredit investasi meningkat 7,57% jika dibandingkan triwulan II-2005 atau tumbuh 33,51% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama Januari-Juli



Sumber: BKPM, diolah.



Sumber: BKPM, diolah.

2005, nilai persetujuan PMA mencapai USD2,75 miliar atau meningkat 129% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Sementara itu, nilai persetujuan PMDN pada periode yang sama mencapai Rp7,5 triliun atau meningkat 156% (yoy). Sebagian besar proyek yang menarik minat investor tersebut berupa sektor sekunder, yaitu industri otomotif, serta pembangunan infrastruktur.

Peningkatan investasi yang terjadi pada triwulan III-2005 sejalan dengan hasil beberapa survei yang dilaksanakan KBI Bandung. Survei harga properti residensial (SHPR) menunjukkan adanya peningkatan pembangunan properti residensial (perumahan), sementara hasil SKDU mengindikasikan masih adanya peningkatan kegiatan usaha di

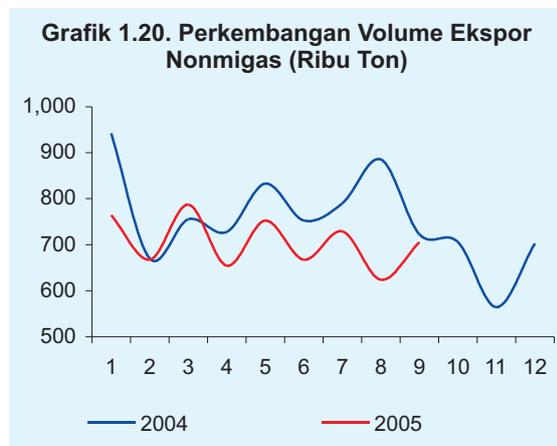
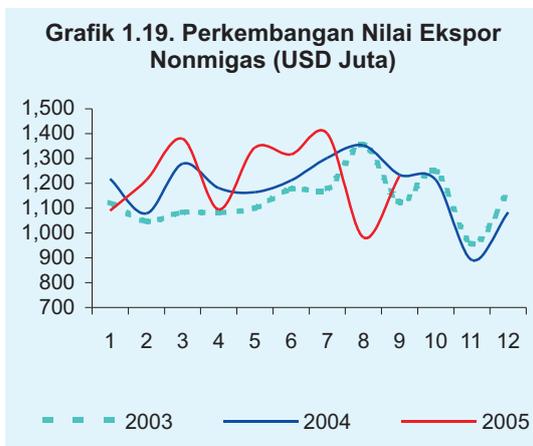
<sup>11</sup> Data Disperindag Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa investasi oleh industri besar, kecil dan menengah dari tahun 2004 sampai dengan triwulan III-2005 mengalami peningkatan signifikan, yakni 804%, dari Rp60,12 triliun menjadi Rp158,90 triliun.

sektor bangunan pada triwulan III-2005 yang didukung pula oleh adanya peningkatan jumlah tenaga kerja. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah saat ini telah melakukan kerjasama dengan pemerintah China guna melanjutkan pelaksanaan proyek pembangunan waduk Jatigede yang sempat terhenti selama beberapa tahun.

#### 4.3. EKSPOR DAN IMPOR

Berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor/impor barang<sup>12</sup>, pada triwulan III-2005 nilai ekspor nonmigas Jawa Barat mengalami penurunan 3,8% dari USD3,75 miliar menjadi USD3,61 miliar. Sementara itu, volume ekspor nonmigas menurun 0,71%. Penurunan nilai ekspor terjadi pada hampir semua kelompok komoditas. Namun demikian, sebagian kecil komoditas justru mengalami peningkatan nilai ekspor, antara lain pakaian jadi, buah-buahan dan sayur-sayuran serta produk hasil susu dan telur.

Produk TPT yang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan mengalami

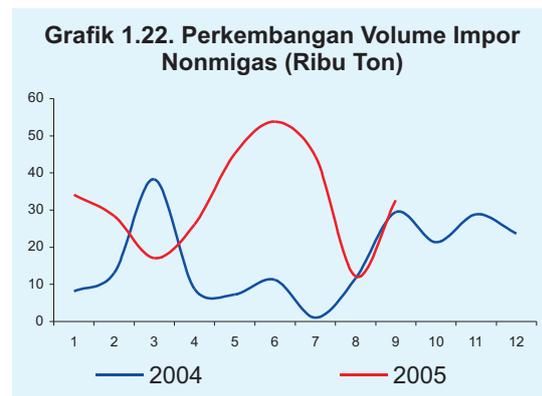
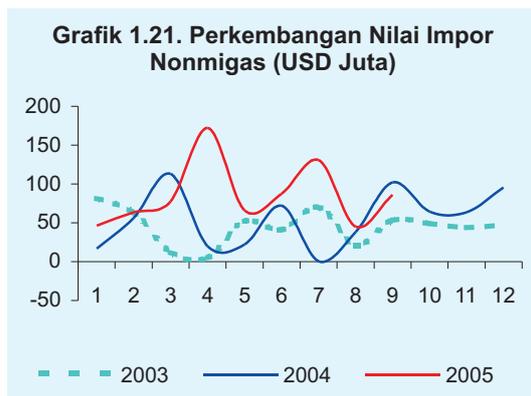


peningkatan ekspor. Nilai ekspor produk TPT meningkat 4,86% dari USD964 juta menjadi USD1,01 miliar didorong oleh peningkatan ekspor pakaian jadi yang meningkat 17,48% (qtq). Namun, nilai ekspor produk mesin dan elektronika menurun 9,17%, dari USD1,28 miliar menjadi USD1,22 miliar, disebabkan oleh penurunan nilai ekspor alat telekomunikasi.

<sup>12</sup>Sumber data: Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, dari Dokumen Pemberitahuan Ekspor/Impor Barang.

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Secara bulanan, sampai dengan triwulan III-2005, nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan nilai ekspor mencapai USD1,4 miliar, lebih tinggi daripada rata-rata nilai ekspor bulanan tahun 2004, yang sebesar USD1,18 miliar.



Nilai impor nonmigas Jawa Barat pada triwulan III-2005 diperkirakan turun 19,44% dari USD325 juta menjadi USD262 juta, sementara volume impor turun 64,57%. Penurunan impor terjadi pada hampir semua kelompok komoditas. Namun, beberapa komoditas mengalami kenaikan signifikan, bahkan ada yang mencapai lebih dari 100%, antara lain kayu & gabus, bijih logam, kimia organis dan bahan kimia lainnya.

Sementara itu, nilai impor produk utama, yaitu barang-barang modal<sup>13</sup> (dengan pangsa 78,58% dari total impor nonmigas) mengalami penurunan 14,56% (qtq), sementara volume impornya turun 40%, disebabkan oleh penurunan impor mesin-mesin. Namun, nilai impor produk dengan pangsa terbesar, yaitu kendaraan bermotor untuk jalan raya (58,36% dari total impor nonmigas atau 74,27% dari nilai impor barang modal) mengalami peningkatan meskipun relatif kecil. Impor kendaraan bermotor untuk jalan raya meningkat 0,68% (qtq) dari USD151,83 juta menjadi USD152,86 juta.

Selama triwulan III-2005, nilai tukar mengalami tekanan dengan volatilitas yang meningkat. Rata-rata nilai tukar pada bulan Juli, Agustus dan September masing-masing

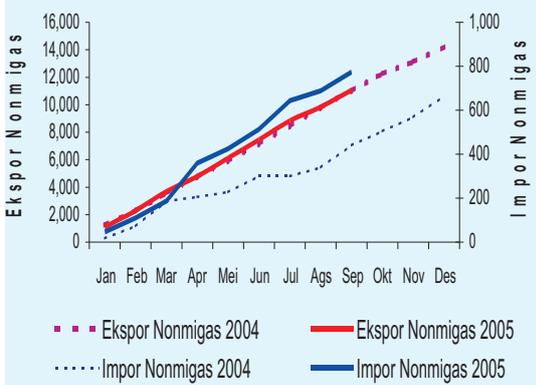
<sup>13</sup>Terdiri dari komoditas dengan kode klasifikasi 71 (mesin pembangkit tenaga), 72 (mesin industri tertentu), 73 (mesin untuk mengerjakan logam), 74 (mesin industri dan perlengkapannya), 77 (mesin listrik dan alat-alatnya),

sebesar Rp9.799/USD, Rp9.986/USD dan Rp10.233/USD, sementara pada bulan Juni rata-rata nilai tukar sebesar Rp9.616/USD. Pelemahan nilai tukar rupiah ini disebabkan oleh permasalahan domestik (defisit neraca pembayaran dan tingginya permintaan valas) dan permasalahan eksternal terkait dengan kenaikan harga<sup>14</sup> minyak dunia dan suku bunga AS.

**Grafik 1.23. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD**



**Grafik 1.24. Perkembangan Nilai Kumulatif Ekspor dan Impor Nonmigas (USD Juta)**



Bagi perekonomian Jawa Barat, pelemahan nilai tukar rupiah memberikan pengaruh terhadap perkembangan impor barang modal pada triwulan ini. Nilai impor barang-barang modal mengalami penurunan sekitar 15% (qtq), sementara volume impor barang modal juga turun hingga 40% (qtq). Penurunan impor barang modal ini dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan produksi di masa yang akan datang mengingat sebagian besar impor

tersebut berupa mesin.

Sementara itu, perkembangan ekspor impor secara kumulatif sampai dengan bulan September 2005, menunjukkan bahwa nilai ekspor dan impor nonmigas meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 1.24). Nilai ekspor nonmigas meningkat relatif kecil, yakni 0,24% (yoy) didorong oleh peningkatan produk utama, yaitu tekstil dan kendaraan

<sup>14</sup> Bank Indonesia telah berupaya meredam gejolak nilai tukar dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. antara lain dengan menaikkan BI rate menjadi 10,00 pada akhir September 2005. (pada awal Juli 2005, BI rate sebesar 8,50)

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

bermotor untuk jalan raya, yang masing-masing tumbuh 8% (yoy) dan 60,66% (yoy). Nilai impor nonmigas meningkat relatif besar, mencapai 75,79% (yoy) didorong oleh peningkatan impor barang modal yang tumbuh 67,11% (yoy).

### 5. KETENAGAKERJAAN

Sampai saat ini, jumlah tenaga<sup>15</sup> kerja yang terserap di Jawa Barat diperkirakan mencapai 14,7 juta orang, meningkat relatif kecil dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap pada tahun 2004, sebesar 14,6 juta orang. Namun demikian, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah pengangguran. Sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun perekonomian Jawa Barat mengalami pertumbuhan positif, peningkatan penyerapan tenaga kerja biasanya masih lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat pengangguran di Jawa Barat hingga saat ini diperkirakan masih berada dalam kisaran 12%, sebagian besar diantaranya terdapat di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh daya serap sebagian besar sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Perubahan relatif signifikan terjadi pada sektor bangunan/konstruksi yang penyerapan tenaga kerjanya diperkirakan meningkat hingga mencapai 4%. Namun, kontribusi penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut terhadap total penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor ekonomi masih relatif kecil, sehingga peningkatan penyerapan yang terjadi di sektor bangunan/konstruksi tidak memberikan pengaruh berarti terhadap penurunan tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil SKDU triwulan III-2005, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat pada triwulan ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada triwulan sebelumnya. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja, antara lain sektor bangunan/konstruksi, sektor keuangan dan jasa-jasa. Sebagaimana yang terjadi pada

---

<sup>15</sup>Data Disperindag Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tahun 2004, sampai dengan triwulan III-2005 peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di industri besar, kecil dan menengah relatif kecil,

triwulan sebelumnya, sektor bangunan/konstruksi masih merupakan sektor yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbesar. Selain sektor bangunan, beberapa subsektor juga mengalami peningkatan tenaga kerja relatif besar, yaitu industri alat angkutan, perbankan, perkebunan serta jasa sosial dan kemasyarakatan.

Pada triwulan mendatang, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mengalami sedikit penurunan. Daya serap tenaga kerja di beberapa industri pada sektor industri pengolahan diperkirakan mengalami penurunan, antara lain di industri TPT, industri kertas dan barang cetakan, serta industri barang kayu. Daya serap tenaga kerja di sektor bangunan/konstruksi, yang pada triwulan-triwulan sebelumnya mengalami peningkatan, pada triwulan mendatang diperkirakan masih terus berlanjut. Peningkatan daya serap tenaga kerja diperkirakan juga terjadi pada subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor tabama yang dipengaruhi oleh faktor musiman (masa panen). Sementara daya serap tenaga di sektor listrik, gas dan air bersih, diperkirakan relatif stabil.

### 6. KEUANGAN DAERAH

Sampai dengan semester I-2005, pembiayaan pengeluaran pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar Rp1,31 triliun dapat dipenuhi dari PAD yang mencapai Rp1,78 triliun. Dengan pemasukan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah, dana perimbangan yang sebesar Rp0,5 triliun tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

16

Secara triwulanan, keuangan pemerintah berdasarkan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada triwulan ini menunjukkan adanya penurunan pada pendapatan dan belanja. Pendapatan pemerintah provinsi Jawa Barat menurun 3,2% (qtq), dimana pada triwulan sebelumnya, pendapatan pemerintah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Penurunan pendapatan disebabkan oleh rendahnya pemasukan PAD selama triwulan III-2005, yang berasal dari komponen hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

---

<sup>16</sup>Angka perkiraan, data sampai dengan bulan Agustus 2005

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Tabel 1.3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp Miliar)

Uraian	2004					2005		
	T. 1	T. 2	T. 3	T. 4	Total	T. 1	T. 2	T. 3
<b>Pendapatan</b>	1,014	817	1,084	1,129	4,044	977	1,319	1,277
Pendapatan Asli Daerah	866	455	801	725	2,847	777	1,011	976
Dana Perimbangan	148	362	283	405	1,198	200	308	302
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belanja</b>	585	704	964	1,418	3,671	318	1,005	837
Belanja Aparatur	195	201	270	363	1,029	179	287	311
Belanja Publik	64	391	135	409	1,000	45	153	239
Belanja bagi hasil & bantuan keuangan	315	95	526	635	1,571	94	564	268
Belanja tidak terduga	10	17	33	11	71	0	1	19
<b>Surplus/Defisit</b>	429	114	120	-289	374	659	314	440
<b>Pembiayaan</b>	499	-10	92	-956	-374	-100	-5	0
Penerimaan pembiayaan	594	0	53	21	668	0	0	0
Pengeluaran pembiayaan	95	10	-39	977	1,042	100	5	0

Sumber: Bappeda Prov. Jabar

kekayaan daerah yang hanya mencapai Rp84 miliar. Pajak daerah pada triwulan ini mengalami peningkatan sebesar Rp44,88 miliar dan merupakan penyumbang terbesar PAD hingga mencapai 97%.

Sementara itu, belanja pemerintah mengalami penurunan 16%. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, yang hanya mencapai Rp296,6 miliar. Pada tahun 2004, pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan mencapai 43% dari total belanja yang sebagian besar dibelanjakan pada triwulan III dan triwulan IV, namun tahun 2005 ini belanja pada triwulan III lebih sedikit daripada triwulan sebelumnya. Sebaliknya, belanja aparatur dan belanja publik justru meningkat masing-masing sebesar Rp24 miliar dan Rp86 miliar.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah provinsi seyogyanya mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Namun, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki, upaya untuk meningkatkan pelayanan tersebut masih menghadapi kendala. Pada triwulan ini, pengeluaran pemerintah provinsi untuk publik relatif kecil, yakni baru mencapai Rp0,2 triliun.

Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan belanja publik tersebut, pemerintah berupaya mendapatkan sumber-sumber pembiayaan baru, antara lain dari bagi hasil laba BUMN dan penerimaan pajak (lihat Boks 4. Potensi Peningkatan Sumber Pembiayaan Daerah: Bagi Hasil Laba BUMN dan Tax Sharing). Dengan adanya bagi hasil

**BOKS 4. POTENSI PENINGKATAN SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH:  
BAGI HASIL LABA BUMN DAN TAX SHARING**

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pendanaan guna membiayai berbagai kegiatan pembangunan daerah, yang antara lain ditujukan untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah provinsi Jawa Barat terus berupaya menggali potensi-potensi sumber pembiayaan baru. Salah satu diantaranya adalah bagi hasil dari laba badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di daerah.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, pada tanggal 27 September, Gubernur Jawa Barat bersama dengan delapan gubernur lainnya yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Banten) menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk membagi hasil laba BUMN kepada daerah hingga 20%. Permohonan bagi hasil ini didasari oleh dampak kerusakan infrastruktur lingkungan dan sosial di sekitar lokasi BUMN, yang pemulihannya tidak dapat dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagi provinsi Jawa Barat, bagi hasil tersebut sangat berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, mengingat banyaknya BUMN yang berlokasi di Jawa Barat, antara lain PT Telkom, PT INTI, PT Dirgantara Indonesia, PT Pos Indonesia, PT PINDAD, Pupuk Kujang, Semen Cibinong dan Pertamina.

Berkaitan dengan perpajakan, para gubernur juga memandang perlu adanya pembagian penerimaan pajak (tax sharing) dari pajak badan usaha pemerintah maupun swasta kepada daerah secara proporsional. Selama ini, pemerintah daerah belum mendapatkan bagian penerimaan pajak badan usaha tersebut. Usulan pembagian penerimaan pajak ini didasari oleh peran daerah yang turut memberikan kontribusi bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan insentif lainnya.

Apabila bagi hasil keuntungan BUMN dan tax sharing dapat direalisasikan, akan terdapat tambahan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian, kontribusi pemerintah terhadap pembentukan PDRB akan semakin besar melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan

*Halaman ini sengaja dikosongkan*  
*This page is intentionally blank*

## BAB 2

# PERKEMBANGAN INFLASI

### 1. KONDISI UMUM

Selama tahun 2005, salah satu tantangan berat dalam perekonomian Jawa Barat adalah tingginya laju inflasi, yang mencapai puncaknya pada triwulan IV-2005. Pergerakan harga secara umum di Jawa Barat yang digambarkan oleh perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) di tujuh kota (Kota Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Banjar) menunjukkan bahwa secara triwulanan, laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 meningkat sangat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,86% (qtq) menjadi 10,97% (qtq), lebih tinggi daripada inflasi nasional (10,09%).

Faktor determinan inflasi di Jawa Barat pada triwulan ini dari sisi penawaran adalah kenaikan harga BBM pada awal Oktober 2005<sup>4</sup>, sementara dari sisi permintaan adalah meningkatnya konsumsi masyarakat sehubungan faktor musiman yaitu masa hari raya Idul Fitri, Natal, dan tahun baru. Inflasi didominasi oleh pergerakan inflasi administered prices, yang mencapai 25,87% (qtq), dengan andil 5,64% (qtq) terhadap inflasi di Jawa Barat pada triwulan ini.

Kelompok barang dan jasa yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, yakni sebesar 27,10% (qtq); kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 11,87% (qtq); kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 9,67% (qtq); serta kelompok bahan makanan sebesar 7,91% (qtq). Di antara tujuh kota, Kota Bandung mengalami inflasi tertinggi, yaitu 12,56% (qtq).

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2005, inflasi tahunan gabungan tujuh kota di Jawa Barat mencapai 18,51% (yoy), lebih tinggi daripada inflasi nasional (17,12%) (lihat Boks 2. Perkembangan Inflasi di Jawa Barat Tahun 2005). Penyebab utama

---

<sup>4</sup> Pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM rata-rata 126%.

## PERKEMBANGAN INFLASI

inflasi selama periode tersebut adalah kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005. Kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan kelompok dengan inflasi tertinggi selama periode tersebut, yakni mencapai 47,40% (yoy). Dibandingkan enam kota lainnya di Jawa Barat, selama tahun 2005 inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Banjar, yaitu sebesar 22,04% (yoy).

### 2. PERKEMBANGAN INFLASI DI JAWA BARAT

Perkembangan laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat selama triwulan IV-2005 merupakan yang tertinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya (Grafik 2.1).

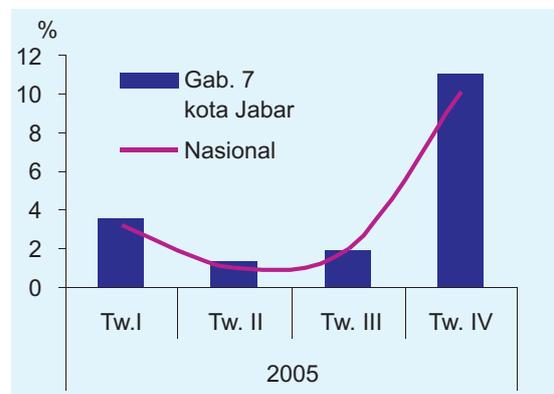
Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2005, yang mencapai 8,21% (mtm). Tingginya inflasi disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada awal bulan. Kenaikan harga solar dan premium berdampak langsung (first round effect) terhadap inflasi kelompok transpor,

komunikasi, dan jasa keuangan, sehingga mencapai 26,68% (mtm), khususnya inflasi subkelompok transpor (36,65%). Selain itu, kenaikan harga minyak tanah juga secara langsung mendorong inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 8,13% (mtm). Selanjutnya, kenaikan BBM (second round effect) berdampak pula terhadap kenaikan harga bahan makanan karena naiknya biaya distribusi (tarif angkutan). Inflasi kelompok bahan makanan pada bulan tersebut mencapai 7,13% (mtm).

Efek kenaikan harga BBM masih berlanjut pada inflasi bulan November 2005. Meskipun laju inflasi pada bulan November relatif rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 1,86% (mtm), inflasi kelompok makanan jadi mencapai 8,28% (mtm). Kenaikan harga makanan jadi disebabkan oleh naiknya harga bahan baku (bahan makanan) dan harga bahan bakar yang sudah terjadi sejak sebulan sebelumnya.

Semula diperkirakan bahwa pada bulan Desember 2005 akan terjadi deflasi di Jawa Barat seiring meredanya dampak kenaikan harga BBM, namun ternyata inflasi masih terjadi

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

pada bulan tersebut, yaitu sebesar 0,29% (mtm), terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan jadi. Harga kelompok makanan jadi pada bulan tersebut sebelumnya diperkirakan tidak mengalami kenaikan, karena laju inflasi kelompok ini sudah sangat tinggi pada dua bulan sebelumnya (Oktober dan November masing-masing 2,24% dan 8,28%) dan harga kelompok barang terkait (bahan makanan) bahkan mengalami deflasi 0,96% (mtm).

BOKS 2. PERKEMBANGAN INFLASI DI JAWA BARAT TAHUN 2005

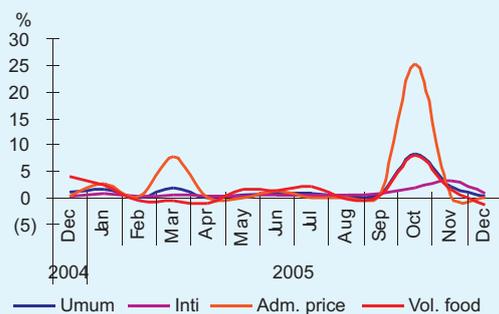
Selama tahun 2005, inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat mencapai 18,51% (yoy). Penyumbang inflasi terbesar sepanjang tahun 2005 adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, dengan andil 6,28%. Tiga kelompok lainnya yang memberikan andil di atas 3% adalah kelompok makanan jadi (3,86%), kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (3,81%), dan kelompok bahan makanan (3,33%).

Kenaikan harga pada komoditas administered prices cukup dominan mewarnai perkembangan inflasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2005, khususnya sehubungan dengan kenaikan harga BBM. Inflasi administered prices mencapai 42,51% (yoy), dengan andil 8,74% (yoy) terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat selama tahun 2005. Hal ini berarti 47,23% inflasi di Jawa Barat selama tahun 2005 dibentuk oleh inflasi administered prices (grafik 2.2 dan 2.3).

Kenaikan harga BBM yang signifikan sepanjang tahun 2005 telah menyebabkan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan yang tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2005 hingga 47,40% (yoy). Sementara itu, kenaikan harga elpiji pada awal tahun dan kenaikan harga minyak tanah pada Oktober 2005 telah mendorong inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar hingga 14,48% (yoy).

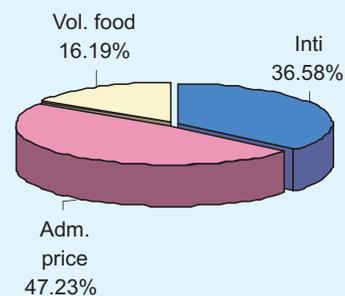
Kenaikan harga BBM juga telah mendorong kenaikan harga kelompok barang dan jasa lainnya,

Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi Bulanan di Jawa Barat Tahun 2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.3. Disagregasi Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Tahun 2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

terutama makanan jadi dan bahan makanan. Laju inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mencapai 18,61% (yoy) terutama sebagai akibat kenaikan subkelompok makanan jadi (22,46%). Kenaikan harga makanan jadi disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, baik harga bahan makanan maupun harga bahan bakar (minyak tanah, elpiji). Tingginya nilai konsumsi makanan jadi di Jawa Barat

## PERKEMBANGAN INFLASI

menyebabkan andil inflasi kelompok ini terhadap inflasi Jawa Barat cukup tinggi (3,86%).

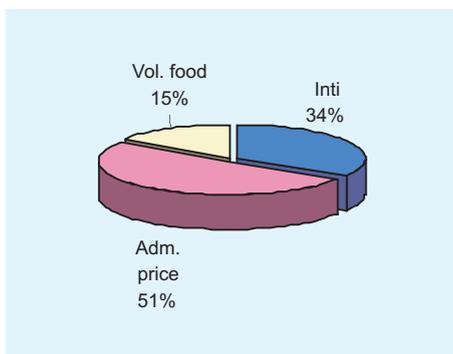
Laju inflasi volatile food pada tahun 2005 lebih lambat dibandingkan inflasi administered prices, yakni 15,15% (yoy) dengan andil 3,00% (yoy). Inflasi volatile food membentuk 16,19% dari inflasi di Jawa Barat pada tahun 2005. Inflasi bahan makanan pada tahun ini yang mencapai 14,37% (yoy), antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya distribusi akibat kenaikan harga BBM, selain faktor musiman seperti pada masa hari raya.

Sementara itu, inflasi inti mencapai 11,35% (yoy). Meskipun laju inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi volatile food, andil inflasi inti terhadap inflasi Jawa Barat pada tahun 2005 lebih tinggi, yakni mencapai 6,77%. Relatif tingginya inflasi inti tersebut terkait dengan cukup tingginya level inflasi yang diekspektasikan masyarakat sehubungan dengan rencana-rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara signifikan sepanjang tahun 2005.

## DISAGREGASI INFLASI: INFLASI INTI, INFLASI VOLATILE FOOD, INFLASI ADMINISTERED PRICE

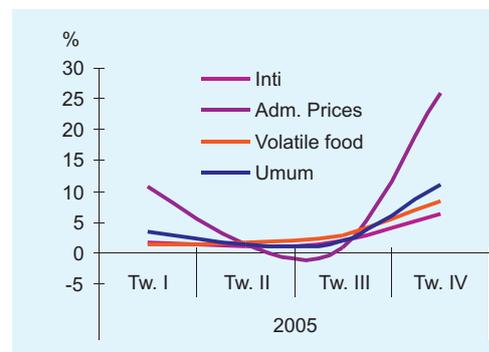
Perkembangan inflasi di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 didominasi oleh pergerakan inflasi administered prices, yang mencapai 25,87% (qtq) (Grafik 2.4). Andil inflasi administered prices mencapai 5,64% (qtq) terhadap inflasi di Jawa Barat pada triwulan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa 51,40% inflasi di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 dibentuk oleh inflasi administered prices (Grafik 2.5). Barang dan jasa di dalam kelompok administered prices yang memberikan andil inflasi cukup tinggi adalah tarif angkutan dalam

Grafik 2.4. Disagregasi Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Triwulan IV-2005



Keterangan: nama inflasi disingkat, Adm. Price=administered prices; Vol.food=volatile food.  
Sumber: hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.5. Pergerakan Inflasi Inti, Administered Price, dan Volatile Food Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Triwulanan (qtq) Tahun 2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

kota dan antarkota serta harga BBM (minyak tanah, premium, solar).

Inflasi volatile food mencapai 8,37% (qtq), dengan andil 1,65% (qtq) terhadap inflasi Jawa Barat (Grafik 2.5). Inflasi volatile food yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya distribusi (tarif angkutan) bahan makanan dari sentra produksi ke pasar-pasar karena kenaikan harga BBM, dan juga karena peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan makanan menjelang hari raya Idul Fitri. Bahan makanan yang tergolong volatile food dan memberikan andil inflasi cukup tinggi antara lain beras, daging sapi, cabe merah, daging ayam ras, dan tomat sayur.

Sementara itu laju inflasi inti<sup>5</sup> mencapai 6,29% (qtq) dengan andil 3,68% (qtq) terhadap inflasi Jawa Barat. Dengan demikian, 33,57% dari total inflasi di Jawa Barat berasal dari inflasi inti. Penyebab laju inflasi inti yang relatif tinggi adalah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap harga sehubungan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat memperkirakan bahwa harga barang dan jasa lainnya pun akan meningkat. Barang yang termasuk ke dalam kelompok inflasi inti dan memberikan andil inflasi cukup tinggi adalah makanan jadi.

Perkembangan inflasi di Jawa Barat pada triwulan IV-2005, sejalan dengan ekspektasi masyarakat, baik konsumen dan pelaku usaha, terhadap perkembangan harga seperti ditunjukkan oleh Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), yang akan diuraikan di bawah ini.

### SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA

Hasil SKDU triwulan IV-2005 mengindikasikan bahwa harga jual/tarif selama triwulan IV-2005 secara umum mengalami peningkatan (Grafik 2.6). Hal tersebut tercermin dari peningkatan indeks saldo bersih tertimbang (SBT)<sup>6</sup> dari 28,95 pada triwulan III-2005 menjadi

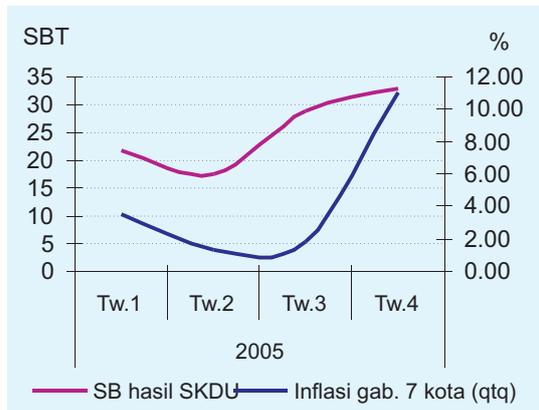
---

<sup>5</sup> Inflasi inti dihitung dengan mengeluarkan komoditas administered (harganya ditetapkan oleh pemerintah) dan volatile foods (komoditas bahan makanan yang pergerakan harganya berfluktuasi cukup tinggi) dari inflasi IHK (lihat buku PEKDA Prov. Jabar Tw III-2005).

<sup>6</sup> SBT adalah hasil perkalian saldo bersih (SB) sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya. Saldo bersih (net balance) adalah selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama". SBT positif menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa harga jual meningkat.

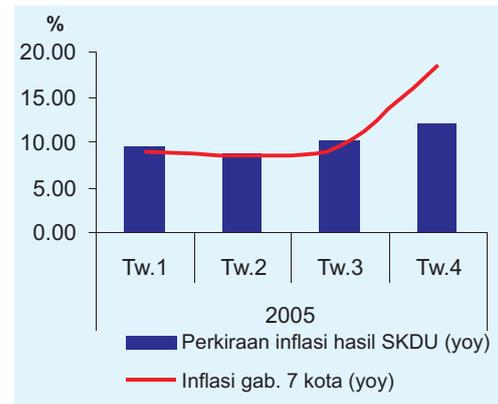
## PERKEMBANGAN INFLASI

Grafik 2.6. Perkembangan Harga Berdasarkan Hasil SKDU dan Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat



Sumber: SKDU-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.7. Perkembangan Ekspektasi Pelaku Usaha terhadap Inflasi Tahun 2005 dan Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat



Sumber: SKDU-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

32,75 pada triwulan IV-2005.

Dari sembilan sektor ekonomi yang disurvei, pelaku usaha di semua sektor menyatakan bahwa selama triwulan IV-2005 terjadi kenaikan harga jual. Penyumbang terbesar kenaikan harga berasal dari sektor pertanian, sektor pertambangan, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kenaikan harga jual terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku.

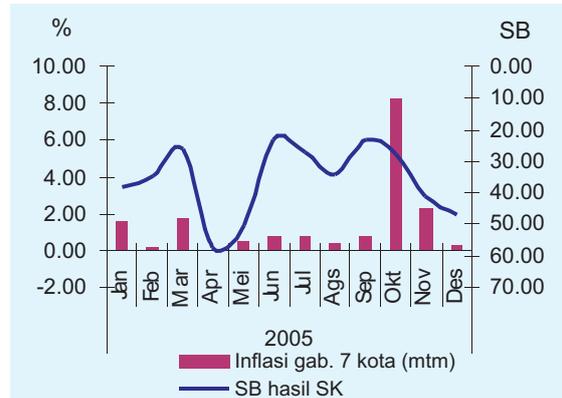
Selain itu, hasil SKDU juga menunjukkan bahwa angka perkiraan inflasi 2005 oleh para responden (pengusaha) lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan inflasi pada survei triwulan sebelumnya, yakni dari 10,25% pada triwulan III-2005 menjadi 11,98% pada triwulan IV-2005 (Grafik 2.7). Ekspektasi para pelaku usaha terhadap inflasi tahun 2005 tersebut

searah dengan nilai inflasi aktual (yoy) gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005, yang meningkat signifikan dibandingkan inflasi pada triwulan III-2005.

**SURVEI KONSUMEN**

Hasil SK triwulan III-2005 menunjukkan bahwa jumlah responden, yang memperkirakan bahwa pada triwulan IV-2005 akan terjadi kenaikan harga, mengalami peningkatan (Grafik 2.8). Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih<sup>7</sup> (SB) yang masih di bawah 100, yaitu dengan SB rata-rata setiap bulannya 38,44. Nilai SB terendah terjadi untuk perkiraan harga pada bulan Oktober 2005 dan selanjutnya meningkat untuk bulan November dan Desember 2005.

Grafik 2.8. Perkembangan Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga

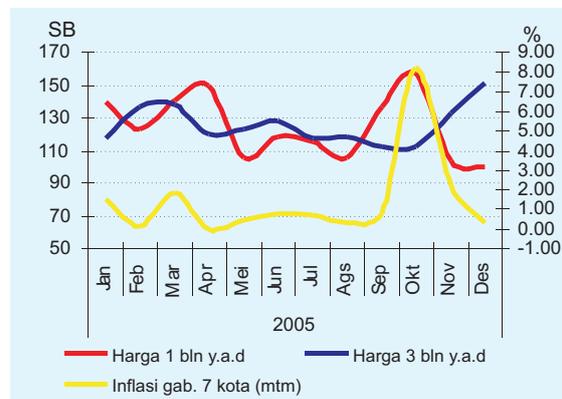


Sumber: Survei Konsumen-KBI Bandung, diolah.

**SURVEI PENJUALAN ECERAN**

Hasil SPE menunjukkan bahwa para pedagang eceran memperkirakan selama

Grafik 2.9. Perkembangan Ekspektasi Penjual Eceran Terhadap Harga dan Perkembangan Inflasi Bulanan Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat



Sumber: SPE-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

<sup>7</sup> Indeks SB= % jumlah responden yang memperkirakan harga akan turun -% jumlah responden yang memperkirakan harga akan naik + 100. Nilai SB sama dengan 100 menunjukkan ekspektasi harga tetap. Nilai SB kurang dari 100 mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa harga dan jasa secara umum akan meningkat. Sebaliknya, SB di atas 100 berarti bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa akan terjadi penurunan harga. Penurunan angka SB menunjukkan bahwa semakin banyak responden yang memperkirakan bahwa harga barang dan jasa secara umum akan naik.

## PERKEMBANGAN INFLASI

triwulan IV-2005 terjadi kenaikan harga dengan kecenderungan yang meningkat (Grafik 2.9).

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Bulanan			Triwulanan	Tahunan
		Okt '05	Nov '05	Des '05	(qtq)	(yoy)
1	Bahan makanan	7.13	1.70	-0.96	7.91	14.37
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2.24	8.28	1.04	11.87	18.61
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	8.13	0.59	0.83	9.67	14.48
4	Sandang	1.01	0.42	0.77	2.22	6.15
5	Kesehatan	1.43	0.59	0.56	2.61	8.73
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.96	0.27	0.16	1.39	7.71
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	26.68	0.29	0.05	27.10	47.40
	Umum	8.21	2.26	0.29	10.97	18.51

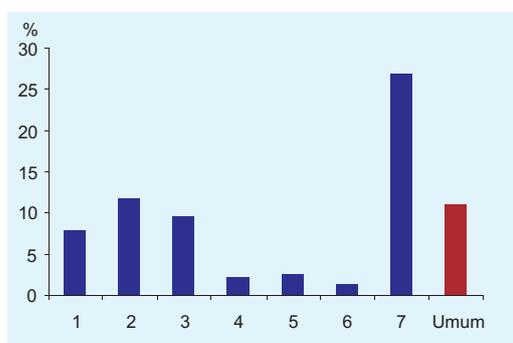
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Hal tersebut ditunjukkan oleh indeks SB yang lebih besar daripada 100 dan cenderung meningkat.

### 2.1. INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

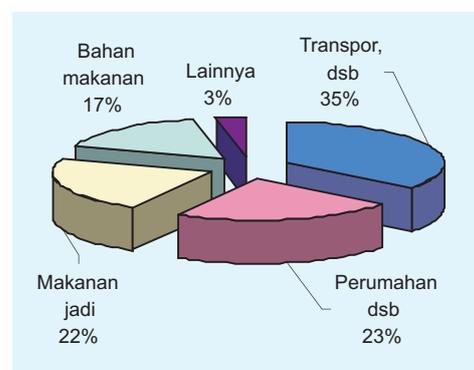
Selama triwulan IV-2005, inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat secara triwulanan mencapai 10,97% (qtq), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan III-2005 (1,86%). Inflasi terjadi pada semua kelompok barang dan jasa, dan yang tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 27,10% (qtq), diikuti oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mencapai 11,87% (Tabel 2.1

Grafik 2.10. Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 2.11. Pembentukan Inflasi di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005



Keterangan: nama kelompok disingkat.  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

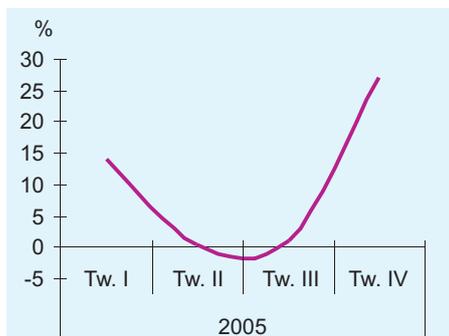
dan Grafik 2.10). Adapun inflasi kelompok perumahan, listrik, gas, dan bahan bakar mencapai 9,67%, sedangkan kelompok bahan makanan sebesar 7,91%. Inflasi kelompok barang dan jasa lainnya, yaitu kelompok sandang, kelompok kesehatan, serta kelompok perumahan, rekreasi, dan olahraga di bawah 3%.

Berdasarkan andilnya terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat selama triwulan IV-2005, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil terbesar. Dari inflasi Jawa Barat yang mencapai 10,97% (qtq), kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan memberi andil 3,90%. Hal ini berarti 35% laju inflasi Jawa Barat pada triwulan IV-2005 didominasi kelompok transpor, sedangkan 65% sisanya dibentuk oleh andil inflasi kelompok barang dan jasa lainnya (Grafik 2.11), yaitu antara lain kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil 2,49%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil 2,44%, serta kelompok bahan makanan dengan andil 1,82%.

Berdasarkan besarnya andil setiap kelompok barang dan jasa terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005, secara berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai berikut:

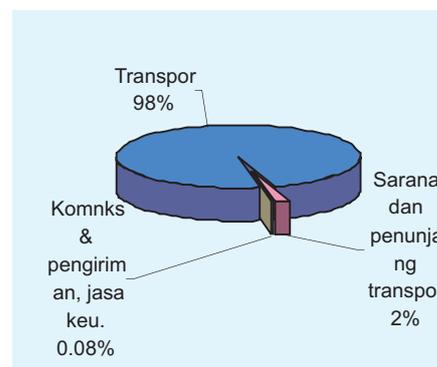
a. Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan

Grafik 2.12. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 2.13. Pembentukan Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

## PERKEMBANGAN INFLASI

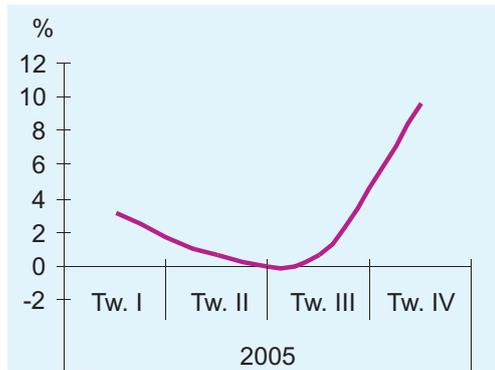
Inflasi triwulanan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mencapai 27,10% (qtq) dengan andil 3,9%. Inflasi kelompok tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,13% (Grafik 2.12) dan merupakan kelompok dengan inflasi tertinggi di tujuh kota di Jawa Barat. Di antara tujuh kota tersebut, inflasi kelompok transpor yang tertinggi terjadi di Kota Bogor, yaitu sebesar 33,38% (qtq).

Pendorong utama inflasi kelompok ini adalah subkelompok transpor yang mengalami inflasi 36,65% (qtq), dengan andil 3,82% (qtq). Dengan andil tersebut, artinya 98% inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan disebabkan oleh inflasi kelompok subkelompok transpor (Grafik 2.13).

Faktor penyebab tingginya inflasi subkelompok transpor adalah kenaikan harga premium (naik 87,5% dari Rp2.420,00/liter menjadi Rp4.500,00/liter) dan solar (naik 104,76% dari Rp2.120,00/liter menjadi Rp4.300,00/liter) mulai tanggal 1 Oktober 2005. Kenaikan bahan bakar kendaraan bermotor tersebut menyebabkan kenaikan tarif angkutan dalam kota dan tarif angkutan antarkota secara signifikan. Sebagian besar pengemudi angkutan menetapkan tarif baru pasca kenaikan harga BBM melebihi batas maksimal tarif yang diatur pemerintah, sehingga inflasi tarif angkutan dalam kota dan antarkota masing-masing mencapai 41,05% (qtq) dan 37,50% (qtq). Inflasi angkutan dalam kota yang tertinggi terjadi di Kota Bogor, yaitu sebesar 6,67% (qtq), sedangkan di enam kota lainnya berkisar antara 29,05% hingga 62,50%.

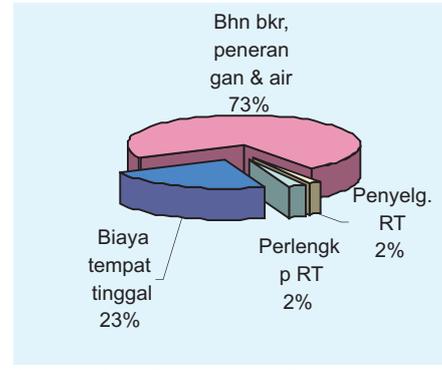
Di dalam kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan tersebut, subkelompok sarana penunjang transpor juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, yaitu sebesar 9,31% (qtq). Jasa yang termasuk sarana penunjang transpor ini adalah tarif parkir (inflasi 22,03% (qtq)) dan service pemeliharaan kendaraan bermotor (inflasi 12,52% (qtq)).

Grafik 2.14. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.15 Pembentukan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

b. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi 9,67% (qtq), dengan andil terhadap inflasi Jawa Barat sebesar 2,49%. Laju inflasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan inflasi triwulan III-2005 yang hanya sebesar 0,59% (Grafik 2.14). Inflasi kelompok perumahan yang tertinggi terjadi di Kota Banjar, yaitu sebesar 16,57% (qtq).

Subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air mendominasi inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (Grafik 2.15). Pendorong utama kenaikan inflasi subkelompok tersebut adalah kenaikan harga minyak tanah mulai tanggal 1 Oktober 2005 dari Rp700/liter menjadi Rp2.000,00/liter.

Kenaikan harga elpiji juga merupakan salah satu penyebab inflasi kelompok perumahan. Meski Pertamina tidak menaikkan harga elpiji selama triwulan IV-2005, pasca kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005, harga elpiji mengalami kenaikan akibat dibebankannya ongkos kirim oleh penjual elpiji kepada konsumen sebesar rata-rata Rp2.000/tabung. Di samping itu, akibat kenaikan harga minyak tanah, permintaan masyarakat terhadap gas elpiji meningkat, karena sebagian rumah tangga yang sebelumnya menggunakan minyak tanah, beralih menggunakan elpiji karena dinilai lebih murah. Isu kelangkaan elpiji juga sempat merebak di wilayah Jawa Barat. Pada minggu pertama Oktober 2005, sempat terjadi kelangkaan elpiji di beberapa daerah di Jawa Barat. Kelangkaan diakibatkan oleh kerusakan sumber gas di Pertamina Unit Pengolahan-IV Cilacap pada tanggal 4-6 Oktober 2005. Karena Pertamina Cilacap bertanggungjawab untuk memasok elpiji di Jateng dan Jatim, akibat kerusakan tersebut Pertamina Balongan

## PERKEMBANGAN INFLASI

(Indramayu) yang biasanya hanya memasok wilayah Jawa Barat, harus memasok Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, setelah kerusakan di Cilacap teratasi, persediaan elpiji kembali normal.

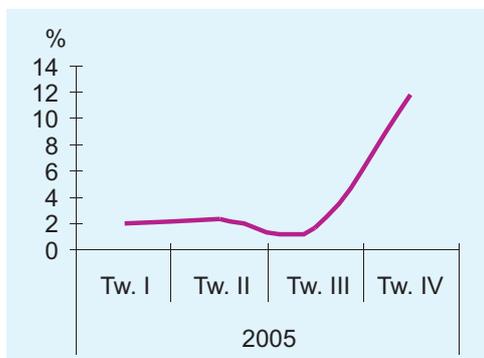
Faktor lain yang mendorong inflasi kelompok perumahan adalah inflasi biaya tempat tinggal (kenaikan upah tukang bangunan bukan mandor dan harga bahan bangunan) juga mendorong inflasi kelompok perumahan.

### c. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi 11,87% (qtq) dengan andil 2,44%. Laju inflasi kelompok tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 1,59% (Grafik 2.16). Inflasi kelompok makanan jadi di Kota Bandung merupakan yang tertinggi dibandingkan enam kota lainnya, yakni sebesar 15,91% (qtq).

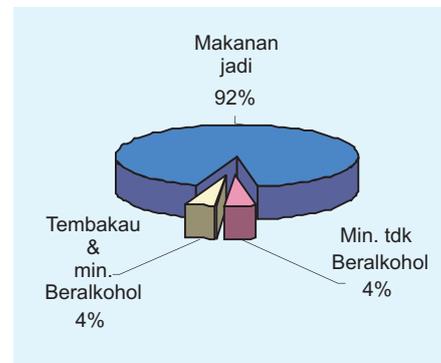
Seluruh komoditas pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau

Grafik 2.16. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

Grafik 2.17. Pembentukan Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

mengalami peningkatan harga, kecuali gula pasir yang mengalami deflasi 0,59% (qtq). Inflasi subkelompok makanan jadi mendominasi inflasi kelompok tersebut, dengan inflasi sebesar 16,91% dan andil inflasi sebesar 2,24%. Dengan kata lain, laju inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 92%-nya disebabkan oleh inflasi subkelompok makanan jadi (Grafik 2.17). Jenis makanan jadi yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah nasi rames, mie, kue kering, dan bubur.

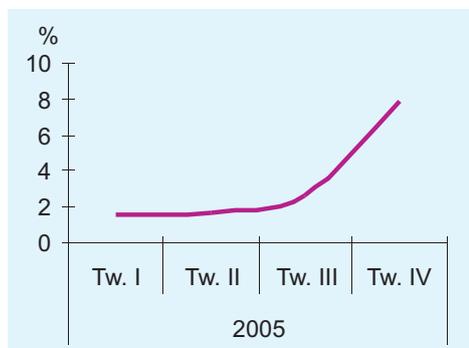
Inflasi subkelompok makanan jadi terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yaitu bahan makanan dan bahan bakar. Hal tersebut terlihat jelas dari laju inflasi

bulanan subkelompok tersebut selama periode Oktober dan November 2005. Sesaat setelah kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, inflasi kelompok bahan makanan mencapai 7,13% (mtm), merupakan kelompok dengan inflasi ketiga tertinggi (setelah inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar). Pada bulan yang sama, inflasi subkelompok makanan jadi jauh lebih rendah, yakni hanya 3,22% (mtm), dimana inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau pada saat itu sebesar 2,24% (mtm). Kenaikan harga makanan jadi pada bulan Oktober 2005 diperkirakan terutama karena faktor musiman, yaitu bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang telah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, sedangkan faktor kenaikan harga BBM belum terlalu berpengaruh karena produsen sudah menyiapkan bahan baku sebelum Ramadhan dalam rangkaantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat.

Barulah pada bulan November, inflasi subkelompok makanan jadi meningkat signifikan hingga 11,69% (mtm), sebagai akibat harga bahan baku (bahan makanan dan bahan bakar yang merupakan stok baru) yang telah meningkat sejak sebulan sebelumnya.

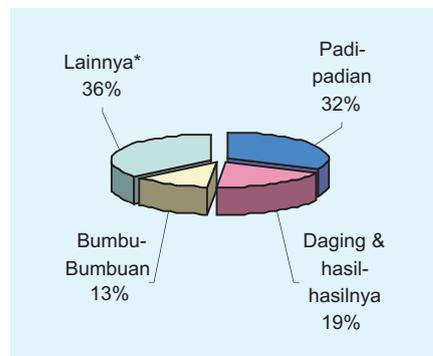
Fenomena kenaikan harga makanan jadi tersebut telah ditelaah oleh KBI Bandung melalui survei yang dilakukan kepada konsumen, produsen, dan pedagang makanan jadi dan bahan makanan di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat (lihat Boks.3. Kenaikan Harga Bahan Makanan dan Makanan Jadi di Kota dan Kabupaten Bandung, dan Boks.4. Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Industri Makanan Jadi di Jawa Barat).

Grafik 2.18. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Bahan Makanan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.19. Pembentukan Inflasi Kelompok Bahan Makanan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.  
\*Meliputi ikan segar; ikan diawetkan; telur, susu, & hasil-hasilnya; sayuran; kacang-kacangan; buah-buahan; lemak & minyak; lainnya.

### BOKS 3. KENAIKAN HARGA BAHAN MAKANAN DAN MAKANAN JADI DI KOTA DAN KABUPATEN BANDUNG

Pasca kenaikan harga BBM pada tanggal 1 Oktober 2005, kelompok barang dan jasa yang terkena dampak langsung (first round effect) dari kenaikan tersebut adalah kelompok transportasi, khususnya tarif angkutan. Setelah dampak putaran pertama tersebut, Bank Indonesia Bandung telah memperkirakan bahwa selanjutnya kelompok yang akan mengalami peningkatan harga secara signifikan adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi (second round effect), sebagai akibat kenaikan biaya transportasi.

Untuk mengantisipasi second round effect kenaikan harga BBM terhadap harga bahan makanan dan makanan jadi tersebut, maka Bank Indonesia Bandung bekerjasama dengan ISEI Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Kenaikan Harga dan Ekspektasi Harga pada Kelompok Bahan Makanan dan Makanan Jadi di Kota/Kabupaten Bandung."

Hasil survei menunjukkan bahwa selama bulan Oktober 2005 hingga pertengahan Desember 2005, terjadi kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi. Persentase kenaikan harga terbesar terjadi pada bulan Oktober, sementara pada bulan Desember persentase kenaikan relatif kecil. Alasan kenaikan harga tersebut adalah kenaikan biaya transportasi, kenaikan harga dari pemasok, serta meningkatnya permintaan karena musim liburan dan hari raya keagamaan.

Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa second round effect kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi memang terjadi, sesuai dengan hipotesa awal. Kenaikan harga BBM juga telah mempengaruhi ekspektasi para produsen dan pedagang yang memperkirakan bahwa kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi masih akan berlanjut hingga bulan Februari 2006. Ekspektasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, namun juga dipengaruhi oleh adanya isu kenaikan TDL dan elpiji. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kenaikan harga yang didorong oleh ekspektasi, diperlukan upaya dan kerjasama semua pihak, khususnya pemda Jawa Barat dan instansi terkait, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap distribusi, ketersediaan, dan harga bahan makanan dan makanan jadi di Jawa Barat.

#### d. Kelompok bahan makanan

Kelompok bahan makanan mengalami inflasi 7,91% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 2,66% (Grafik 2.18). Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 1,82% (qtq) terhadap inflasi Jawa Barat. Inflasi triwulanan kelompok bahan makanan tertinggi terjadi di Kota Sukabumi, yakni sebesar 11,20% (qtq).

Inflasi kelompok tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan (biaya distribusi) karena kenaikan harga BBM. Selain itu, meningkatnya permintaan menjelang hari raya Idul Fitri juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menaikkan harga.

Inflasi subkelompok padi-padian mendominasi inflasi kelompok bahan makanan, yaitu sebesar 10,97% (qtq) dengan andil 0,58% (Grafik 2.19). Beras yang termasuk ke dalam subkelompok ini mengalami inflasi 12,82% (qtq) dan memberikan andil inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,57% (qtq). Inflasi beras tertinggi terjadi di Kota Bekasi, yaitu sebesar 15,21% (qtq), sementara di kota-kota lainnya berkisar antara 10,74% sampai dengan 14,04%.

Subkelompok lainnya yang juga mengalami peningkatan harga yang cukup berarti adalah bumbu-bumbuan (11,90%); sayur-sayuran (11,26%); serta daging dan hasil-hasilnya (8,97%). Jenis bahan makanan yang mengalami inflasi tertinggi adalah cabe merah, cabe rawit, gula merah, bakso, daging sapi, dan daging ayam.

Pergerakan inflasi kelompok bahan makanan selama Oktober-Desember 2005 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada bulan Oktober, inflasi kelompok bahan makanan mencapai 7,13% (mtm) karena kenaikan biaya transportasi dan faktor musiman

#### BOKS 4. DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP INDUSTRI MAKANAN JADI DI JAWA BARAT

Kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 yang cukup signifikan tentunya berpengaruh terhadap industri yang menggunakan BBM sebagai sumber energi. Salah satu industri yang terkena dampak kenaikan tersebut adalah industri makanan jadi. Oleh karena itu KBI Bandung melakukan penelitian tentang hal tersebut. Industri makanan jadi dipilih sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa di tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat terhadap makanan jadi relatif tinggi. Oleh karena itu, perubahan harga pada komoditas tersebut akan besar dampaknya terhadap laju inflasi di Jawa Barat. Penelitian mengambil sampel di empat kota/kabupaten yang memiliki jumlah industri makanan jadi relatif besar, yaitu Kota/Kabupaten Cirebon, Kota/Kabupaten Sukabumi, Kota/Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut.

Industri makanan jadi di Jawa Barat didominasi oleh usaha berskala kecil (jumlah tenaga kerjanya kurang dari 10 orang), yaitu sebanyak 46%, sedangkan sisanya adalah perusahaan skala menengah dan skala besar. Hasil penelitian di wilayah tersebut menunjukkan hampir seluruh responden (90%) menyatakan bahwa terjadi kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi rata-rata sebesar 30%. Penyebab utama kenaikan biaya produksi adalah kenaikan harga bahan baku (seperti tepung/beras ketan, tepung terigu, tepung tapioka, telur, buah-buahan, kedelai, gula, minyak goreng), biaya distribusi (angkutan), dan kenaikan upah pegawai. Sementara itu kenaikan harga BBM secara langsung terhadap biaya produksi tidak terlalu besar, karena penggunaan BBM hanya sebesar 15% dari biaya produksi. Bahkan, beberapa pengusaha kecil menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi karena lebih murah dibandingkan BBM.

Kenaikan biaya produksi tersebut, memaksa para pengusaha untuk menaikkan harga jual. Namun, kenaikan harga hanya berkisar antara 10-15%, tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi. Pengusaha menyadari bahwa daya beli sebagian masyarakat mengalami penurunan, sehingga apabila

## PERKEMBANGAN INFLASI

harga dinaikkan terlalu besar, penjualan dikhawatirkan menurun drastis. Agar tetap dapat memperoleh margin keuntungan, pengusaha juga melakukan pengurangan kualitas ataupun pengurangan kuantitas/berat produk yang dijual/diproduksi.

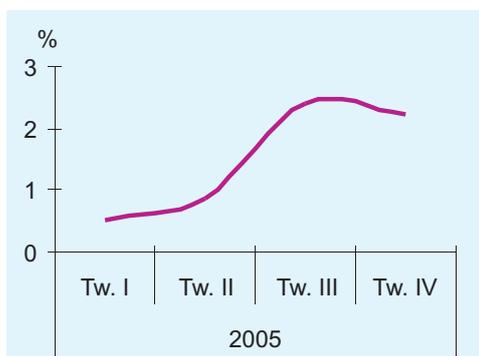
Penurunan daya beli masyarakat tercermin dari volume penjualan produk makanan jadi yang mengalami penurunan rata-rata 27% sejak kenaikan harga BBM. Masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (nasi dan lauk-pauknya), namun mengurangi konsumsi barang lainnya, antara lain makanan jadi (kue, roti, dll.)

(hari raya Idul Fitri). Selanjutnya pada bulan November, laju inflasi kelompok ini melambat hingga menjadi 1,70% (mtm), dan terus menurun hingga terjadi deflasi pada Desember 2005 sebesar 0,96% (mtm). Deflasi pada bulan Desember 2005 terjadi terutama pada bahan makanan yang mengalami kenaikan harga sangat tinggi pada bulan Ramadhan, seperti harga bumbu-bumbuan dan daging, seiring kembali normalnya permintaan masyarakat.

### e. Kelompok sandang

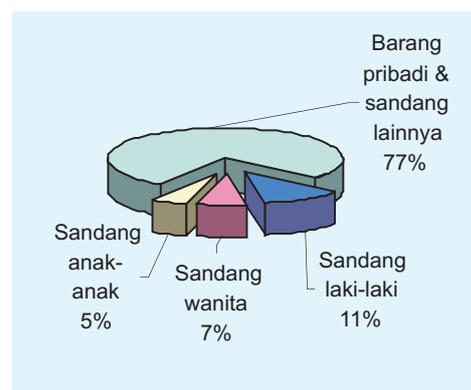
Inflasi gabungan tujuh kota untuk kelompok sandang pada triwulan IV-2005 mencapai 2,22% (qtq) dengan andil 0,12%, sedikit lebih rendah dibandingkan laju inflasi pada triwulan sebelumnya, yang sebesar 2,41% (Grafik 2.20). Inflasi kelompok sandang tertinggi terjadi di

Grafik 2.20. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Sandang



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.21 Pembentukan Inflasi Kelompok Sandang Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005

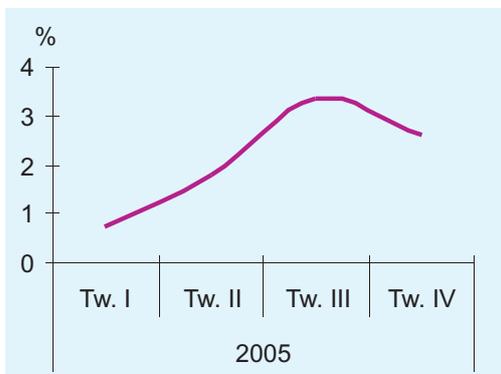


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Kota Banjar, yaitu sebesar 5,86% (qtq).

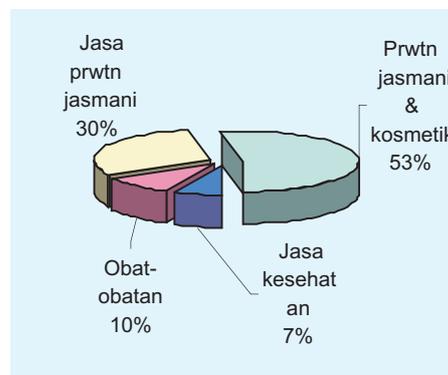
Inflasi subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya mendominasi inflasi kelompok sandang (Grafik 2.21). Pendorong inflasi kelompok sandang antara lain berasal dari kenaikan harga emas perhiasan (9,10%), kenaikan ongkos jahit, dan kenaikan harga pakaian. Inflasi emas perhiasan tertinggi terjadi di Kota Bekasi, yaitu sebesar 14,84% (qtq),

Grafik 2.22. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Kesehatan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.23. Pembentukan Inflasi Kelompok Kesehatan Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

sedangkan di kota-kota lain berkisar antara 2,83% hingga 8,56%.

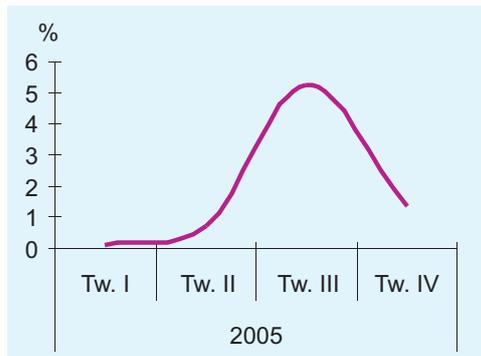
#### f. Kelompok kesehatan

Inflasi kelompok kesehatan mencapai 2,61% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,36% (Grafik 2.22). Andil kelompok ini terhadap inflasi relatif rendah, yaitu hanya 0,10%. Inflasi kelompok kesehatan yang tertinggi terjadi di Kota Bekasi (3,60%).

Inflasi kelompok kesehatan didominasi oleh inflasi subkelompok jasa perawatan jasmani (Grafik 2.23), khususnya karena kenaikan tarif jasa salon, obat-obatan, dan kosmetika. Penyebab kenaikan harga pada kelompok kesehatan adalah penyesuaian harga sehubungan kenaikan harga BBM.

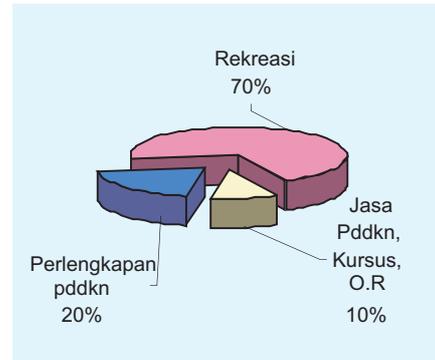
## PERKEMBANGAN INFLASI

Grafik 2.24. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.25. Pembentukan Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Menurut Subkelompok Triwulan IV-2005



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

### g. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

Inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan yang terendah dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Inflasi kelompok tersebut adalah sebesar 1,39% (qtq), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,24% (Grafik 2.24). Andil kelompok ini terhadap inflasi Jawa Barat sangat kecil, yaitu 0,097%.

Inflasi kelompok pendidikan di Jawa Barat yang tertinggi terjadi di Kota Bandung, yaitu mencapai 3,16% (qtq). Namun demikian, di Kota Banjar dan Bogor kelompok ini mengalami deflasi masing-masing -11,62% dan -2,30% (qtq).

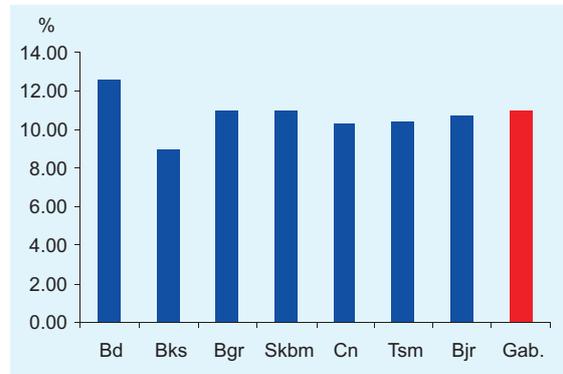
Pendorong utama kenaikan laju inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

<sup>8</sup> Kebijakan BOS terbit akibat kebijakan pemerintah untuk menaikkan (pengurangan subsidi) harga BBM pada Maret 2005, dengan maksud untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya kepada orang miskin. Bantuan operasional sekolah untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Jawa Barat untuk periode Juli-Desember 2005 disalurkan sekaligus dalam satu tahap pada tanggal 30 Agustus 2005. Total dana yang disalurkan sebesar Rp878,6 miliar untuk 6.674.300 siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan lembaga pendidikan lainnya yang sederajat di seluruh Jawa Barat. BOS antara lain bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi siswa miskin, membayar honorarium guru, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan.

## PERKEMBANGAN INFLASI

adalah inflasi subkelompok rekreasi (harga koran, tarif rekreasi, harga TV), perlengkapan pendidikan dan kenaikan tarif kursus (Grafik 2.25). Deflasi terjadi pada tarif SLTP dan SD sehubungan dengan penyaluran dana biaya operasional sekolah (BOS)<sup>8</sup> oleh pemerintah. Pada sekolah-sekolah penerima dana BOS, para siswa mendapat pembebasan beberapa komponen biaya sekolah (seperti iuran bulanan/SPP, uang ujian, dsb.), sehingga terjadi deflasi. Deflasi pada jasa pendidikan SD dan SLTP tersebut menjadi penyebab deflasinya kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga di Kota Banjar dan Bogor.

Grafik 2.26. Inflasi Triwulanan di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Gabungannya Triwulan IV-2005



Keterangan: Bd=Bandung, Bks=Bekasi, Bgr=Bogor, Skbm=Sukabumi, Tsm=Tasikmalaya, Bjr=Banjar.  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

### 2.2. INFLASI DI TUJUH KOTA

Pada triwulan IV-2005, laju inflasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tujuh kota di Jawa Barat dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga secara gabungan

Tabel 2.2. Inflasi Triwulanan Tujuh Kota di Jawa Barat dan Gabungannya Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2005

No.	Kelompok	Kota							
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	Gab.
1	Bahan makanan	8.75	6.41	7.16	11.20	9.17	7.51	10.44	7.91
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	15.91	10.91	7.96	8.35	3.71	5.84	8.83	11.87
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	9.49	8.23	10.33	12.17	15.03	13.75	16.57	9.67
4	Sandang	2.17	2.53	1.47	0.82	1.24	4.31	5.86	2.22
5	Kesehatan	2.28	3.60	2.12	2.26	0.98	1.14	2.02	2.61
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	3.16	1.19	-2.30	1.36	1.59	2.86	-11.62	1.39
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	29.52	20.20	33.38	26.38	26.45	31.64	22.53	27.10
	Umum	12.56	9.00	10.98	10.94	10.35	10.39	10.78	10.97

Keterangan: Bd=Bandung, Bks=Bekasi, Bgr=Bogor, Skbm=Sukabumi, Tsm=Tasikmalaya, Bjr=Banjar.  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

inflasi mencapai 10,97% (qtq). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung, yang mencapai 12,56% (qtq) (Grafik 2.26). Setelah itu inflasi di Kota Bogor merupakan yang kedua terbesar (10,98%), diikuti oleh Kota Banjar (10,78%).

## PERKEMBANGAN INFLASI

Di semua kota, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa, kecuali di Banjar dan Bogor yang mengalami deflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (Tabel 2.2). Kelompok barang dan jasa dengan laju inflasi tertinggi di semua kota adalah

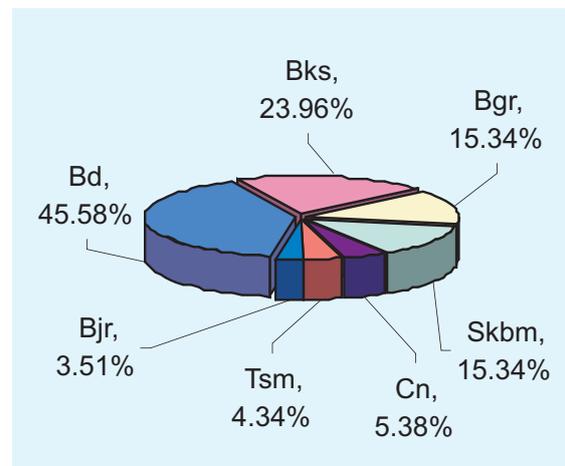
kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu berkisar antara 20,20% di Kota Bekasi hingga 33,38% di Kota Bogor.

Perkembangan inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat sangat dipengaruhi pergerakan harga di Kota Bandung, Bekasi dan Bogor karena nilai konsumsi di kota-kota tersebut lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Oleh karena itu, dalam perhitungan inflasi gabungan tujuh kota, bobot kota<sup>9</sup> terbesar secara berurutan, adalah bobot Kota Bandung (39,82%), Bekasi (29,23%), dan Kota Bogor (15,33%), diikuti oleh Kota Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, dan Banjar.

Pada triwulan ini kota yang memiliki andil<sup>10</sup> paling besar terhadap inflasi triwulanan gabungan tujuh kota di Jawa Barat adalah Bandung (5,00%), Bekasi (2,63%), dan Bogor (1,68%) (Grafik 2.27). Sementara itu, andil inflasi Tasikmalaya, Sukabumi, Cirebon dan Banjar masing-masing kurang dari 1%.

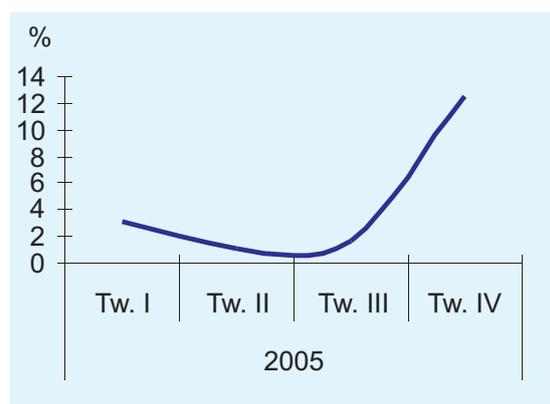
Berdasarkan besarnya andil inflasi setiap kota terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005,

Grafik 2.27. Pembentukan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Berdasarkan Andil Inflasi Per Kota Triwulan IV-2005



Keterangan: Bd=Bandung, Bks=Bekasi, Bgr=Bogor, Skbm=Sukabumi, Tsm=Tasikmalaya, Bjr=Banjar.  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.28. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Bandung



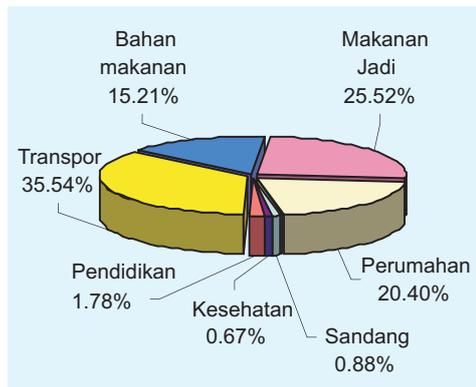
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

<sup>9</sup> Bobot kota dalam perhitungan inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat ditentukan berdasarkan nilai konsumsi masyarakat di masing-masing kota. Besarnya bobot merupakan hasil perhitungan BPS.

<sup>10</sup> Andil inflasi = bobot x laju inflasi

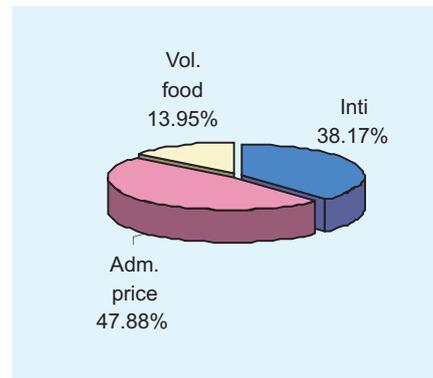
secara berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai berikut:

Grafik 2.29. Andil Inflasi di Kota Bandung Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Keterangan: nama kelompok disingkat  
 Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.30. Disagregasi Inflasi di Kota Bandung Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

a. Kota Bandung

Inflasi di Kota Bandung mencapai 12,56% (qtq) dengan andil 5,00%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yang sebesar 1,73% (qtq) (Grafik 2.28). Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Bandung adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 2.29), yaitu sebesar 5,04%, atau merupakan 35,54% dari total inflasi Kota Bandung. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok makanan jadi dan kelompok perumahan. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Bandung, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.30).

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (29,52%). Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga premium, solar, dan tarif angkutan baik dalam kota maupun antarkota. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau di Kota Bandung merupakan kelompok dengan inflasi kedua tertinggi, yakni sebesar 15,91% (qtq). Inflasi kelompok makanan jadi di Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan enam kota lainnya. Kenaikan harga yang paling menonjol pada kelompok ini adalah pada makanan jadi, khususnya nasi rames, mie, dan bubur. Penyebab kenaikan

## PERKEMBANGAN INFLASI

harga pada jenis makanan tersebut adalah kenaikan bahan baku (bahan makanan) dan kenaikan bahan bakar (minyak tanah dan elpiji).

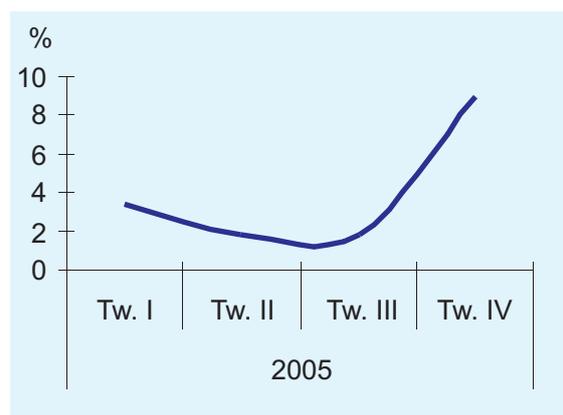
Inflasi makanan jadi di Kota Bandung memiliki karakteristik yang unik dibandingkan kota-kota lainnya di Jawa Barat. Faktor permintaan masyarakat terhadap makanan jadi di Bandung tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Bandung sendiri, namun juga didorong oleh tingginya permintaan dari para wisatawan luar kota yang pada setiap akhir pekan dan masa liburan selalu memenuhi Kota Bandung. Situasi tersebut menyebabkan pengusaha makanan jadi di Kota Bandung lebih memiliki keberanian untuk menaikkan harga produknya pasca kenaikan harga BBM, dengan tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas makanan. Sementara itu, di kota/kabupaten lainnya, sebagian pengusaha cenderung menggunakan strategi untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena khawatir harga tidak terjangkau masyarakat dan akan menyebabkan penurunan permintaan masyarakat. Namun, para pengusaha makanan tersebut menggunakan alternatif strategi yaitu dengan mengurangi kualitas atau kuantitas produknya (lihat Boks 4).

Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menempati urutan ketiga terbesar (9,49%) di Kota Bandung. Inflasi kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak tanah, upah tukang bangunan, dan harga bahan bangunan.

Inflasi kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga di Kota Bandung merupakan yang tertinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh inflasi pada jasa pendidikan, khususnya biaya pendidikan akademi/perguruan tinggi (5,83% (qtq)). Adapun biaya pendidikan SD di Kota Bandung mengalami deflasi sehubungan penyaluran dana BOS, sama seperti di kota-kota lain.

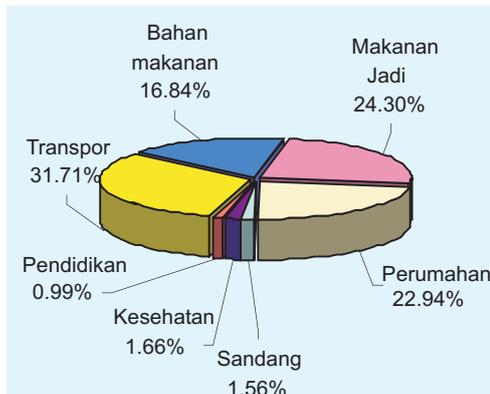
Sementara itu, inflasi dua kelompok barang dan jasa lainnya di Kota Bandung, yaitu kelompok sandang dan kelompok kesehatan masing-masing sebesar 2,17% dan 2,28% (qtq).

Grafik 2.31. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Bekasi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.32. Andil Inflasi di Kota Bekasi Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.33. Disagregasi Inflasi di Kota Bekasi Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

b. Kota Bekasi

Inflasi di Kota Bekasi mencapai 9,00%, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan III-2005 (Grafik 2.31), dengan andil 2,63% terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat. Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Bekasi adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 2.32), yaitu sebesar 2,85%, atau merupakan 31,71% dari total inflasi Kota Bekasi. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok makanan jadi dan kelompok perumahan. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Bekasi, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.33).

Di samping memberikan andil inflasi tertinggi, laju inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga merupakan yang tertinggi di Bekasi (20,20% (qtq)), diikuti oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (10,91% (qtq)). Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif angkutan. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau di Kota Bekasi disebabkan oleh kenaikan harga produk makanan jadi seperti nasi rames,

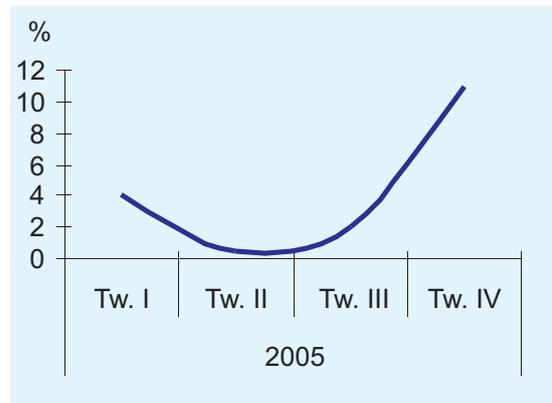
## PERKEMBANGAN INFLASI

kue, mie bakso, minuman ringan, dan rokok. Kenaikan harga makanan jadi antara lain disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan. Inflasi kelompok bahan makanan di Bekasi mencapai 6,41% (qtq), dengan laju inflasi terbesar adalah pada beras, daging sapi dan ayam, serta sayuran.

Kenaikan harga minyak tanah merupakan faktor utama penyebab inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang mencapai 8,23% (qtq). Penyebab lainnya adalah kenaikan harga bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga.

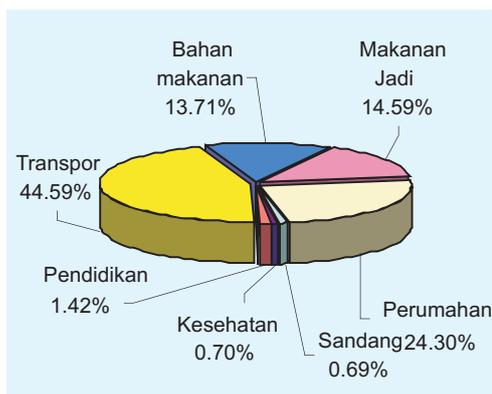
Inflasi kelompok kesehatan; kelompok sandang; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga di Bekasi relatif lebih rendah dibandingkan inflasi keempat kelompok yang telah diuraikan di atas, yakni masing-masing sebesar 3,60%; 2,53%, dan 1,19% (qtq).

Grafik 2.34. Perkembangan Inflasi Bulanan di Kota Bogor



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.35. Andil Inflasi di Kota Bogor Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.36. Disagregasi Inflasi di Kota Bogor Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

### c. Kota Bogor

Inflasi triwulanan Kota Bogor mencapai 10,98% (Grafik 2.34) dengan andil 1,68% terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan IV-2005. Angka inflasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,07%

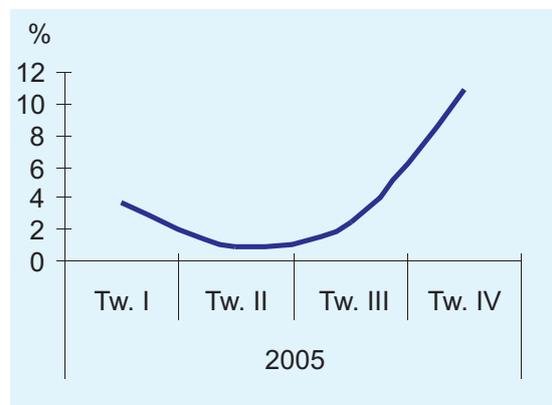
(qtq).

Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Bogor adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 2.35), yaitu sebesar 5,04%, atau merupakan 44,59% dari total inflasi Kota Bogor. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok perumahan dan kelompok makanan jadi. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Bogor, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.36).

Inflasi tertinggi di Kota Bogor terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, sebesar 33,38% (qtq). Laju inflasi kelompok tersebut di Bogor merupakan yang tertinggi di antara tujuh kota. Tingginya laju inflasi tersebut disebabkan oleh tingginya inflasi tarif angkutan dalam kota yang pasca kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 mencapai 62,50% (qtq). Inflasi angkutan dalam kota memberikan andil 3,86% (qtq) terhadap inflasi di Bogor selama triwulan IV-2005.

Selanjutnya, inflasi kelompok perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar menempati urutan kedua tertinggi, yaitu sebesar 10,33% (qtq), diikuti oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta inflasi kelompok bahan makanan dengan inflasi masing-masing sebesar 7,96% dan 7,16% (qtq). Sementara itu, inflasi kelompok barang dan jasa lainnya di bawah 3%. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga adalah satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi, yaitu mencapai -2,30% (qtq) disebabkan oleh deflasi pada jasa pendidikan SLTP dan SD sehubungan

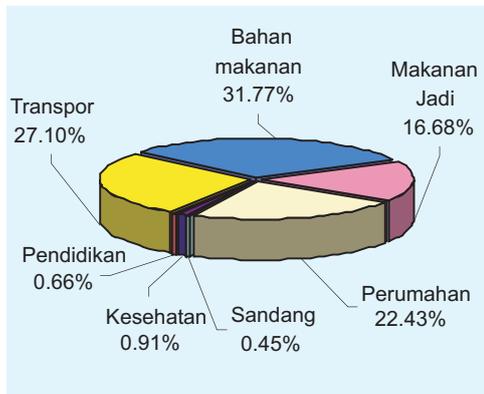
Grafik 2.37. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Sukabumi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

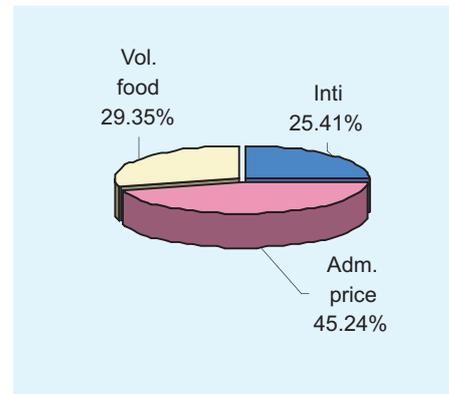
## PERKEMBANGAN INFLASI

Grafik 2.38. Andil Inflasi di Kota Sukabumi Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.39. Disagregasi Inflasi di Kota Sukabumi Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

dengan penyaluran dana BOS di sekolah-sekolah di Kota Bogor.

### d. Kota Sukabumi

Pada triwulan IV-2005 inflasi di Kota Sukabumi mencapai 10,94% dengan andil 0,59% (Grafik 2.37). Angka inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,56%).

Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Sukabumi adalah kelompok bahan makanan (Grafik 2.38), yaitu sebesar 3,48%, atau merupakan 31,78% dari total inflasi Kota Sukabumi. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok transpor dan kelompok perumahan.

Meskipun inflasi kelompok bahan makanan (11,20% (qtq)) lebih rendah dibandingkan inflasi kelompok transpor (26,38% (qtq)), andil inflasi kelompok bahan makanan lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh relatif tingginya nilai konsumsi bahan makanan dibandingkan kelompok lainnya di Sukabumi, yaitu hampir tiga kali lipat nilai konsumsi untuk kelompok transpor. Di enam kota lainnya, perbandingan nilai konsumsi untuk kelompok bahan

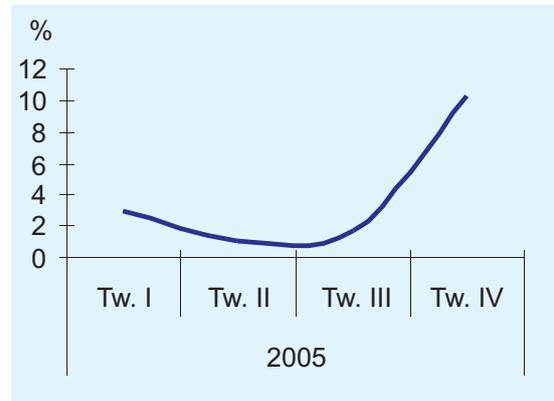
## PERKEMBANGAN INFLASI

makanan dan kelompok transpor kurang dari tiga kali lipat. Sementara itu, dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Sukabumi, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.39).

Inflasi tertinggi di kota tersebut, seperti telah disebutkan di atas, terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (26,38% (qtq)), terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan dalam kota dan harga BBM. Selanjutnya, inflasi kelompok perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar menempati urutan kedua tertinggi, yaitu sebesar 12,17% (qtq), diikuti oleh inflasi kelompok bahan makanan serta inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dengan inflasi masing-masing sebesar 11,20% dan 8,35%. Sementara itu, inflasi kelompok barang dan jasa lainnya di bawah 3%.

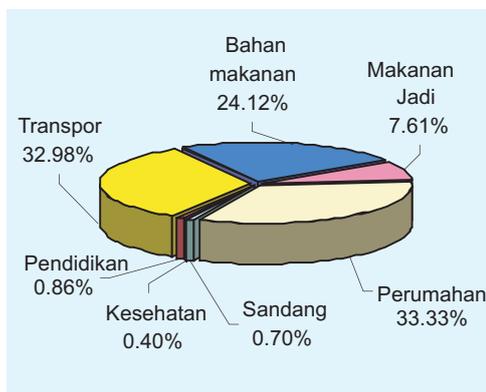
### e. Kota Cirebon

Grafik 2.40. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Cirebon



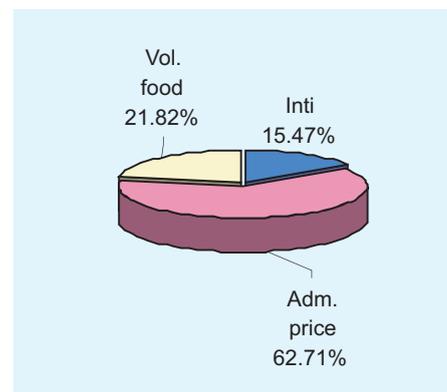
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.41. Andil Inflasi di Kota Cirebon Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.42. Disagregasi Inflasi di Kota Cirebon Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

## PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi di Kota Cirebon mencapai 10,35% dengan andil 0,48% terhadap inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat (Grafik 2.40). Inflasi tersebut lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi pada triwulan sebelumnya (1,75% (qtq)).

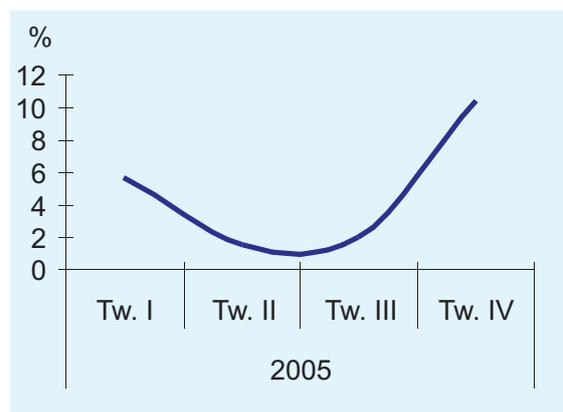
Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Cirebon adalah kelompok perumahan (Grafik 2.41), yaitu sebesar 3,45%, atau merupakan 33,33% dari total inflasi Kota Cirebon. Tingginya andil inflasi kelompok perumahan di Cirebon adalah karena tingginya inflasi minyak tanah di kota tersebut (tertinggi di antara tujuh kota), yaitu sebesar 150,01% (qtq), sehingga andil inflasi minyak tanah saja sebesar 2,70% terhadap inflasi Cirebon. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok transpor dan kelompok bahan makanan. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Cirebon, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.42).

Berdasarkan besarnya laju inflasi, Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (26,45%) merupakan yang tertinggi di kota tersebut karena naiknya harga BBM dan tarif angkutan. Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, yang mencapai 15,03% (qtq), merupakan inflasi kedua terbesar di Kota Cirebon. Seperti telah disebutkan di atas, inflasi minyak tanah (yang termasuk ke dalam kelompok perumahan) di Cirebon merupakan yang tertinggi dibandingkan enam kota lainnya dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi di Kota Cirebon.

Selanjutnya, inflasi kelompok bahan makanan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau di Cirebon masing-masing mencapai 9,17% dan 3,71% (qtq). Inflasi kelompok bahan makanan

terutama disebabkan oleh kenaikan harga beras, daging, dan bumbu-bumbuan, sedangkan inflasi kelompok makanan jadi terutama didorong oleh kenaikan harga makanan jadi dan rokok. Sementara itu, inflasi kelompok barang dan jasa lainnya kurang dari 2%.

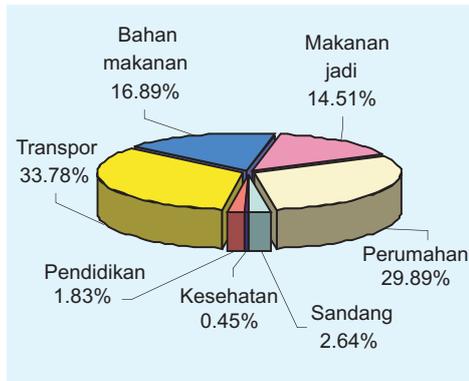
Grafik 2.43. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Tasikmalaya



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

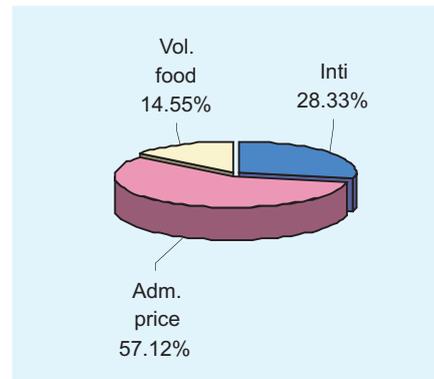
## PERKEMBANGAN INFLASI

Grafik 2.44. Andil Inflasi di Kota Tasikmalaya Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.45. Disagregasi Inflasi di Kota Tasikmalaya Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

### f. Kota Tasikmalaya

Barang dan jasa di Kota Tasikmalaya mengalami inflasi 10,31% (qtq) dengan andil 0,39%, lebih tinggi daripada inflasi triwulan sebelumnya (Grafik 2.43). Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Tasikmalaya adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 2.44), yaitu sebesar 3,51%, atau merupakan 33,78% dari total inflasi Kota Tasikmalaya. Dua kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok perumahan dan kelompok bahan makanan. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Tasikmalaya, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi volatile food (Grafik 2.45).

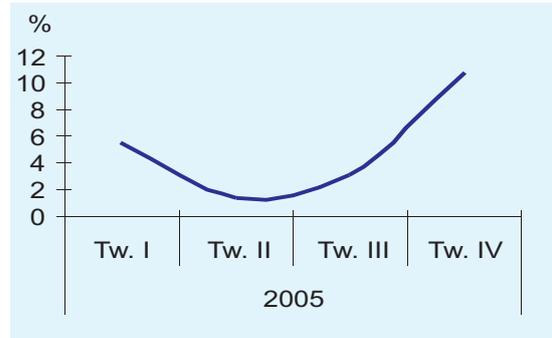
Inflasi di kota tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga pada kelompok

## PERKEMBANGAN INFLASI

transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (31,64%). Kelompok lainnya yang mengalami inflasi cukup tinggi di Kota Tasikmalaya adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (13,75%) karena kenaikan harga minyak tanah, bahan bangunan, dan barang/alat pemeliharaan rumah.

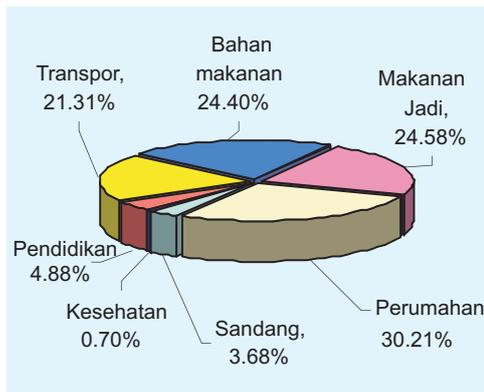
Kelompok yang mengalami inflasi di atas 5% di Tasikmalaya adalah kelompok bahan makanan (7,51%), diikuti oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (5,84%). Pada kelompok bahan makanan, komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi antara lain harga beras, sayuran, dan buah-buahan, sedangkan pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau adalah mie, kue, roti, minuman ringan, dan rokok. Sementara itu, inflasi kelompok barang dan jasa lainnya di Tasikmalaya kurang dari

Grafik 2.46. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Kota Banjar



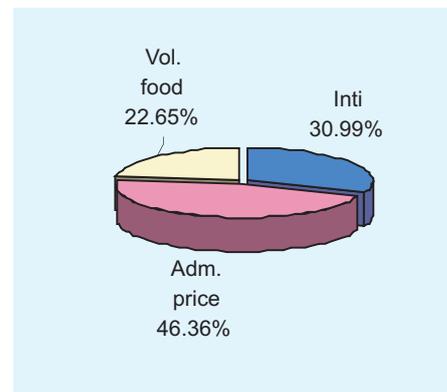
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 2.47. Andil Inflasi di Kota Banjar Per Kelompok Barang dan Jasa (qtq) Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.48. Disagregasi Inflasi di Kota Banjar Triwulan IV-2005



Sumber: Hasil perhitungan KBI Bandung terhadap data BPS Provinsi Jawa Barat.

3%.

### g. Kota Banjar

Inflasi di Kota Banjar mencapai 10,78%, dengan andil 0,21% terhadap inflasi Jawa Barat, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.46)

Kelompok barang dan jasa yang memberikan andil inflasi tertinggi terhadap inflasi di Kota Banjar adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (Grafik 2.47), yaitu sebesar 3,25%, atau merupakan 30,21% dari total inflasi Kota Banjar. Kelompok lainnya yang juga memberikan andil cukup besar adalah kelompok makanan jadi, kelompok bahan makanan, dan kelompok transpor. Dilihat dari pembentukan inflasi di Kota Banjar, inflasi administered prices merupakan yang paling dominan, diikuti oleh inflasi inti, dan inflasi

Halaman ini sengaja dikosongkan  
This page is intentionally blank

# BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

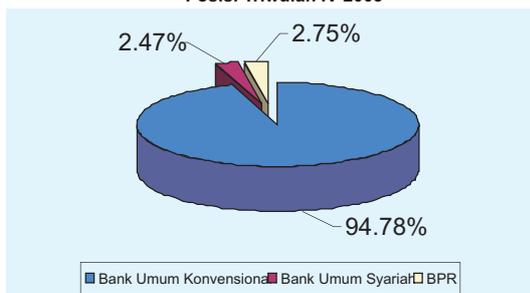
## 1. KONDISI UMUM

Perkembangan makro ekonomi pada triwulan IV-2005, yang ditandai dengan kenaikan inflasi, akibat kenaikan harga BBM sejak awal Oktober 2005, dan meningkatnya suku bunga, telah menimbulkan dampak yang kurang menggembirakan terhadap kinerja dunia usaha, termasuk perbankan di Jawa Barat. Hal ini tercermin pada menurunnya profitabilitas dan efisiensi usaha bank.

Namun demikian, secara umum kinerja perbankan di Jawa Barat tetap menunjukkan perkembangan yang positif. DPK yang dihimpun dan kredit yang disalurkan masih mengalami peningkatan. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) mengalami penurunan. Khusus untuk bank umum yang berkantor pusat di Bandung, total aset dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tetap mengalami peningkatan.

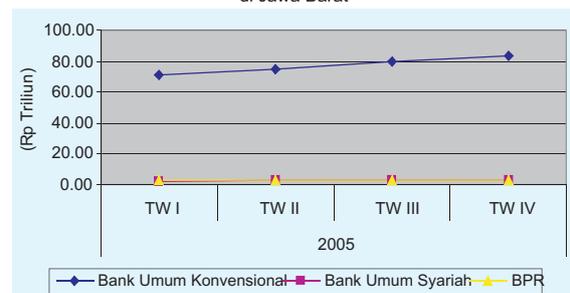
Total aset perbankan di Jawa Barat, yang meliputi bank umum dan BPR, mencapai Rp109,11 triliun, meningkat sebesar Rp3,69 triliun atau tumbuh 3,50% dibanding triwulan sebelumnya. Sebagaimana triwulan-triwulan sebelumnya, pangsa terbesar aset perbankan di Jawa Barat dimiliki oleh bank umum konvensional, yakni sebesar 94,78% (Rp103,41 triliun), sementara pangsa bank umum syariah dan BPR masing-masing hanya sebesar 2,47% (Rp2,70 triliun) dan 2,75% (Rp3 triliun) (Grafik 3.1 dan 3.2).

Grafik 3.1. Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat, Posisi Triwulan IV-2005



Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

Grafik 3.2. Perkembangan Aset Perbankan di Jawa Barat

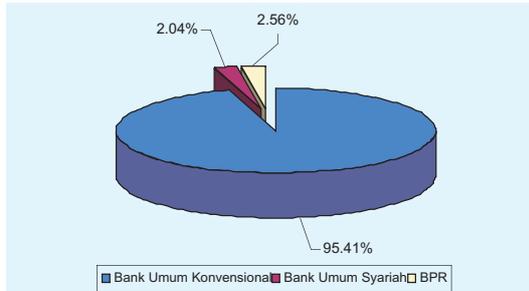


Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

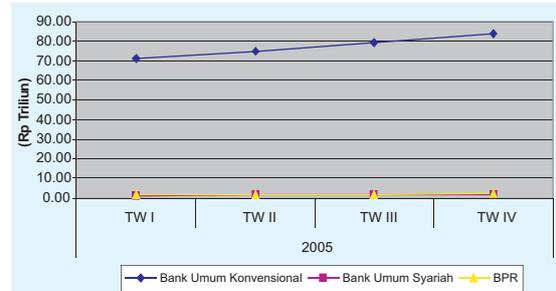
Meningkatnya suku bunga simpanan yang ditawarkan oleh perbankan kepada masyarakat telah mendorong pertumbuhan DPK, baik pada bank umum maupun BPR. Sampai dengan triwulan IV-2005, total DPK perbankan mencapai Rp87,56 triliun, meningkat sebesar Rp4,34 triliun atau tumbuh 5,21% dibanding posisi DPK triwulan III-2005. Dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada triwulan III-2005 yang sebesar 5,63%, pertumbuhan DPK pada triwulan IV-2005 sedikit mengalami penurunan. Pangsa bank umum konvensional dalam penghimpunan DPK mencapai 95,43% (Rp83,54 triliun), sementara bank umum syariah dan BPR masing-masing sebesar 2,04% (Rp1,78 triliun) dan 2,54% (Rp2,22 triliun) (Grafik 3.3 dan 3.4).

Grafik 3.3. Komposisi DPK Perbankan di Jawa Barat, Posisi Triwulan IV-2005



Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

Grafik 3.4. Perkembangan DPK Perbankan di Jawa Barat



Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

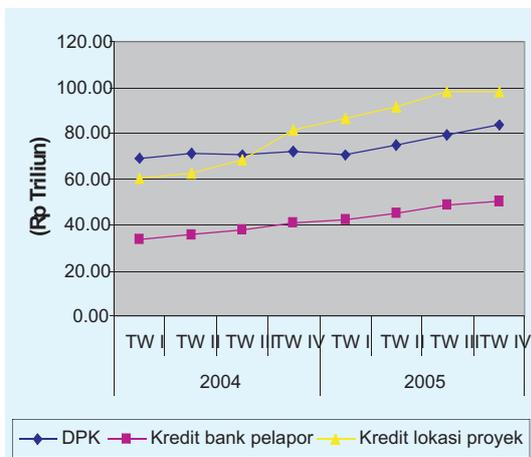
### 1.1. BANK UMUM

Sampai dengan akhir triwulan IV-2005, Total DPK yang dihimpun maupun kredit yang disalurkan bank umum masih mengalami peningkatan. DPK yang dihimpun mencapai Rp83,54 triliun, atau tumbuh 5,32% (qtq), sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp50,52 triliun atau tumbuh 3,24% (qtq) (Grafik 3.5). Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tren kredit bank umum pemerintah (BUP), bank umum swasta nasional (BUSN) dan bank asing campuran (BAC) triwulan III-2005, masing-masing mengalami perlambatan. Melambatnya pertumbuhan DPK diperkirakan karena penarikan simpanan oleh masyarakat untuk membiayai konsumsi yang meningkat akibat adanya kenaikan harga barang dan jasa. Sementara, penurunan pertumbuhan kredit, yang lebih besar daripada penurunan pertumbuhan DPK, antara lain disebabkan karena sektor riil menunda sebagian rencana ekspansi usahanya akibat kenaikan harga BBM dan suku bunga kredit. Sementara itu, karena kenaikan kredit yang sebesar Rp1,58 triliun lebih kecil daripada kenaikan DPK yang sebesar Rp4,22 triliun, LDR pada triwulan ini mengalami penurunan, dari 61,69% pada triwulan III-2005 menjadi 60,48% pada triwulan IV-2005.

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

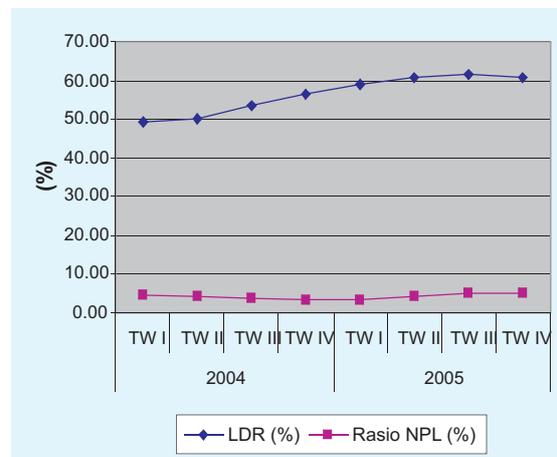
Berbeda halnya dengan LDR yang mengalami penurunan, kualitas kredit pada triwulan ini menunjukkan peningkatan, sebagaimana dapat dilihat dari penurunan rasio NPL gross, dari 4,95% pada triwulan III-2005 menjadi 4,91% pada triwulan IV-2005 (Grafik 3.6). Penurunan rasio NPL gross ini disebabkan karena adanya penurunan pertumbuhan kredit bermasalah, dari 29,31% (qtq) pada triwulan III-2005 menjadi 2,56% (qtq) pada triwulan IV-2005, yang juga lebih kecil dibanding pertumbuhan kredit triwulan IV-2005 yang sebesar

Grafik 3.5.  
Perkembangan DPK dan Kredit



Sumber: LBU dan SEKDA KBI Bandung

Grafik 3.6.  
Perkembangan LDR dan NPL



Sumber: LBU KBI Bandung

3,24% (qtq).

Pada triwulan IV-2005, lebih dari 50% kredit disalurkan untuk kegiatan produktif, yang meliputi kredit investasi sebesar 10,10% dan kredit modal kerja sebesar 41,05%, sementara kredit untuk konsumsi sebesar 48,85%. Jika dilihat berdasarkan lokasi proyek, posisi kredit yang disalurkan oleh bank umum konvensional mencapai Rp98,32 triliun, meningkat sebesar Rp32 miliar atau tumbuh 4,25% dibanding posisi pada triwulan sebelumnya.

### 1.1.1. DANA PIHAK KETIGA

Kenaikan suku bunga dana/simpanan, terutama untuk jenis simpanan deposito, telah mendorong minat masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan DPK, yang pada triwulan IV-2005 mencapai Rp83,54 triliun, meningkat Rp4,22 triliun atau tumbuh 5,32% dibanding posisi triwulan sebelumnya. Untuk deposito, pada triwulan laporan tumbuh sebesar 15,06% (qtq), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya. Sedangkan giro dan tabungan, masing-masing turun sebesar 4,72%

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

(qtq) dan 1,33% (qtq).

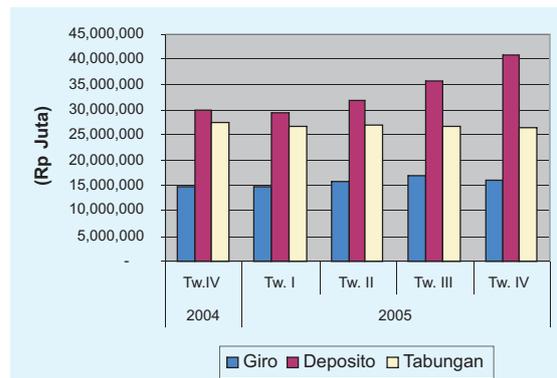
Penurunan simpanan giro diperkirakan antara lain disebabkan oleh penarikan dana untuk membiayai kenaikan biaya produksi. Sementara itu, penurunan tabungan merupakan dampak dari menurunnya pendapatan riil sebagian deposan akibat kenaikan harga-harga sehingga alokasi pengeluaran untuk konsumsi secara kuantitatif meningkat. Bagi deposan yang berpendapatan tetap, dampak kenaikan harga ini akan menurunkan kemampuannya menyisihkan sebagian pendapatan untuk saving, bahkan melakukan penarikan tabungan untuk membiayai konsumsinya. Hal ini didukung survei hasil kerjasama KBI Bandung dan ISEI tahun 2005.

Dibandingkan dengan tabungan, deposito relatif lebih sensitif terhadap perkembangan suku bunga dan alternatif investasi lainnya. Untuk tabungan, penggunaannya cenderung untuk mendukung pembiayaan transaksi/konsumsi dan untuk keperluan berjaga-jaga (precautionary), sementara deposito lebih cenderung sebagai alternatif investasi.

Berdasarkan nominalnya, simpanan dalam bentuk deposito meningkat Rp5,37 triliun, giro turun Rp0,80 triliun, dan tabungan turun Rp0,36 triliun. Dengan demikian, komposisi DPK pada triwulan IV-2005 terdiri dari deposito sebesar Rp41,00 triliun (49,08%), giro Rp16,04 triliun (19,20%) dan tabungan Rp26,50 triliun (31,73%) (Grafik 3.7).

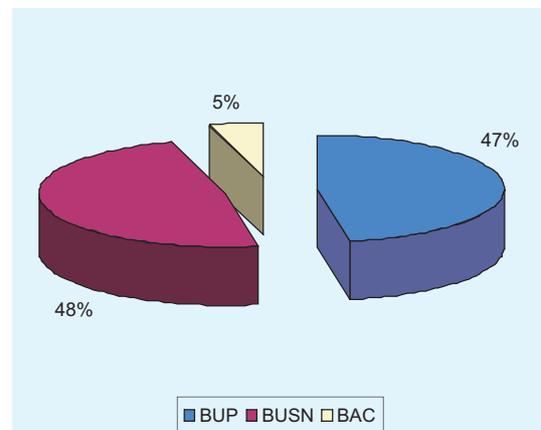
Dilihat dari kelompok bank, sampai dengan akhir triwulan IV-2005, DPK yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Pemerintah (BUP), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dan Bank Asing Campuran (BAC) masing-masing mencapai Rp39,38 triliun (47,13%), Rp40,19 triliun (48,11%), dan Rp3,98 triliun (4,76%) (Grafik 3.8). Penghimpunan DPK oleh ketiga kelompok

Grafik 3.7. Penghimpunan DPK



Sumber LBU KBI Bandung

Grafik 3.8. Pangsa Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Bank, Triwulan IV-2005



Sumber LBU KBI Bandung

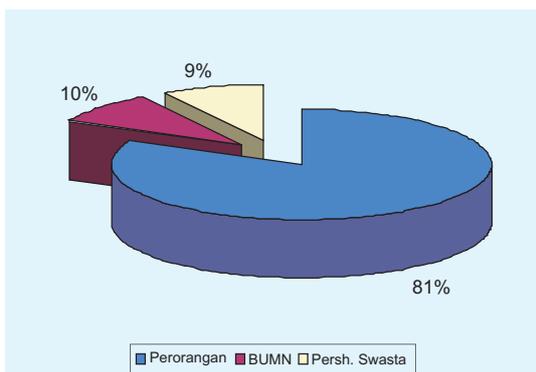
## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

bank tersebut mengalami pertumbuhan dibanding posisi DPK triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 6,93%, 4,11%, dan 2,03%.

Sama halnya dengan triwulan III-2005, pangsa DPK masih didominasi oleh kelompok BUSN. Namun dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan DPK terbesar terjadi pada kelompok BUP. Hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya kegiatan promosi produk yang dilakukan oleh BUP.

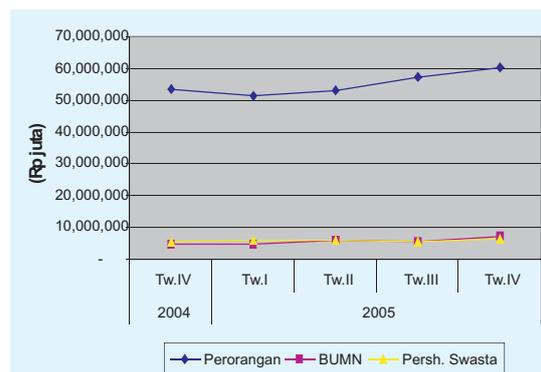
Berdasarkan golongan pemilik, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Jawa Barat sebagian besar masih berasal dari nasabah perorangan, dengan posisi sebesar Rp60,29 triliun (72,17%), kemudian BUMN dan perusahaan swasta, masing-masing sebesar Rp7,03 triliun (8,42%) dan Rp6,32 triliun (7,56%) (Grafik 3.9). Dilihat pertumbuhannya, DPK milik

Grafik 3.9. Pangsa DPK Berdasarkan Golongan Pemilik, Triwulan IV-2005



Sumber : LBU KBI Bandung

Grafik 3.10. Perkembangan Posisi DPK Berdasarkan Golongan Pemilik

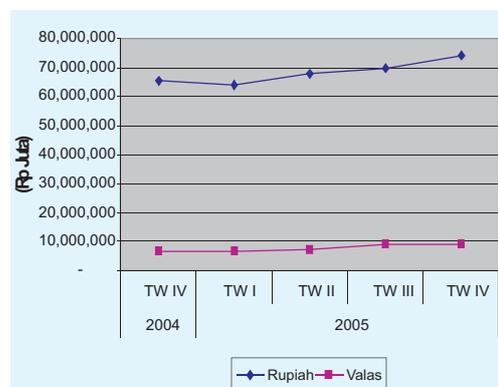


Sumber : LBU KBI Bandung

perorangan tumbuh 5,21%, lebih rendah dari pertumbuhan DPK milik BUMN dan perusahaan swasta, yang masing-masing sebesar 24,34% dan 10,49% (Grafik 3.10).

Berdasarkan valuta, penghimpunan DPK dalam rupiah sampai dengan akhir triwulan IV-2005 mencapai Rp74,30 triliun, tumbuh 6,33% (qtq). Sementara, DPK dalam valuta asing tercatat sebesar Rp9,24 triliun, turun 2,21% dibanding posisi triwulan sebelumnya (Grafik 3.11). Penyebab

Grafik 3.11. Penghimpunan DPK Bank Umum dalam Rupiah dan Valas



Sumber LBU KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

peningkatan DPK dalam rupiah dan turunnya DPK dalam valuta asing antara lain disebabkan oleh tingginya suku bunga simpanan dalam rupiah, sementara suku bunga simpanan dalam valuta asing relatif tetap.

Peningkatan DPK dalam rupiah terjadi hanya pada deposito sebesar 17,11%, sedangkan giro dan tabungan turun masing-masing sebesar 2,87% dan 1,32%. Meningkatnya simpanan dalam rupiah ini, yang terutama terjadi dalam dua bulan terakhir, merupakan dampak dari kenaikan suku bunga dana dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US\$).

### 1.1.2. PENYALURAN KREDIT

#### 1.1.2.1. PENYALURAN KREDIT BANK PELAPOR<sup>9</sup>

Dalam periode laporan, penyaluran kredit bank umum masih mengalami pertumbuhan sebesar 3,24% (qto). Hal ini diperkirakan antara lain karena suku bunga kredit telah disepakati sebelum kenaikan harga BBM. Selain itu, kredit perbankan lebih banyak disalurkan kepada UMKM untuk jumlah dibawah Rp50 juta, yang relatif kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga antara 1-2%.

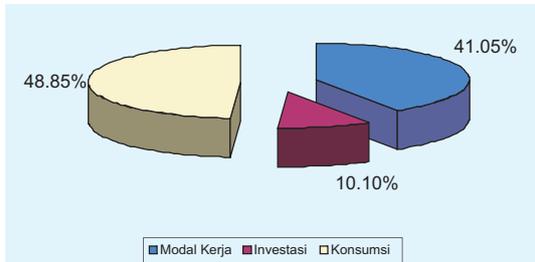
Berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar kredit bank umum konvensional di Jawa Barat disalurkan untuk kegiatan produktif (modal kerja dan investasi). Sampai dengan triwulan IV-2005, posisi kredit untuk kegiatan produktif ini tercatat sebesar Rp25,84 triliun (51,15%), meningkat Rp1,00 triliun atau tumbuh 4,04% dibanding posisi triwulan sebelumnya. Sementara itu, posisi kredit konsumsi pada triwulan yang sama tercatat sebesar Rp24,68 triliun (48,85%), mengalami kenaikan sebesar Rp579,54 milyar atau tumbuh 2,40% dibanding posisi triwulan sebelumnya (Grafik 3.12 dan 3.13). Mengamati perkembangan kredit konsumsi, yang dari triwulan ke triwulan berikutnya dalam tahun 2005

---

<sup>9</sup> Berdasarkan laporan bank umum yang beroperasi di Jawa Barat

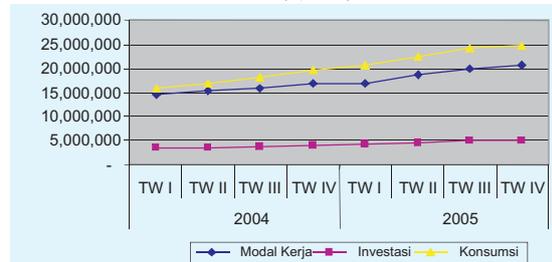
## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

**Grafik 3.12. Distribusi Kredit Bank Umum Konvensional berdasarkan Jenis Penggunaan, Posisi Triwulan IV-2005**



Sumber : LBU KBI Bandung

**Grafik 3.13. Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Penggunaan (Rp Juta)**

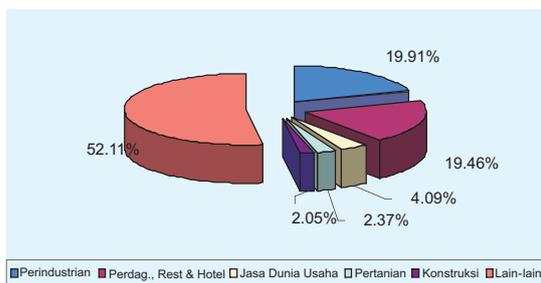


Sumber : LBU KBI Bandung

mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa banyak sektor-sektor produktif yang telah dapat dibiayai oleh perbankan.

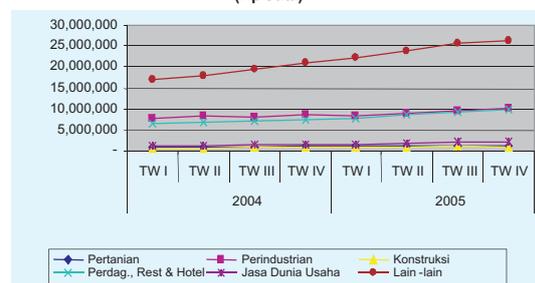
Sebagaimana pada triwulan-triwulan sebelumnya, sebagian besar kredit pada triwulan ini masih disalurkan ke sektor industri pengolahan, dengan posisi mencapai 19,91% dari total kredit. Selanjutnya, sektor ekonomi lainnya yang cukup besar penyerapan kreditnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan sektor jasa-jasa dunia usaha, yang masing-masing mencapai 19,46% dan 4,09%. Sementara itu, penyaluran kredit ke sektor PHR mengalami peningkatan terbesar, mencapai Rp627,10 milyar atau tumbuh 6,81% dibanding posisi triwulan sebelumnya (qtq). Selanjutnya, diikuti oleh penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp356,72 milyar (3,68%) dan Rp52,92 milyar (4,62%) (Grafik 3.14 dan 3.15). Tingginya pertumbuhan kredit ke sektor PHR pada triwulan ini terkait dengan meningkatnya

**Grafik 3.14. Lima Sektor Ekonomi Penyerap Terbesar Kredit Bank Umum, Posisi Akhir TW IV-2005**



Sumber : LBU KBI Bandung

**Grafik 3.15. Perkembangan Lima Sektor Ekonomi Penyerap Kredit Bank Umum Terbesar (Rp Juta)**



Sumber : LBU KBI Bandung

kegiatan usaha perdagangan dan jasa hotel serta restoran akibat peningkatan permintaan menjelang dan pada saat hari raya Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru yang terjadi pada triwulan ini

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Dilihat dari distribusi per kabupten/kota penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan, sebagian besar kredit pada triwulan ini disalurkan di Kota Bandung hingga mencapai posisi 75,50% dari total kredit ke sektor industri pengolahan (Rp3,10 triliun), diikuti kemudian dengan Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi, dengan posisi masing-masing sebesar Rp263,74 miliar (6,42%), Rp243,74 miliar (5,93%), Rp124,89 miliar (3,04%), dan Rp55,54 miliar (1,35%). Untuk penyaluran kredit ke sektor PHR, dominasi wilayah penyalurannya meliputi Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang, dengan posisi masing-masing sebesar Rp3,46 triliun (40,44%), Rp896,67 miliar (10,49%), Rp602,83 miliar (7,05%), Rp586,77 miliar (6,87%), dan Rp338,33 miliar (3,96%). Sementara itu, untuk kredit ke sektor pertanian, lima wilayah penyerap terbesar kredit ke sektor ini adalah Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kota Bogor, dengan posisi masing-masing sebesar Rp135,38 miliar (18,34%), Rp95,84 miliar (12,98%), Rp71,30 miliar (9,66%), Rp55,83 miliar (7,56%), dan Rp45,78 miliar (6,20%).

Sampai dengan triwulan IV-2005, sebagian besar kredit ke sektor industri pengolahan diserap oleh sub sektor industri tekstil, sandang dan kulit, yang mencapai Rp6,04 triliun (60%). Proporsi penyaluran kredit ke sub sektor ini adalah kredit modal kerja sebesar 84,27% dan kredit investasi 15,74%.

Untuk kredit ke sektor PHR, sebagian besar kredit diserap oleh sub sektor perdagangan eceran, hingga mencapai Rp5,44 triliun (55,31%). Kredit ke sub sektor perdagangan eceran ini terutama disalurkan ke usaha perdagangan pakaian, perlengkapan rumah dan kendaraan bermotor, yang mengalami peningkatan permintaan pada triwulan ini karena adanya hari raya Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru. Berdasarkan komposisinya, sebagian besar kredit ke sub sektor ini disalurkan untuk modal kerja, mencapai 88,66%, dan selebihnya merupakan kredit investasi (11,34%).

Menilik perkembangan kredit bank umum yang sebagian besar disalurkan ke sektor industri pengolahan dan sektor PHR, menunjukkan bahwa kredit perbankan telah berperan dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi dominan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Namun demikian, sektor pertanian yang merupakan sektor yang terbesar menyerap tenaga kerja terlihat tidak terlalu menarik perhatian perbankan untuk

### BOKS 5. PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT KE SEKTOR PERTANIAN DI JAWA BARAT

Sampai dengan akhir tahun 2005, kredit yang disalurkan bank umum ke sektor pertanian di Jawa Barat menurun sebesar 10,02%, dari posisi Rp3,47 triliun pada akhir tahun 2004 menjadi Rp3,12 triliun pada akhir tahun 2005. Nilai kredit kepada sektor pertanian ini masih sangat kecil dibanding total kredit yang dikururkan oleh bank umum di Jawa Barat. Dari total kredit sebesar Rp98,32 triliun, hanya 3,18% yang disalurkan ke sektor pertanian, dan lebih rendah dibanding kredit yang disalurkan ke sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), dengan posisi masing-masing sebesar Rp31,91 triliun dan Rp12,58 triliun. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Jawa Barat masih belum dapat menggunakan sumber pembiayaan dari sektor perbankan, sehingga akselerasi pengembangan sektor pertanian di Jawa Barat belum sepenuhnya dapat dilakukan. Oleh karena itu wajar, apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat jauh lebih kecil dibanding kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor PHR.

Masih rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian terutama terkait dengan kekhawatiran bank akan tingginya potensi terjadinya default, karena sifat produksi di sektor pertanian berpola musiman, sangat tergantung kepada kondisi alam dan rentan terhadap penyakit/hama. Hal ini menyebabkan bank umum di Jawa Barat cenderung menahan diri dalam melakukan ekspansi kredit ke sektor pertanian dan menaikkan tingkat suku bunga kredit ke sektor pertanian, dengan kisaran kenaikan antara 1 sampai dengan 5%. Meskipun demikian, angka statistik ternyata menunjukkan fenomena yang berbeda. Kualitas kredit ke sektor pertanian di Jawa Barat ternyata cukup baik. Jumlah kredit bermasalah (NPL) ke sektor pertanian relatif kecil; sebagaimana ditunjukkan persentase kredit bermasalah (NPL) pada bulan Desember 2005 yang hanya sebesar 0,05% dari total kredit ke sektor pertanian di Jawa Barat (jauh lebih rendah dari persentase kredit bermasalah di sektor industri pengolahan dan sektor PHR); dan pertumbuhannya juga relatif kecil. Dilihat dari wilayah penyalurannya, kredit bank umum ke sektor pertanian di Jawa Barat lebih terkonsentrasi penyalurannya di beberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Indramayu. Daerah-daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang potensial dalam menyerap kredit pertanian dari bank umum, karena memiliki persentase di atas 5% (high) dari total kredit ke sektor pertanian di Jawa Barat. Sedangkan daerah lainnya, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan 12 daerah lainnya, dikategorikan sebagai daerah yang kurang potensial, karena persentasenya di bawah 5% (low) dari total kredit ke sektor pertanian di Jawa Barat (lihat tabel).

Apabila hal di atas dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sektor pertanian di kabupaten/kota di Jawa Barat, maka dapat diketahui peran dari kredit pertanian terhadap LPE sektor pertanian di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat, yang dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu (lihat grafik):

- Kuadran I adalah kabupaten/kota yang mempunyai kredit pertanian dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian rendah;
- Kuadran II adalah kabupaten/kota yang mempunyai kredit pertanian rendah, tapi laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian tinggi;
- Kuadran III adalah kabupaten/kota yang mempunyai kredit pertanian tinggi, tapi laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian rendah; dan
- Kuadran IV adalah kabupaten/kota yang mempunyai kredit pertanian dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian tinggi.

Grafik Pemetaan Kab/Kota Berdasarkan LPE Sektor Pertanian dan Kredit Pertanian

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Dari pemetaan di atas, dapat dilihat bahwa beberapa daerah telah mendapat kucuran kredit

PDRB Sektor Pertanian

	Kuadran I	Kuadran IV
Low	Kab. Cirebon, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, dan Kota Sukabumi	Kab. Bandung dan Kab. Indramayu
	Kuadran II	Kuadran III
High	Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Tasikmalaya, Kab. Kuningan, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon	Kab. Bekasi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bogor dan Kota Bandung
	Low	High Kredit Sektor Pertanian

pertanian yang memadai, namun laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian daerah tersebut tidak sejalan dengan besarnya kredit pertanian yang disalurkan. Sebaliknya, beberapa daerah sebenarnya mempunyai laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang tinggi, namun tidak mendapat dukungan pembiayaan yang cukup dari perbankan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi perbankan untuk melakukan ekspansi kredit ke sektor pertanian, terutama di daerah-daerah yang berada di kuadran II, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, dilihat dari penyaluran kredit ke sub sektor di sektor pertanian, kredit pertanian di Jawa Barat lebih terkonsentrasi penyalurannya ke tiga sub sektor, yaitu sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Sedangkan dua sub sektor lainnya, yaitu sub sektor perikanan dan sub sektor kehutanan, relatif kecil menerima kucuran kredit. Besarnya proporsi kredit ke ketiga sub sektor di sektor pertanian ini mencapai lebih dari 90% terhadap total kredit pertanian di Jawa Barat, sementara dua sub sektor lainnya hanya menerima kucuran kredit sekitar 10%. Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan masing-masing sub sektor, sub sektor kehutanan mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 129,46%, dan diikuti oleh sub sektor peternakan yang tumbuh sebesar 44,17%. Khusus untuk sub sektor peternakan, nampaknya isu flu burung yang selama ini melanda Jawa Barat belum berdampak signifikan terhadap penyaluran kredit ke sub sektor ini.

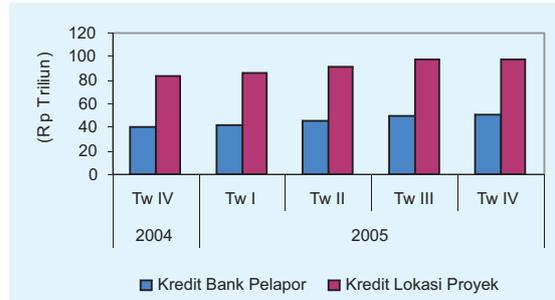
## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

menyalurkan kreditnya (lihat Boks 5. Perkembangan Penyaluran Kredit Ke Sektor Pertanian di Jawa Barat).

### 1.1.2.2. PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN LOKASI PROYEK<sup>10</sup>

Posisi kredit yang disalurkan berdasarkan lokasi proyek di Jawa Barat pada triwulan IV-2005 mencapai Rp98,32 triliun, sedikit meningkat (0,03%) dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp98,29 triliun.

Grafik : 3.16. Perkembangan Kredit Bank Pelapor dan Lokasi Proyek



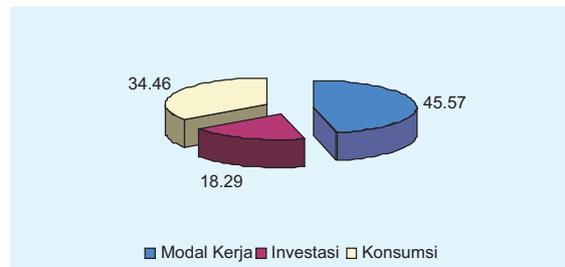
Sumber : LBU dan SEKDA KBI Bandung

Sedangkan secara tahunan (yoy) meningkat sebesar 17,89%. Jumlah kredit tersebut jauh melebihi DPK yang dihimpun oleh bank umum yang beroperasi di Jawa Barat yang hanya mencapai Rp83,54 triliun. Dari total kredit tersebut, Rp47,80 triliun (48,62%) berasal dari perbankan di luar Jawa Barat (Grafik 3.16). Letak geografis Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta, memungkinkan bank-bank yang berada di Jakarta untuk

menyalurkan kreditnya guna membiayai proyek-proyek yang berada di wilayah Jawa Barat antara lain Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, dan Kota/Kabupaten Bogor.

Dari tujuan penggunaannya, kredit berdasarkan lokasi proyek sebagian besar

Grafik 3.17. Pangsa Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SEKDA KBI Bandung

<sup>10</sup> Kredit berdasarkan lokasi proyek adalah kredit yang disalurkan oleh bank umum baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Jawa Barat yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan kredit di Jawa

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

disalurkan untuk kegiatan produktif (investasi dan modal kerja), yakni sebesar Rp63,86 triliun (64,95%). Sementara, untuk kegiatan konsumsi sebesar Rp34,46 triliun (35,05%) (Grafik 3.17).

Sebagaimana pada triwulan sebelumnya, berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit lokasi proyek sebagian besar masih disalurkan ke sektor industri

pengolahan. Pada triwulan IV-2005, posisi kredit yang disalurkan ke sektor industri pengolahan mencapai Rp31,91 triliun (32,46%). Tingginya penyerapan kredit oleh industri pengolahan ini sejalan dengan dominasi industri tersebut dalam PDRB Jawa Barat. Selain sektor industri pengolahan, sektor lainnya yang cukup besar menyerap kredit berdasarkan lokasi proyek adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-

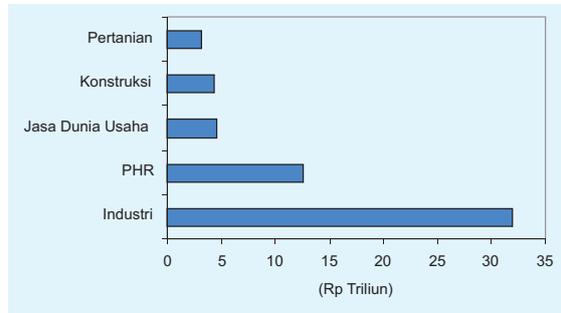
jasa dunia usaha serta sektor konstruksi, yakni masing-masing sebesar 12,81%, 4,64%, dan 4,41% (Grafik 3.18).

### 1.1.2.3. PERSETUJUAN KREDIT BARU

Meskipun kondisi makro ekonomi pada triwulan IV-2005 kurang menggembirakan, namun sejalan dengan bussiness plan perbankan tahun 2005 dalam penyaluran kredit ke berbagai sektor, komitmen

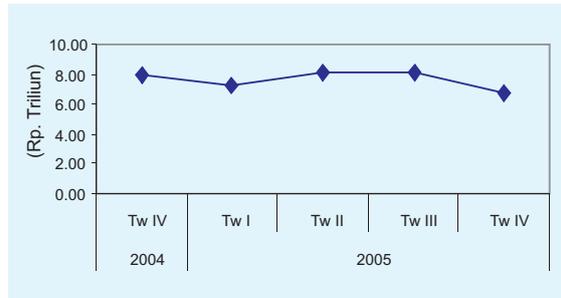
perbankan di Jawa Barat untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha masih cukup besar. Hal ini terlihat pada persetujuan kredit baru pada triwulan IV-2005 yang sebesar Rp6,70 triliun. Secara triwulan persetujuan tersebut mengalami penurunan sebesar 17,32%, namun secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 10,76%, dari Rp27,26 triliun pada 2004 menjadi Rp30,20 triliun pada 2005. Besarnya persetujuan kredit baru tersebut, juga

Grafik 3.18. Sektor Dominan Penyerap Kredit Lokasi Proyek



Sumber: SEKDA KBI Bandung

Grafik 3.19. Perkembangan Persetujuan Kredit Baru



Sumber: SEKDA KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

memperlihatkan bahwa perbankan di Jawa Barat memiliki peranan yang besar dalam pembiayaan pembangunan (Grafik 3.19).

### 1.1.3. RASIO KREDIT BERMASALAH/NPLS

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang memiliki rasio NPL tertinggi adalah kredit yang disalurkan ke sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air, masing-masing sebesar 12,46% dan 9,53%, sedangkan yang memiliki NPL terendah adalah kredit yang disalurkan ke sektor konstruksi dan sektor PHR, masing-masing sebesar 3,31% dan 4,51%.

Berdasarkan wilayah per kabupaten/kota, kredit bermasalah (NPL) terjadi hampir di seluruh wilayah, namun dengan rasio NPL yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi pada

Tabel 3.1. Lima Wilayah Kabupaten/Kota dengan NPL Tertinggi

Wilayah	Nominal (Dalam Juta)		Rasio
	Total Kredit	NPL	NPL (%)
Kab. Tasikmalaya	219,008	16,816	7.68
Kota Bandung	24,986,878	1,666,017	6.67
Kota Bogor	3,448,826	177,705	5.15
Kab. Purwakarta	1,037,609	52,273	5.04
Kota Cirebon	3,246,946	160,047	4.93

Sumber : LBU KBI Bandung

triwulan sebelumnya, rasio NPL terbesar pada triwulan ini masih terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta (Tabel 3.1).

Sementara itu, sebagaimana pula yang terjadi pada triwulan sebelumnya, rasio NPL

Tabel 3.2. Lima Wilayah Kabupaten/Kota dengan NPL Terendah

Wilayah	Nominal (Dalam Juta Rp.)		Rasio
	Total Kredit	NPLs	NPLs (%)
Kab. Majalengka	312,621	563	0.18
Kab. Kuningan	367,864	3,426	0.93
Kab. Bogor	792,023	8,014	1.01
Kab. Cianjur	890,147	12,117	1.36
Kota Cimahi	913,262	12,506	1.37

Sumber : LBU KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

terendah masih terjadi di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kota Cimahi (Tabel 3.2).

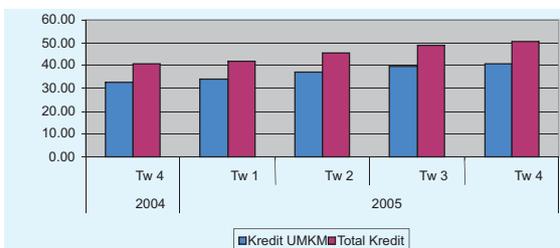
### 1.1.4. KREDIT UMKM

Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam periode laporan meningkat sebesar Rp1,12 triliun (2,83%), melambat dibanding kenaikan kredit UMKM triwulan sebelumnya, yang mencapai Rp2,66 triliun (7,19%). Penyaluran kredit UMKM oleh bank umum ini telah memainkan peranan penting dalam penyediaan dana yang dibutuhkan baik untuk permodalan maupun pengembangan UMKM. Sampai dengan akhir triwulan IV-2005, posisi kredit UMKM di Jawa Barat telah mencapai Rp40,75triliun atau sebesar 80,66% dari posisi total kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat (grafik 3.14). Perkembangan positif ini bukan hanya terjadi pada kenaikan jumlah nominal kredit, tetapi juga terjadi pada kenaikan jumlah debitur, dari 1,8 juta debitur pada akhir tahun 2004 menjadi 2,01 juta debitur pada akhir tahun 2005.

Dilihat dari skala kredit UMKM, sebagian besar kredit disalurkan ke skala mikro, dengan posisi per-Desember 2005 tercatat sebesar Rp21,58 triliun (52,94%), meningkat sebesar Rp610 miliar atau tumbuh 2,89% dibanding posisi triwulan sebelumnya (qtq). Sedangkan kredit kepada usaha kecil tercatat sebesar Rp9,28 triliun (22,78%), yang mengalami kenaikan sebesar Rp150 miliar atau tumbuh 1,63% (qtq), sementara kredit skala menengah tercatat sebesar Rp9,89 triliun (24,28%), meningkat sebesar Rp370 miliar atau tumbuh 3,84% dibanding posisi triwulan sebelumnya (qtq) (Grafik 3.20).

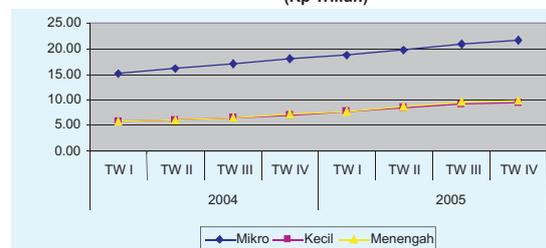
Apabila dilihat dari rasio kredit UMKM terhadap total kredit, maka dari 55 bank umum

Grafik 3.20. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum dan Total Kredit Bank Umum (Rp Triliun)



Sumber : LBU KBI Bandung

Grafik 3.21. Perkembangan Kredit UMKM berdasarkan Skala Usaha Yang Dibiayai (Rp Triliun)



Sumber : LBU KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

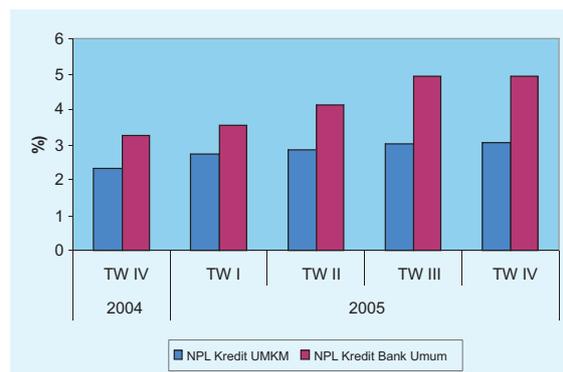
yang ada di Jawa Barat, sebanyak 45 bank (81,81%) memiliki rasio kredit UMKM terhadap total kredit diatas 50%, sedangkan sisanya sebanyak 10 bank (18,18%) memiliki rasio dibawah 50%.

Berdasarkan keragaman kredit tersebut, terlihat bahwa kinerja perbankan di Jawa Barat dalam menyalurkan kredit kepada UMKM sudah cukup baik. Namun demikian, apabila dilihat dari rasio antara jumlah pengusaha UMKM yang telah menerima kredit (2,01 juta debitur) dengan jumlah pengusaha UMKM yang ada di Jawa Barat (7,2 juta), sebesar 27,92%, dapat diasumsikan bahwa masih banyak pengusaha UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan pihak terkait lainnya senantiasa mengupayakan berbagai langkah untuk meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan perbankan (lihat Boks 6. Upaya Pengembangan UMKM).

Sebagaimana pada triwulan sebelumnya, sebagian besar kredit UMKM pada triwulan ini masih disalurkan ke sektor PHR, dengan posisi pada triwulan IV-2005 mencapai Rp8,55 triliun (20,97%). Kredit ke sektor PHR ini, sebagian besar diserap oleh subsektor perdagangan eceran, yang pada triwulan IV-2005 mencapai Rp4,90 triliun (57,39%). Sementara itu, penyaluran kredit UMKM ke sektor industri pengolahan, penyaluran kredit UMKM terbesar kedua setelah kredit UMKM ke sektor PHR, tercatat sebesar Rp4,11 triliun (10,08%). Sebagian besar kredit ke sektor industri pengolahan ini diserap oleh subsektor industri tekstil, sandang, dan kulit, dengan posisi pada triwulan IV-2005 mencapai Rp2,02 triliun (49,21%). Untuk penyaluran kredit UMKM ke sektor-sektor lainnya, rata-rata posisinya masih dibawah Rp1 triliun, termasuk ke sektor pertanian.

Meskipun sebagian besar kredit yang disalurkan oleh bank umum konvensional di Jawa Barat adalah kredit UMKM, rasio NPL

Grafik 3.22. Perkembangan NPL Kredit Bank Umum dan NPL Kredit UMKM



Sumber : LBU KBI Bandung

### BOKS 6. UPAYA PENGEMBANGAN UMKM

Berkaitan dengan pengembangan UMKM di Jawa Barat, Bank Indonesia Bandung dari waktu ke waktu selalu mencari terobosan-terobosan yang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang dapat dibiayai pengembangan usahanya oleh perbankan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Bandung bersama-sama dengan pihak terkait pada triwulan IV-2005 ini adalah melakukan perumusan dan mendesain pola/model pembiayaan untuk mendukung rencana akselerasi pembiayaan UMKM dalam rangka pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan. Implementasi model pembiayaan yang bersifat linkage program ini direncanakan akan dilaksanakan pertama kali oleh PT Bank Jabar bermitra dengan PD BPR. Sementara itu, model yang akan diterapkan adalah pola channeling yang dimodifikasi, yang selain akan dapat memperbesar daya serap kredit, karena model ini tidak akan mempengaruhi modal dan kondisi keuangan PD BPR, juga dapat meminimalisir risiko PT Bank Jabar, karena penerapan pola ini dilengkapi dengan modifikasi persyaratan-persyaratan.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia Bandung bersama-sama dengan P3UKM pada triwulan ini adalah melakukan pengembangan konsep kemitraan antara usaha-usaha produksi tepung tapioka setengah jadi di Kabupaten Ciamis dengan para pengusaha pabrik krupuk udang di Kabupaten Indramayu. Pengembangan konsep kemitraan ini dilatarbelakangi permasalahan adanya monopoli pembelian tepung tapioka di Kabupaten Ciamis, yang dilakukan oleh para tengkulak yang memodali usaha-usaha produksi tepung tapioka setengah jadi, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya harga jual tepung tapioka setengah jadi di kabupaten tersebut. Sementara itu, para pengusaha produsen krupuk udang di Kabupaten Indramayu menghadapi permasalahan kekurangan pasokan bahan baku tepung, karena belum adanya pabrik pengolahan tepung tapioka di Kabupaten Indramayu, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya harga beli tepung tapioka di kabupaten tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Bank Indonesia Bandung bersama-sama dengan P3UKM mendesain suatu pola kemitraan dalam bentuk pembangunan pabrik-pabrik pengolahan tepung tapioka di Kabupaten Indramayu, yang bahan bakunya akan dipasok dari usaha-usaha produksi tepung tapioka setengah jadi di Kabupaten Ciamis. Dengan terwujudnya hal tersebut, jalur distribusi tepung tapioka akan dapat diperpendek (tidak melalui tengkulak),

gross kredit UMKM hanya sebesar 3,06%, lebih rendah dibanding rasio NPL kredit bank umum (4,91%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kredit UMKM relatif lebih baik dibanding kualitas total kredit secara keseluruhan. (Grafik 3.22).

#### 1.1.5. KREDIT EKSPOR

Sebagai upaya mendorong peningkatan ekspor non-migas produk unggulan Jawa Barat, seperti komoditas TPT serta alat angkutan, mesin dan peralatan, bank umum di Jawa Barat cukup berperan dalam membantu pembiayaan ekspor produk-produk tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kredit ekspor sebesar Rp114,87 milyar (5,68%), dari Rp2,02

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

triliun pada triwulan III-2005 menjadi Rp2,14 triliun pada triwulan IV-2005. Kenaikan kredit ekspor ini diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong peningkatan ekspor pada triwulan mendatang.

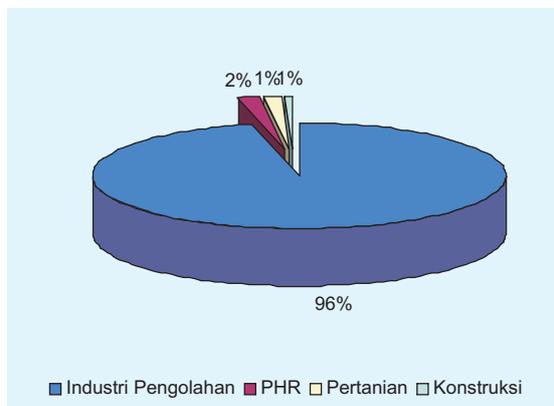
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ekspor masih didominasi penyerapannya oleh sektor industri pengolahan, dengan posisi pada triwulan IV-2005 mencapai Rp2,05 triliun (96,10%) (Grafik 3.23). Adapun sub sektor penyerap

kredit ekspor terbesar pada sektor ini adalah sub-sektor industri tekstil, sandang dan kulit, dengan posisi mencapai Rp1,80 triliun (84,25%). Hal ini tidak terlepas dari peranan komoditas TPT Jawa Barat, yang memang banyak diorientasikan sebagai produk ekspor. Dilihat dari wilayah penyaluran kredit, kredit ekspor ke sub-sektor industri tekstil, sandang dan kulit tersebut terkonsentrasi penyerapannya di Kota Bandung (75,85%).

Sebagaimana pada triwulan-triwulan sebelumnya, berdasarkan distribusi per kabupaten/kota, penyaluran kredit ekspor oleh bank umum konvensional di Jawa Barat masih terkonsentrasi di Kota Bandung, hingga mencapai 91,54% (Grafik 3.24). Terkonsentrasinya penyaluran kredit ekspor ke Kota Bandung ini disebabkan karena 84,25% dari total kredit ekspor yang disalurkan merupakan kredit ke sektor tekstil, sandang dan pakaian, dimana sentra produksi dari industri-industri sektor tersebut banyak yang berlokasi di Bandung dan mengajukan kredit ke bank umum konvensional yang beroperasi di Kota Bandung.

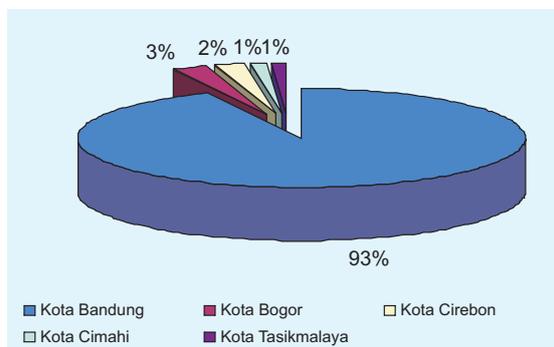
Sementara itu, dilihat dari distribusi rasio NPL per kabupaten/kota, nilai nominal NPL kredit ekspor terbesar terjadi di Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan tingginya penyaluran

Grafik 3.23. Sektor Ekonomi dengan Pangsa Terbesar dalam Penyerapan Kredit Ekspor



Sumber : LBU KBI Bandung

Grafik 3.24. Pangsa Posisi Penyaluran Kredit Ekspor per Kabupaten/Kota



Sumber : LBU KBI Bandung

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

kredit ekspor di kota tersebut. Rasio NPL kredit ekspor di kota Bandung pada triwulan IV-2005 tercatat sebesar 15,46%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya (14,10%), yang menunjukkan relatif masih tingginya resiko penyaluran kredit ekspor di kota tersebut.

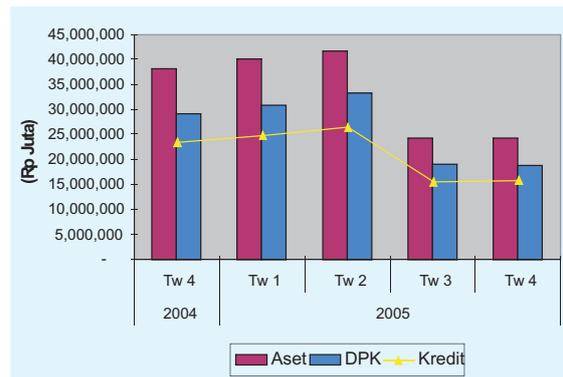
### 1.2. KINERJABANK UMUM YANG BERKANTOR PUSAT DI BANDUNG

Kinerja tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung pada triwulan IV 2005 menunjukkan perkembangan yang positif dan relatif sejalan dengan perkembangan bank umum di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari membaiknya beberapa indikator diantaranya adalah meningkatnya total aset, peran intermediasi perbankan yang tercermin dari LDR, tingkat kesehatan dan membaiknya kualitas kredit yang disalurkan serta meningkatnya pendapatan

bunga bersih/net interest margin (NIM). Namun, dilihat dari sisi penghimpunan dana masyarakat, tujuh bank umum tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Total aset tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung pada triwulan IV-2005 mencapai Rp24,39 triliun, atau mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,71% dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). Kenaikan ini didorong antara lain oleh

Grafik 3.25. Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Umum yang Berkantor Pusat di Bandung



Sumber : LBU KBI Bandung

adanya peningkatan penyaluran kredit pada triwulan berjalan yang tumbuh sebesar 1,02% (qtq) (Grafik 3.25)

Penyaluran kredit oleh tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung adalah sebesar Rp15,78 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 1,02% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp15,62 triliun. Dilihat dari jenis penggunaannya, sebagian besar kredit yang disalurkan masih terkonsentrasi untuk tujuan konsumsi. Kredit yang diberikan kepada usaha produktif adalah sebesar 17,13% dari total kredit (terdiri dari kredit modal kerja sebesar 12,44% dan kredit investasi sebesar 4,69%), sedangkan sisanya adalah kredit yang diberikan untuk tujuan konsumsi.

DPK yang berhasil dihimpun mencapai sebesar Rp18,78 triliun, atau mengalami sedikit penurunan sebesar 1,21% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari total DPK yang

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

dihimpun, sebagian besar merupakan jenis simpanan deposito yaitu sebesar Rp10,13 triliun, kemudian diikuti oleh jenis simpanan giro dan tabungan yaitu masing-masing sebesar Rp6,03 triliun dan Rp2,62 triliun.

Dari sisi peran intermediasi, tujuh bank berkantor pusat di Bandung menunjukkan peningkatan peran intermediasi yang tercermin dari peningkatan LDR sebesar 83,99%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 82,13%.

Peningkatan penyaluran kredit diatas dan beberapa fenomena ekonomi seperti tingginya laju inflasi selama triwulan IV 2005, nampaknya belum berpengaruh terhadap kualitas kredit yang disalurkan oleh tujuh bank berkantor pusat di Bandung. Bahkan, kualitas kredit cenderung meningkat. Nilai NPL pada triwulan ini 0,82%, lebih baik dibandingkan dengan nilai NPL pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,02%.

Selanjutnya, dari sisi profitabilitas (yang tercermin dari NIM), tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung tetap mampu menghasilkan keuntungan walaupun mendapat persaingan yang cukup ketat dari bank umum yang berkantor pusat di luar Bandung dan lembaga keuangan non bank. NIM tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung mengalami peningkatan dari 7,24% menjadi 9,99% pada triwulan IV 2005.

Meskipun demikian, apabila dilihat dari tingkat efisiensi usaha dan rasio ROA, kondisi ekonomi yang terjadi selama triwulan IV 2005 sedikit banyak mempengaruhi tingkat efisiensi usaha dan pencapaian rasio ROA dari tujuh bank yang berkantor pusat di Bandung. Tingkat efisiensi usaha tujuh bank yang berkantor pusat di Bandung sedikit mengalami penurunan yang tercermin dari meningkatnya rasio BOPO dari 75,51% menjadi 78,71%. Sementara itu, rasio ROA mengalami penurunan dari 2,30% menjadi sebesar 2,14%.

Penurunan tingkat efisiensi usaha dan rasio ROA tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap struktur permodalan tujuh bank umum yang berkantor pusat di Bandung. Hal ini terlihat dari nilai CAR yang berada pada kisaran 10,72%-32,94%, masih diatas ketentuan nilai CAR (sebesar 8%) yang diwajibkan oleh Bank Indonesia dan bahkan nilai CAR ini masih lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu pada kisaran 10,35%-30,33%.

### 1.3. BANK UMUM SYARIAH

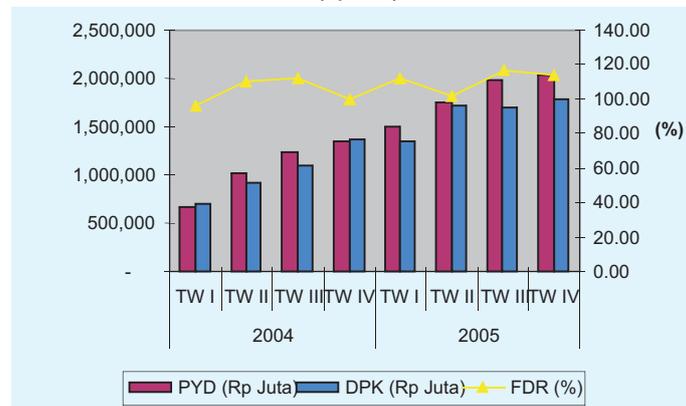
Selama triwulan IV 2005, perbankan syariah di Jawa Barat masih menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana terlihat pada triwulan sebelumnya. Namun

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

demikian, laju pertumbuhan indikator kinerja perbankan syariah cenderung melambat. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya pertumbuhan beberapa indikator utama perbankan syariah seperti total aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dan DPK. Hal ini mengakibatkan nilai financing to deposit ratio (FDR) perbankan syariah mengalami penurunan. Walaupun demikian, kualitas pembiayaan yang diberikan mengalami perbaikan yang tercermin dari menurunnya nilai non-performing financing (NPF).

Total aset perbankan syariah di Jawa Barat pada triwulan ini adalah sebesar Rp2,70

Grafik 3.26. Perkembangan Kegiatan Intermediasi Bank Umum Syariah di Jawa Barat (Rp Juta)



Sumber: LBU KBI Bandung

triliun, atau tumbuh sebesar 0,89% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp2,67 triliun.

Dari sisi pembiayaan yang diberikan (PYD), perbankan syariah di Jawa Barat mencatat nilai sebesar Rp2,03 triliun, atau tumbuh 2,34% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp1,98 triliun. Sedangkan dari sisi DPK yang dihimpun, perbankan syariah di Jawa Barat mencatat nilai sebesar Rp1,78 triliun, atau tumbuh sebesar 4,84% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Rendahnya pertumbuhan PYD dan DPK menyebabkan nilai FDR mengalami sedikit penurunan. Nilai FDR pada triwulan ini adalah sebesar 113,74%, atau turun sebesar 2,38% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 116,51%. Walaupun demikian, nilai FDR perbankan syariah ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai LDR dari bank umum di Jawa Barat.

Dilihat dari kualitas PYD, perbankan syariah di Jawa Barat mengalami perbaikan

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

kualitas PYD yang tercermin dari menurunnya nilai NPF. Pada triwulan IV 2005, nilai NPF adalah sebesar 3,39% lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,58% (Grafik 3.26).

### 1.4. BANK ASING DAN CAMPURAN

Kinerja kelompok Bank Asing dan Bank Campuran (BAC) pada triwulan IV 2005 menunjukkan perkembangan yang positif, walaupun pangsaanya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan bank umum di Jawa Barat. Perkembangan ini terlihat dari membaiknya beberapa indikator seperti meningkatnya total aset, kredit yang disalurkan, DPK, dan LDR.

Total aset BAC pada triwulan IV-2005 mencapai Rp4,59 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 9,14% dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq) sebesar Rp4,211 triliun. Kenaikan ini didorong antara lain oleh adanya peningkatan penyaluran kredit pada triwulan berjalan yang tumbuh sebesar 7,74% (qtq).

Sementara itu, peran intermediasi BAC yang dicerminkan dari nilai LDR, juga menunjukkan peningkatan. Nilai LDR kelompok BAC pada triwulan IV 2005 adalah sebesar 46,61%, atau tumbuh sebesar 2,46% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 44,13%.

Penyaluran kredit BAC adalah sebesar Rp1,85 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,72 triliun. Dilihat dari jenis penggunaannya, sebagian besar kredit tersebut disalurkan untuk tujuan modal kerja dengan nilai sebesar Rp1,45 triliun, sedangkan untuk investasi dan konsumsi masing-masing sebesar Rp0,16 triliun dan Rp0,24 triliun.

Dilihat dari penghimpunan DPK, BAC mencatat nilai sebesar Rp3,98 triliun, atau tumbuh sebesar 2,03% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp3,89 triliun. Pertumbuhan ini lebih ditopang oleh adanya pertumbuhan pada jenis simpanan deposito yang tumbuh sebesar 8,11%, sedangkan untuk jenis simpanan tabungan dan giro masing-masing mengalami penurunan sebesar 17,01% dan 15,44%. Nilai dari jenis simpanan

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

deposito pada kelompok BAC sangat dominan yaitu dengan proporsi sebesar 79,81% atau dengan nilai sebesar Rp3,17 triliun. Sementara nilai untuk jenis simpanan giro dan tabungan masing-masing sebesar 0,55 triliun dan 0,25 triliun.

### 1.5. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pada triwulan IV-2005, jumlah BPR yang beroperasi di Jawa Barat tercatat sebanyak 291 BPR<sup>11</sup>, terdiri dari 278 BPR konvensional dan 13 BPR Syariah. Lokasi kantor BPR tersebut tersebar di wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung sebanyak 177 BPR, KBI Cirebon 67 BPR dan KBI Tasikmalaya 47 BPR, dengan total aset sampai dengan triwulan IV-2005 mencapai Rp3,09 triliun, DPK sebesar Rp2,24 triliun dan kredit yang disalurkan Rp2,16 triliun

Berdasarkan wilayah kerja, total aset BPR di wilayah kerja KBI Bandung tercatat sebesar Rp2,61 triliun, DPK yang dihimpun Rp1,92 triliun, dan kredit yang disalurkan Rp1,80 triliun dengan NPL sebesar 9,86%. Di wilayah kerja KBI Tasikmalaya, total aset tercatat sebesar Rp191 miliar, DPK Rp136 miliar, dan kredit yang disalurkan Rp156 miliar. Sementara di KBI Cirebon total aset tercatat sebesar Rp284 miliar, DPK Rp186 miliar, dan kredit yang disalurkan Rp194 miliar.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para bankir dalam mengelola BPR, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas dan kelembagaan BPR, KBI Bandung sejak April 2005 sampai dengan triwulan IV-2005 telah melakukan pelatihan sertifikasi profesional direktur BPR untuk tujuh angkatan, termasuk pelaksanaan ujian bagi ke-tujuh angkatan tersebut (lihat Boks 7. Program Sertifikasi Profesional Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR)). Selain itu, untuk mendukung pengembangan daya saing BPR,

---

<sup>11</sup>Tidak termasuk wilayah Depok, Bogor dan Bekasi

### BOKS 7. PROGRAM SERTIFIKASI PROFESIONAL DIREKTUR BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Program sertifikasi profesional direktur bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan program kerjasama antara Bank Indonesia dengan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) ProFI, yang bertujuan untuk menciptakan industri BPR yang sehat dan kuat. Melalui program ini, kompetensi dan profesionalisme para bankir dalam mengelola BPR akan semakin meningkat, dan pada gilirannya akan memperkuat kapasitas dan kelembagaan BPR.

Program sertifikasi profesional ini merupakan salah satu kebijakan yang telah disusun dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), di mana kebijakan tersebut sejalan dengan upaya untuk menciptakan landasan kuat guna mendukung proses percepatan penyehatan perbankan nasional yang di dalamnya termasuk BPR. Dengan adanya program ini, akan didapat manfaat yang optimal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Terdapat empat modul utama dalam program sertifikasi tersebut, yakni: Ketrampilan Manajemen BPR, Keahlian Manajemen BPR, Ketrampilan Manajemen Operasional, dan Keahlian Manajemen Strategik. Dua modul pertama merupakan modul wajib bagi calon direktur, sedangkan selebihnya merupakan program wajib bagi direktur BPR. Modul-modul tersebut antara lain mencakup : manajemen akuntansi, manajemen perkreditan, aspek hukum perkreditan, manajemen aset-liabilitas (ALMA), penilaian potensi pasar dan pemasaran produk/jasa, peraturan dan pengawasan ekstern, pengendalian dan pemeriksaan internal, manajemen sumber daya manusia, dan peran pengembangan BPR.

Program pelatihan sertifikasi tersebut wajib diikuti oleh direktur dan calon direktur BPR. Ketentuan sertifikasi ini merupakan ketentuan terkait dengan Kelembagaan dan Ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) BPR.

Ditargetkan pada 31 Desember 2006, 1 direktur dalam setiap BPR telah memiliki sertifikat, sedang pada tahun 31 Desember 2008 ditargetkan seluruh direktur BPR sudah mendapatkan sertifikat, namun apabila pada waktu telah ditentukan tidak terpenuhi maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Khusus untuk BPR baru yang mengajukan permohonan pendirian, calon direktur harus memiliki sertifikat.

khususnya melalui peningkatan infrastruktur BPR, KBI Bandung bersama dengan Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Jawa Barat telah melakukan pembahasan mengenai rencana pembentukan lembaga Apex BPR (lembaga pelindung BPR) di Jawa Barat, yang salah satu fungsinya adalah sebagai Lembaga Dana Penyangga BPR (pooling of funds) untuk membantu BPR mengatasi kesulitan likuiditas karena mismatch.

## 2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Selama triwulan IV-2005, aliran uang kartal di wilayah kerja KBI Bandung menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada bulan Oktober 2005, saat terdapat kenaikan permintaan masyarakat akan barang-barang untuk keperluan lebaran, aliran uang keluar (outflow) dari Bank Indonesia lebih besar daripada aliran uang masuk (inflow). Begitu pula halnya dengan

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

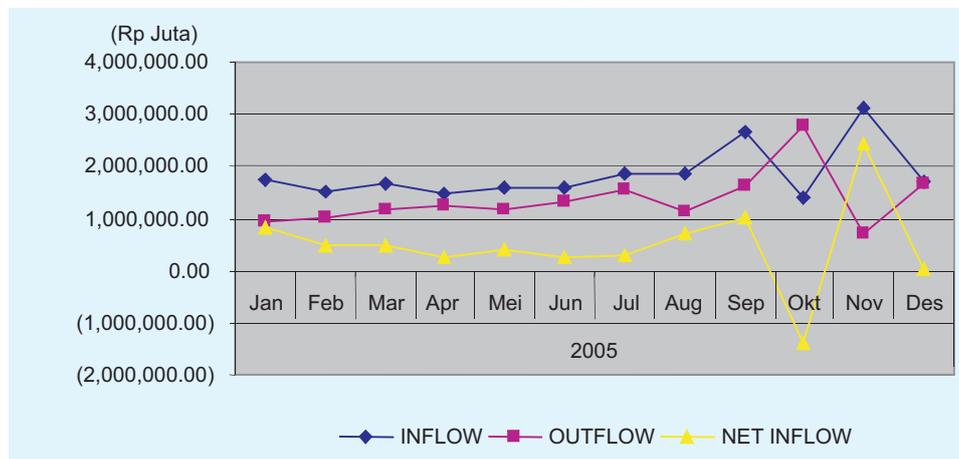
yang terjadi pada bulan Desember 2005, outflow mengalami lagi kenaikan yang relatif tinggi karena hari raya Natal dan Tahun Baru, meskipun secara keseluruhan posisinya masih net inflow (inflow lebih besar daripada outflow).

Sementara itu, transaksi pembayaran antarbank yang diselesaikan melalui sistem pembayaran non-tunai pada triwulan ini, mengalami penurunan, seiring dengan menurunnya aktivitas perekonomian yang dilakukan dunia usaha dan masyarakat pada triwulan IV-2005, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, akibat kenaikan harga BBM, tingginya suku bunga dan penurunan daya beli.

### 2.1. PENGEDARAN UANG KARTAL

Sebagaimana yang terjadi pada triwulan-triwulan sebelumnya, pada triwulan IV-2005 kegiatan pengedaran uang kartal melalui KBI Bandung masih menunjukkan posisi net inflow (Grafik 3.27). Nilai nominal uang kartal yang masuk ke KBI Bandung (inflow) pada triwulan ini

Grafik 3.27 . Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal di Wilker KBI Bandung



Sumber: KBI Bandung

tercatat Rp6,23 triliun, turun 2,33% dibandingkan inflow triwulan sebelumnya (Rp6,38 triliun). Sementara itu, nilai nominal uang kartal yang keluar dari KBI Bandung (outflow) meningkat dari Rp4,35 triliun pada triwulan III-2005 menjadi Rp5,18 triliun pada triwulan IV-2005, tumbuh signifikan 18,12%. Namun demikian, secara keseluruhan posisi pengedaran uang

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

kartal KBI Bandung pada triwulan IV-2005 masih mengalami net inflow sebesar Rp1,06 triliun.

Tabel 3.3. Perkembangan Outflow Uang Kertas dan Uang Logam Di Wilker KBI Bandung

Jenis Pecahan	Tw III-2005		Tw IV-2005		Pertumbuhan (%)	
	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/ Keping	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/ Keping	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/ Keping
Uang Kertas						
100,000	1,986,260.00	19.86	2,331,619.80	23.32	17.39	17.39
50,000	2,097,790.00	41.96	2,530,798.75	50.62	20.64	20.64
20,000	100,970.00	5.05	120,443.30	6.02	19.29	19.29
10,000	23,370.00	2.34	57,912.74	5.79	147.81	147.81
5,000	115,040.00	23.01	104,919.83	20.98	-8.80	-8.80
1,000	21,700.00	21.70	25,514.71	25.51	17.58	17.58
<b>Total</b>	<b>4,345,130.00</b>	<b>113.91</b>	<b>5,171,209.13</b>	<b>132.24</b>	<b>19.01</b>	<b>16.09</b>
Uang Logam						
1,000	230.00	0.23	500.00	0.50	117.39	117.39
500	4,300.00	8.60	3,039.52	6.08	-29.31	-29.31
200	360.00	1.80	360.90	1.80	0.25	0.25
100	110.00	1.10	289.03	2.89	162.75	162.75
50	40.00	0.80	46.50	0.93	16.25	16.25
25	0.02	0.00	0.51	0.02	2450.00	2450.00
<b>Total</b>	<b>5,040.02</b>	<b>12.53</b>	<b>4,236.46</b>	<b>12.22</b>	<b>-15.94</b>	<b>-2.45</b>

Sumber: KBI Bandung

Selama triwulan IV-2005, uang kertas yang keluar (outflow) sebanyak 132,24 juta bilyet (Rp5,17 triliun) dan uang logam sebanyak 12,22 juta keping (Rp4,24 miliar). Dibandingkan dengan triwulan III-2005, secara nominal, uang kertas yang keluar (outflow) tumbuh 19,01%, sedangkan uang logam menurun 15,94%.

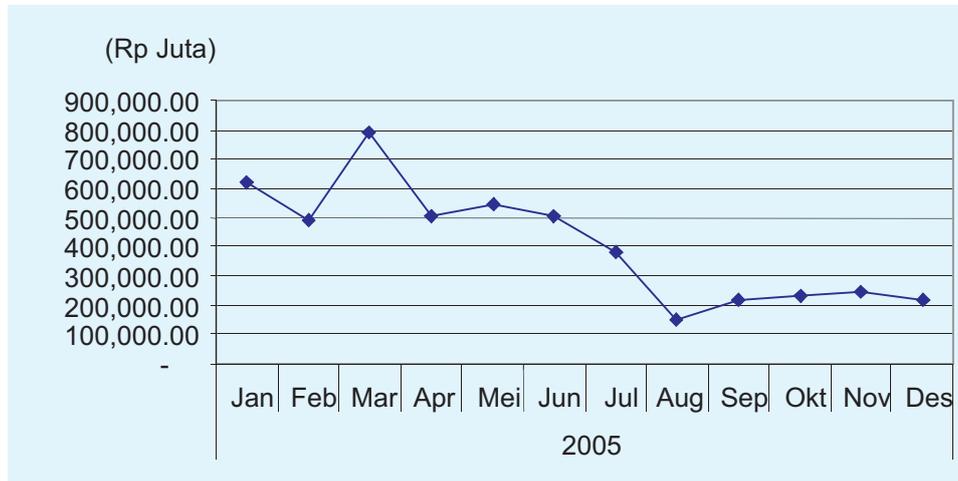
Berdasarkan nilai pecahannya, dibandingkan dengan triwulan III-2005, permintaan uang kertas dan logam yang mengalami peningkatan relatif tinggi (di atas 100%) adalah pecahan uang kertas Rp10.000,- dan uang logam Rp100,- serta Rp1.000,- (Tabel 3.3).

### 2.2. PENYEDIAAN UANG KARTAL LAYAK EDAR

Dalam rangka memelihara kualitas uang yang diedarkan di masyarakat (clean money

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Grafik. 3.28. Perkembangan PTTB di KBI Bandung



Sumber: KBI Bandung

policy), KBI Bandung secara berkala melakukan pemusnahan atau kegiatan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) terhadap uang yang sudah tidak layak edar (lusuh/rusak). Pada triwulan IV-2005, jumlah uang kartal yang tidak layak edar dan telah dimusnahkan di KBI Bandung sebesar Rp0,69 triliun, menurun 7,09% dibandingkan jumlah PTTB triwulan III-2005 sebesar Rp0,75 triliun. Sementara itu, rasio PTTB terhadap inflow pada triwulan IV-2005 sebesar 11,13%, menurun 4,88% dibandingkan rasio triwulan III-2005 sebesar 11,70%. Hal ini mengindikasikan semakin pahamnya masyarakat bagaimana memperlakukan uang dengan baik.

### 2.3. PENUKARAN UANG PECAHAN KECIL

Sebagai suatu upaya untuk menjamin tersedianya uang dalam jumlah nominal yang cukup dan jenis pecahan yang sesuai, KBI Bandung menyediakan loket penukaran uang dan bekerja sama dengan Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil (PPUPK) dalam menyalurkan uang pecahan kecil kepada masyarakat luas. Daerah operasional PPUPK tersebut meliputi wilayah Sukabumi, Subang, Garut, Sumedang, Cianjur, dan Purwakarta. Dengan tersedianya fasilitas penukaran tersebut, masyarakat dapat menukarkan uangnya dengan uang pecahan kecil yang diinginkan tanpa dipungut biaya.

Pada triwulan IV-2005, nilai uang yang telah ditukarkan oleh PPUPK kepada masyarakat sebesar Rp31 miliar. Berdasarkan jenis pecahannya, uang kertas yang paling banyak ditukarkan adalah pecahan Rp5.000,- mencapai nilai Rp26,04 miliar (83,71%),

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

sementara untuk uang logam adalah pecahan Rp500,- senilai Rp0,51 miliar (1,65%).

### 2.4. LALU LINTAS PEMBAYARAN NON TUNAI

Tabel 3.4. Perkembangan Penyelesaian Transaksi Pembayaran Melalui Kliring Lokal dan RTGS di Jawa Barat Triwulan IV-2005 (Rp Triliun)

Setelmen	2004	2005		Pertumbuhan	
	Tw. IV	Tw. III	Tw. IV	qtq	yoy
Kliring Lokal					
Nominal	29.4	34.81	21.99	-36.83	-25.20
Volume	1,894,795	2,240,722	1,173,851	-47.61	-38.05
RTGS					
Nominal	28.75	34.89	34.52	-1.06	20.07
Volume	29,361	30,924	27,545	-10.93	5.32
Total					
Nominal	58.15	69.7	56.51	-18.92	-2.82
Volume	1,924,156	2,271,646	1,201,396	-47.11	-37.56

Sumber: KBI Bandung

Transaksi pembayaran non-tunai yang diselesaikan melalui kliring pada triwulan IV-2005 mengalami penurunan, baik secara nominal maupun volume dibandingkan dengan triwulan III-2005. Begitu pula dengan transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui sistem RTGS, mengalami pula penurunan, meskipun secara tahunan mengalami kenaikan. Penurunan transaksi melalui kliring dan RTGS tersebut seiring dengan menurunnya aktivitas perekonomian yang dilakukan dunia usaha dan masyarakat pada triwulan IV-2005, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, akibat kenaikan harga BBM, tingginya suku bunga dan penurunan daya beli.

### 2.5. UANG PALSU

Jumlah temuan uang rupiah palsu pada triwulan IV-2005 meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2005. Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas Rp50.000,- emisi tahun 1999 merupakan jenis uang terbanyak yang dipalsukan, yakni 671 lembar atau 55,92% dari total temuan uang palsu. Untuk mengurangi peredaran uang palsu tersebut, KBI Bandung terus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada kalangan perbankan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum; serta

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

menyediakan sarana informasi kepada masyarakat dalam bentuk hotline service.

### 2.6. PEMBELIAN/PENJUALAN UANG KERTAS ASING OLEH PEDAGANG VALUTA ASING

Pada triwulan IV-2005, berdasarkan data dari 14 Pedagang Valuta Asing (PVA) di wilayah Bandung dan sekitarnya, nilai pembelian Uang Kertas Asing (UKA) dan Traveller's Cheque (TC) sebesar USD 104 juta, menurun 16,13% dibandingkan pembelian pada triwulan III-2005 (sebesar USD124 juta). Sementara itu, penjualan UKA dan TC sebesar USD113 juta, juga menurun 8,87% dibandingkan penjualan pada triwulan III-2005 (sebesar USD124 juta). Penurunan yang signifikan dari pembelian dan penjualan UKA dan TC tersebut salah satunya disebabkan oleh beralihnya minat masyarakat dalam berinvestasi, di mana mereka lebih tertarik untuk menabung dalam denominasi rupiah terkait dengan tingginya suku bunga belakangan ini

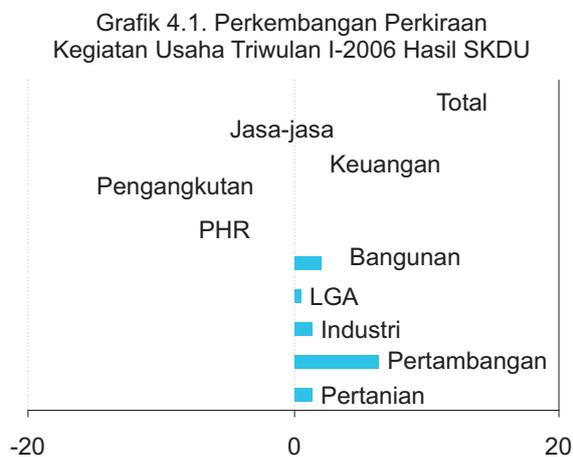
# BAB 4

## PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

### 1. PROSPEK EKONOMI MAKRO

Pada triwulan I-2006, perekonomian Jawa Barat diperkirakan tumbuh positif, terutama didorong oleh berlangsungnya masa panen raya pada sektor pertanian. Sektor pertanian yang memiliki pangsa sekitar 13% terhadap PDRB diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif dengan berlangsungnya masa panen raya produk tabama, yaitu padi. Kegiatan yang berlangsung dalam rangka masa panen ini akan mempengaruhi kegiatan di sektor perdagangan dan sektor pengangkutan.

Meskipun demikian, secara umum kegiatan usaha di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan sektor pengangkutan justru akan mengalami penurunan karena



kembalinya permintaan di kedua sektor ini pada kondisi normal setelah pada triwulan IV-2005 mengalami peningkatan sehubungan dengan berlangsungnya perayaan hari besar keagamaan (hari raya Idul Fitri, Natal dan tahu baru). Peningkatan kegiatan yang terjadi di sektor PHR dan sektor pengangkutan terkait dengan masa panen raya tidak terjadi secara langsung karena produk tabama tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk siap diperdagangkan di pasar.

Hal tersebut sejalan dengan hasil SKDU yang menyatakan bahwa hampir seluruh sektor diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Hanya ada dua sektor yang diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor pengangkutan dan sektor PHR (Grafik 4.1).

Hasil SKDU menunjukkan bahwa sektor industri, sektor bangunan dan sektor

## PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

keuangan akan mengalami pertumbuhan positif terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan, yang diindikasikan oleh adanya peningkatan pesanan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Meskipun demikian, pertumbuhan di sektor industri dan bangunan diperkirakan tidak terlalu tinggi mengingat awal tahun biasanya merupakan masa persiapan penyusunan target dan strategi kebijakan perusahaan. Terlebih lagi kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat secara relatif belum pulih seperti sediakala.

Berkaitan dengan kenaikan harga BBM pada awal triwulan IV-2005, sebagian besar pelaku usaha menyatakan akan meningkatkan harga jual produknya pada triwulan I-2006 karena adanya kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional. Hal ini akan mengakibatkan beban konsumen semakin meningkat mengingat tingginya inflasi IHK yang sudah terjadi.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2006 diperkirakan masih didukung konsumsi dan investasi. Investasi, baik dalam bentuk penambahan barang modal maupun penggantian mesin, diperkirakan masih terus berlangsung didorong oleh tingginya pertumbuhan kredit investasi yang disalurkan dan tingginya persetujuan nilai investasi PMA/PMDN pada tahun 2005 yang lalu. Sementara konsumsi masih dominan karena adanya perbaikan pendapatan masyarakat dampak dari penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai dan penyesuaian gaji karyawan dan Upah Minimum Regional.

Di sisi keuangan pemerintah, pengeluaran pemerintah pada triwulan I-2006 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2005 terkait dengan belum cairnya dana anggaran untuk proyek-proyek. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di triwulan I-2006 sebagian besar merupakan pengeluaran rutin untuk administrasi pegawai.

Di sisi tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan dapat mengalami sedikit penurunan. Daya serap tenaga kerja di beberapa industri pada sektor industri pengolahan diperkirakan mengalami penurunan, antara lain di industri TPT, industri kertas dan barang cetakan, serta industri barang kayu. Daya serap tenaga kerja di sektor bangunan/konstruksi, yang pada triwulan-triwulan sebelumnya mengalami peningkatan,

pada triwulan mendatang diperkirakan akan mulai mendatar. Peningkatan daya serap tenaga kerja diperkirakan juga terjadi pada subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor tabama yang dipengaruhi oleh faktor musiman (masa panen).

2. PERKIRAAN INFLASI

Laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada triwulan I-2006 diperkirakan sebesar 2-3% (qtq), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2005. Perlambatan disebabkan oleh mulai meredanya dampak kenaikan harga BBM tahun 2005 terhadap kenaikan harga barang dan jasa.

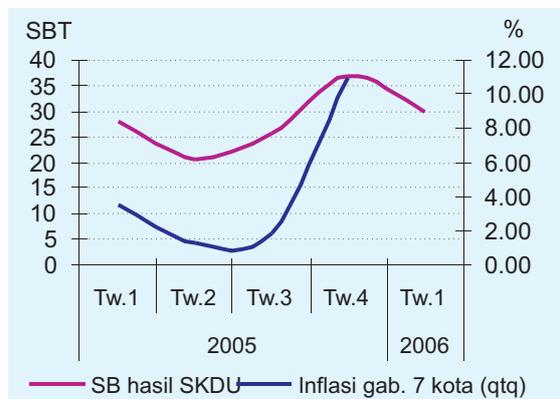
Faktor determinan inflasi pada triwulan I diperkirakan berasal dari volatile foods yakni bahan makanan. Harga bahan makanan khususnya beras terus mengalami kenaikan sejak pertengahan Desember 2006. Namun demikian, tekanan inflasi terhadap harga beras akan berkurang seiring panen raya pada bulan Februari dan Maret 2006 dan adanya impor beras seperti yang telah direncanakan pemerintah.

Dari sisi permintaan, tekanan diperkirakan berasal dari kenaikan gaji PNS/TNI/polri rata-rata 15% serta penyaluran dana BLT (bantuan langsung tunai) tahap II kepada masyarakat miskin, yang rencananya akan direalisasikan pemerintah pada triwulan I-2006. Namun, peningkatan pendapatan masyarakat tersebut, diperkirakan tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap inflasi, mengingat daya beli sebagian besar masyarakat telah mengalami penurunan sejak tahun sebelumnya.

Perkiraan inflasi pada triwulan I-2006 tersebut di atas didukung oleh hasil beberapa survei yang dilaksanakan KBI Bandung, yaitu SKDU, SK, dan SPE, di bawah ini.

Hasil SKDU mengindikasikan ekspektasi pengusaha bahwa harga-harga masih akan meningkat meski tidak akan setinggi triwulan IV-2005. Hal tersebut tercermin dari penurunan angka saldo bersih tertimbang (SBT) dari 36,96 menjadi 29,79 (Grafik 4.2). Dari sembilan sektor ekonomi

Grafik 4.2. Perkembangan Harga Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha dan Inflasi Aktual Tahunan di Jawa Barat



Sumber: Hasil SKDU KBI Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

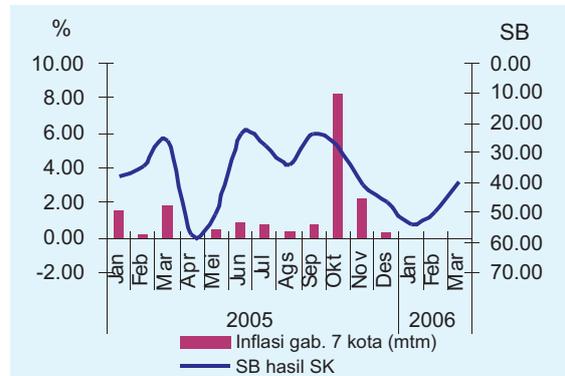
## PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

yang disurvei, semua sektor diperkirakan mengalami peningkatan harga jual. Penyumbang terbesar kenaikan harga berasal dari sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri pengolahan.

Sebagian besar responden SK memperkirakan bahwa masih akan terjadi kenaikan harga barang/jasa pada triwulan I-2006 (Grafik 4.3). Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih untuk yang masih dibawah 100, yang berarti bahwa responden masih pesimis terhadap kondisi harga barang dan jasa secara umum pada triwulan I-2006. Namun, jumlah responden yang memperkirakan harga akan naik pada periode Januari lebih sedikit dibandingkan bulan Februari dan Maret 2006.

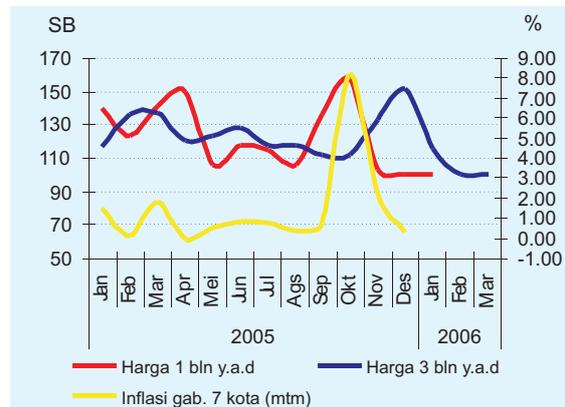
Seperti halnya SKDU da SK, SPE juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda.

Grafik 4.3. Perkembangan Ekspektasi Konsumen terhadap Harga



Sumber: Survei Konsumen-BI Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Grafik 4.4. Perkembangan Ekspektasi Pedagang Eceran terhadap Harga dan Perkembangan Inflasi Bulanan Aktual Gabungan Tujuh Kota Di Jawa Barat



Sumber: Survei Konsumen-KBI Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Hasil SPE menunjukkan bahwa mayoritas responden memperkirakan bahwa harga barang secara umum pada bulan Oktober-Desember 2005 akan naik (indeks SB masing-masing di atas 100) dengan kecenderungan yang meningkat (Grafik 4.4).

### 3. PROSPEK PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Pada triwulan I-2006, fungsi intermediasi perbankan di Jawa Barat diperkirakan

mengalami peningkatan. DPK yang berhasil dihimpun dan penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat, masih akan tetap tumbuh. Suku bunga, merupakan salah satu faktor utama peningkatan DPK pada triwulan I-2006.

Meskipun lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penyaluran kredit dalam triwulan I 2006 akan dimulai melambat. Sementara itu, sektor UMKM yang cenderung dapat bertahan pada masa-masa krisis akan tetap menjadi pilihan utama perbankan dalam menyalurkan kreditnya, termasuk perbankan syariah.

Kendala utama penyaluran kredit pada triwulan I-2006 diperkirakan terkait dengan relatif masih tingginya suku bunga kredit, iklim usaha belum kondusif, dan melemahnya daya serap dunia usaha. Kendala lainnya yang akan dihadapi perbankan dalam jangka pendek kedepan, adalah relatif tingginya tingkat NPLs rata-rata perbankan, menurunnya keuntungan dan meningkatnya beban biaya operasional. NPLs diperkirakan akan mengalami peningkatan, karena penurunan kemampuan debitur untuk membayar cicilan. Penurunan kemampuan mengangsur tersebut antara lain disebabkan penghasilan debitur berpenghasilan tetap akan lebih banyak digunakan untuk konsumsi karena kenaikan harga BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya.

Kondisi sistem pembayaran di Jawa Barat pada triwulan I-2006, diperkirakan akan mengalami peningkatan volume dan nominal transaksi tunai maupun non tunai. Peningkatan terkait dengan kenaikan UMR dan pembayaran uang muka dari berbagai kegiatan ekonomi, termasuk aliran dana untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah pada tahun 2006.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**  
**This page is intentionally blank**

LAMPIRAN

# LAMPIRAN

## 1. DATA EKONOMI MAKRO

Tabel 1.A. PDRB Sisi Produksi Harga Konstan Tahun Dasar 1993 (Rp Miliar)

NAMA SEKTOR	2004*				2005*			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
1. Pertanian	2,032	2,047	2,107	2,068	2,283	2,102	2,115	2,099
2. Pertambangan	721	721	728	741	731	737	737	734
3. Industri Pengolahan	6,300	6,289	6,414	6,576	6,646	6,757	6,764	6,806
4. Listrik, Gas, Air Bersih	537	554	574	582	573	561	562	570
5. Bangunan/Konstruksi	580	585	593	608	621	647	650	651
6. Perdagangan, Hotel	3,059	2,759	2,804	2,894	3,003	3,034	3,102	3,129
7. Pengangkutan & Kom.	912	961	1,002	1,042	1,018	1,025	1,031	1,051
8. Keuangan	790	805	817	844	851	852	883	873
9. Jasa Jasa	1,588	1,579	1,607	1,658	1,688	1,712	1,735	1,759
<b>PDRB</b>	<b>16,519</b>	<b>16,300</b>	<b>16,646</b>	<b>17,013</b>	<b>17,414</b>	<b>17,427</b>	<b>17,579</b>	<b>17,672</b>

\* Angka Perkiraan

Tabel 1.B. Pertumbuhan PDRB triwulanan (%)

NAMA SEKTOR	2004*				2005*			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
1. Pertanian	3.88	0.75	2.67	-1.84	10.65	-7.95	0.64	-0.79
2. Pertambangan	-3.54	0.10	0.69	1.69	-1.05	0.84	0.01	-0.38
3. Industri Pengolahan	-3.11	-0.18	1.74	2.52	1.31	1.68	0.10	0.62
4. Listrik, Gas, Air Bersih	-1.15	3.23	3.32	1.45	-1.25	-2.14	0.13	1.45
5. Bangunan/Konstruksi	-1.19	0.73	1.25	2.45	0.70	2.60	0.48	0.25
6. Perdagangan, Hotel	7.59	-9.82	1.38	3.23	4.01	0.70	2.24	0.86
7. Pengangkutan & Kom.	-3.15	5.36	4.01	4.02	-2.04	0.66	0.61	1.92
8. Keuangan	2.63	1.86	1.25	3.35	0.96	3.72	3.66	-1.12
9. Jasa Jasa	1.77	-0.57	1.55	3.16	2.70	0.79	1.36	1.40
<b>PDRB</b>	<b>0.41</b>	<b>-1.33</b>	<b>1.88</b>	<b>2.20</b>	<b>2.60</b>	<b>0.07</b>	<b>0.88</b>	<b>0.53</b>

\* Angka Perkiraan

Tabel 1.C. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Klasifikasi SITC (USD Juta)

NAMA KELOMPOK	2004				2005			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	71	83	87	93	84	100	94	91
1 - BEVERAGES AND TOBACCO	1	1	2	1	2	2	2	2
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	52	64	71	71	73	72	69	78
3 - MINERAL FUELS, LUBRICANTS ETC	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS & FATS	11	11	12	12	11	12	10	12
5 - CHEMICAL	299	213	206	211	253	233	212	235
6 - MANUFACTURED GOODS	991	1,037	1,056	965	1,089	1,088	1,075	1,056
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	1,403	1,323	1,562	1,111	1,385	1,465	1,528	1,581
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	744	823	895	725	785	782	860	755
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3,577</b>	<b>3,556</b>	<b>3,890</b>	<b>3,189</b>	<b>3,683</b>	<b>3,755</b>	<b>3,849</b>	<b>3,811</b>

Tabel 1.D. Volume Ekspor Nonmigas Menurut Klasifikasi SITC (ribu ton)

NAMA KELOMPOK	2004				2005			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	91	110	65	50	54	59	63	57
1 - BEVERAGES AND TOBACCO	4	4	4	4	5	5	4	4
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	60	68	62	63	67	72	73	78
3 - MINERAL FUELS,LUBRICANTS ETC	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS&FATS	24	21	27	30	26	27	24	28
5 - CHEMICAL	385	205	164	155	206	199	190	194
6 - MANUFACTURED GOODS	1,521	1,646	1,797	1,451	1,603	1,449	1,487	1,409
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	159	136	154	117	138	139	160	150
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	123	122	125	103	120	124	122	109
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2,367</b>	<b>2,313</b>	<b>2,399</b>	<b>1,973</b>	<b>2,218</b>	<b>2,074</b>	<b>2,124</b>	<b>2,029</b>

Tabel 1.E. Nilai Impor Nonmigas Menurut Klasifikasi SITC (USD Juta)

NAMA KELOMPOK	2004				2005			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	0	0	0	0	0	0	0	1
1 - BEVERAGES AND TOBACCO	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	10	2	7	11	8	14	26	13
3 - MINERAL FUELS,LUBRICANTS ETC	0	0	0	0	0	0	0	1
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS&FATS	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - CHEMICAL	5	2	3	10	7	9	11	38
6 - MANUFACTURED GOODS	9	6	7	19	17	35	18	17
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	144	99	120	174	151	260	264	165
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	18	4	3	9	3	5	5	13
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>223</b>	<b>187</b>	<b>325</b>	<b>323</b>	<b>247</b>

Tabel 1.F. Volume Impor Nonmigas Menurut Klasifikasi SITC (ribu ton)

NAMA KELOMPOK	2004				2005			
	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	0	0	0	0	0	1	0	0
1 - BEVERAGES AND TOBACCO	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	21	4	13	28	31	49	60	36
3 - MINERAL FUELS,LUBRICANTS ETC	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS&FATS	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - CHEMICAL	4	2	2	7	9	9	9	5
6 - MANUFACTURED GOODS	14	9	12	15	17	38	27	17
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	17	10	14	22	21	27	27	20
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	3	2	1	2	1	1	2	1
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>79</b>

## LAMPIRAN

Tabel 1.G. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemprov Jabar (Rp Miliar)

Uraian	2004			2005				
	T.3	T.4	Total	T.1	T.2	T.3*	T.4**	Total
Pendapatan	1,084	1,129	4,044	977	1,319	1,277	953	4,527
Pendapatan Asli Daerah	801	725	2,847	777	1,011	976	737	3,501
Dana Perimbangan	283	405	1,198	200	308	302	216	1,025
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja	964	1,418	3,671	318	1,005	837	1,070	3,229
Belanja Aparatur	270	363	1,029	179	287	311	388	1,164
Belanja Publik	135	409	1,000	45	153	239	218	655
Belanja bagi hasil & bantuan keuangan	526	635	1,571	94	564	268	463	1,389
Belanja tidak terduga	33	11	71	0	1	19	0	21
Surplus/Defisit	120	-289	374	659	314	440	-117	1,297
Pembiayaan	92	-956	-374	-100	-5	0	0	-105
Penerimaan pembiayaan	53	21	668	0	0	0	0	0
Pengeluaran pembiayaan	-39	977	1,042	100	5	0	0	105

## 2. DATA INFLASI

Tabel 2.A. Perkembangan Laju Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Bulanan			Triwulanan	Tahunan
		Okt '05	Nov '05	Des '05	(qtq)	(yoy)
1	Bahan makanan	7.13	1.70	-0.96	7.91	14.37
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2.24	8.28	1.04	11.87	18.61
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	8.13	0.59	0.83	9.67	14.48
4	Sandang	1.01	0.42	0.77	2.22	6.15
5	Kesehatan	1.43	0.59	0.56	2.61	8.73
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.96	0.27	0.16	1.39	7.71
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	26.68	0.29	0.05	27.10	47.40
Umum		8.21	2.26	0.29	10.97	18.51

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Tabel 2.B. Perkembangan Laju Inflasi di Tujuh Kota di Jawa Barat (%)

No.	Kelompok	Bulanan			Triwulanan	Tahunan
		Okt '05	Nov '05	Des '05	(qtq)	(yoy)
1	Bandung	8.22	3.37	0.63	12.56	19.56
2	Bekasi	6.38	2.10	0.36	9.00	16.88
3	Bogor	10.46	0.42	0.05	10.98	18.47
4	Sukabumi	11.28	1.59	-1.87	10.94	19.11
5	Cirebon	9.30	1.39	-0.42	10.35	16.82
6	Tasikmalaya	9.44	0.24	0.63	10.39	20.83
7	Banjar	8.84	3.07	-1.26	10.78	22.04
Umum		8.21	2.26	0.29	10.97	18.51

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

## LAMPIRAN

Tabel 2.C. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Bulan Oktober 2005 di Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	
1	Bahan makanan	6.40	5.28	7.72	17.34	9.18	9.00	12.44	7.13
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0.39	2.26	6.44	3.96	0.47	3.54	2.29	2.24
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	7.66	6.80	9.31	10.68	14.02	11.66	14.75	8.13
4	Sandang	1.37	0.52	0.82	-0.18	0.69	2.99	4.01	1.01
5	Kesehatan	1.53	1.83	1.19	0.13	0.43	0.15	1.74	1.43
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	2.23	0.10	0.36	0.00	0.00	2.05	-12.12	0.96
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	29.00	20.28	32.22	25.76	26.49	31.20	22.98	26.68
Umum		8.22	6.38	10.46	11.28	9.30	9.44	8.84	8.21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Tabel 2.D. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Bulan November 2005 di Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	
1	Bahan makanan	3.48	0.48	0.43	0.89	1.34	-1.11	3.58	1.70
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	12.92	8.07	1.45	4.36	3.71	1.25	6.42	8.28
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0.23	0.81	0.92	1.34	0.74	0.48	1.27	0.59
4	Sandang	-0.14	1.19	0.23	0.50	0.39	0.01	0.95	0.42
5	Kesehatan	0.31	0.91	0.83	0.17	0.53	0.39	0.14	0.59
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.85	1.09	-3.27	0.98	1.59	0.21	0.39	0.27
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0.46	0.32	-0.18	0.42	-0.01	0.37	-0.13	0.29
Umum		3.37	2.10	0.42	1.59	1.39	0.24	3.07	2.26

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Tabel 2.E. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Bulan Desember 2005 di Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	
1	Bahan makanan	-1.23	0.59	-0.94	-6.07	-1.33	-0.25	-5.17	-0.96
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2.26	0.36	-0.03	-0.13	-0.47	0.96	-0.02	1.04
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	1.46	0.53	0.01	0.00	0.14	1.39	0.32	0.83
4	Sandang	0.94	0.80	0.42	0.50	0.15	1.28	0.82	0.77
5	Kesehatan	0.43	0.82	0.08	1.96	0.02	0.60	0.14	0.56
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.06	0.00	0.64	0.38	0.00	0.58	0.18	0.16
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-0.05	-0.38	1.06	0.08	-0.02	-0.03	-0.23	0.05
Umum		0.63	0.36	0.05	-1.87	-0.42	0.63	-1.26	0.29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

## LAMPIRAN

Tabel 2.F. Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) di Tujuh Kota di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Pada Triwulan IV-2005

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Bgr	Skbm	Cn	Tsm	Bjr	
1	Bahan makanan	8.75	6.41	7.16	11.20	9.17	7.51	10.44	7.91
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	15.91	10.91	7.96	8.35	3.71	5.84	8.83	11.87
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	9.49	8.23	10.33	12.17	15.03	13.75	16.57	9.67
4	Sandang	2.17	2.53	1.47	0.82	1.24	4.31	5.86	2.22
5	Kesehatan	2.28	3.60	2.12	2.26	0.98	1.14	2.02	2.61
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	3.16	1.19	-2.30	1.36	1.59	2.86	-11.62	1.39
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	29.52	20.20	33.38	26.38	26.45	31.64	22.53	27.10
Umum		12.56	9.00	10.98	10.94	10.35	10.39	10.78	10.97

### 3. DATA PERBANKAN

Tabel 3.A. Indikator Kinerja Bank Umum di Jawa Barat (Rp Triliun) Bank Umum Konvensional

Pos Tertentu	2004				2005				Pertumbuhan	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	y-o-y	q-t-q
Total Aset	82.93	87.11	87.40	92.06	91.14	95.73	99.77	103.41	12.33	3.65
DPK	68.77	71.19	70.46	72.31	70.89	74.90	79.32	83.54	15.53	5.32
Kredit bank pelapor	33.77	35.65	37.79	40.65	41.86	45.45	48.94	50.52	24.28	3.24
Kredit lokasi proyek	71.13	75.97	79.01	83.40	86.32	91.77	95.67	98.32	20.33	0.03
LDR (%)	49.11	50.08	53.63	56.22	59.05	60.68	61.69	60.48	7.58	-1.98
Rasio NPL (%)	4.56	4.15	3.68	3.25	3.54	4.12	4.95	4.95	52.41	0.17

Bank Umum Syariah (RpTriliun)

No.	Keterangan	2004				2005				Pertumbuhan	
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	yoy	qtq
1	Aset	0.98	1.36	1.69	1.93	2.01	2.44	2.67	2.70	39.63	0.89
2	Pembiayaan	0.67	1.01	1.23	1.36	1.51	1.75	1.98	2.03	49.33	2.34
3	Dana Pihak Ketiga	0.70	0.92	1.10	1.36	1.35	1.71	1.70	1.78	31.13	4.84
4	FDR (%)	96.50	110.52	112.43	99.87	111.56	101.87	116.51	113.74	13.89	-2.38

## LAMPIRAN

Tabel 3.B. DPK, Kredit, dan NPLs Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Rp Juta)

KABUPATEN/KOTA	DPK	KREDIT	LDR	NPL	
				NOMINAL	%
Kab. Tasikmalaya	88,020	219,008	248.82	16,816	7.68
Kab. Majalengka	131,887	312,621	237.04	563	0.18
Kab. Ciamis	181,322	384,153	211.86	7,290	1.90
Kab. Kuningan	242,737	367,864	151.55	3,426	0.93
Kab. Garut	703,843	1,021,651	145.15	28,233	2.76
Kab. Subang	608,652	864,651	142.06	25,974	3.00
Kab. Sumedang	514,423	728,722	141.66	18,225	2.50
Kab. Purwakarta	735,333	1,037,609	141.11	52,273	5.04
Kota Banjar	283,041	397,956	140.60	14,704	3.69
Kab. Indramayu	600,112	697,756	116.27	21,540	3.09
Kota Tasikmalaya	1,956,317	2,010,358	102.76	66,754	3.32
Kab. Cianjur	944,743	890,147	94.22	12,117	1.36
Kab. Bandung	1,024,057	885,184	86.44	33,720	3.81
Kab. Bekasi	3,205,427	2,597,751	81.04	55,189	2.12
Kota Cimahi	1,245,093	913,262	73.35	12,506	1.37
Kab. Sukabumi	617,591	449,325	72.75	11,189	2.49
Kota Cirebon	4,497,185	3,246,946	72.20	160,047	4.93
Kota Sukabumi	1,466,497	1,043,562	71.16	24,290	2.33
Kab. Bogor	1,187,802	792,023	66.68	8,014	1.01
Kota Bekasi	2,090,062	1,392,213	66.61	20,330	1.46
Kab. Karawang	2,096,971	1,169,197	55.76	29,769	2.55
Kota Bandung	47,751,459	24,986,878	52.33	1,666,017	6.67
Kota Bogor	8,613,187	3,448,826	40.04	177,705	5.15
Kota Depok	2,752,375	662,501	24.07	15,178	2.29
Jawa Barat	83,538,136	50,520,164	60.48	2,481,869	4.91

## LAMPIRAN

Tabel 3.C. Penyaluran Kredit UMKM per Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode Desember 2005 (Rp Juta)

No.	Kabupaten/Kota	NPL			NPL UMKM	Kredit UMKM	NPL UMKM (%)
		Kredit Mikro	Kredit Kecil	Kredit Menengah	Nominal		
1	Kota Bandung	205,757	130,882	284,091	620,730	17,153,641	3.62
2	Kota Cirebon	36,349	20,430	30,285	87,064	2,906,976	3.00
3	Kota Bogor	30,434	18,692	25,430	74,556	2,882,668	2.59
4	Kab. Bekasi	46,455	5,438	3,296	55,189	2,345,500	2.35
5	Kota Tasikmalaya	13,285	25,823	22,264	61,372	1,759,569	3.49
6	Kota Bekasi	10,778	6,841	2,711	20,330	1,367,891	1.49
7	Kab. Karawang	14,115	10,600	-	29,769	1,028,448	2.89
8	Kab. Garut	13,216	11,852	3,165	28,233	1,009,751	2.80
9	Kab. Purwakarta	49,766	2,507	5,054	52,273	993,778	5.26
10	Kota Sukabumi	7,416	12,928	3,946	24,290	984,785	2.47
11	Kab. Cianjur	8,658	2,943	516	12,117	879,453	1.38
12	Kab. Bandung	10,638	7,509	8,388	26,535	877,999	3.02
13	Kota Cimahi	9,505	3,001	-	12,506	863,637	1.45
14	Kab. Subang	22,595	2,189	1,190	25,974	855,651	3.04
15	Kab. Bogor	3,635	4,379	-	8,014	792,023	1.01
16	Kab. Indramayu	15,787	5,103	650	21,540	697,756	3.09
17	Kab. Sumedang	6,625	9,959	1,641	18,225	693,341	2.63
18	Kota Depok	8,324	1,401	5,453	15,178	561,159	2.70
19	Kab. Sukabumi	3,874	5,644	1,671	11,189	445,666	2.51
20	Kota Banjar	6,643	6,455	1,606	14,704	397,956	3.69
21	Kab. Ciamis	3,450	3,840	-	7,290	369,324	1.97
22	Kab. Kuningan	337	3,089	-	3,426	352,864	0.97
23	Kab. Majalengka	563	-	-	563	312,621	0.18
24	Kab. Tasikmalaya	9,859	6,957	-	16,816	219,008	7.68
	Jawa Barat	538,064	308,462	401,357	1,247,883	40,751,465	3.06

### SURVEI KONSUMEN (SK)

Ruang lingkup SK meliputi ekspektasi konsumen sektor rumah tangga mengenai kondisi perekonomian, perkembangan harga, kondisi keuangan konsumen, dan rencana konsumsi (pembelanjaan) konsumen. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan sebagai prompt indicator mengenai tendensi/arah permintaan konsumen.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menggunakan metode Balance Score: saldo bersih (net balance), yang disajikan dalam angka indeks. Saldo bersih dihitung dari selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban menurun. Angka indeks diatas 100 menunjukkan respon optimis lebih banyak dibandingkan respon pesimis, sebaliknya angka dibawah 100 menunjukkan respon pesimis lebih banyak dibandingkan respon optimis.

### SURVEI PENJUALAN ECERAN (SPE)

Ruang lingkup SPE meliputi penjualan di tingkat eceran dari seluruh barang, yang diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok yang mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), dan ekspektasi terhadap tingkat harga dan suku bunga kredit. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan untuk melihat pergerakan dan kecenderungan pengeluaran masyarakat (consumption spending) serta sebagai salah satu indikator dini perkembangan perekonomian, khususnya dari sisi permintaan.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menggunakan metode balance score, dengan net balance yang menggambarkan kecenderungan peningkatan atau penurunan penjualan, serta ekspektasi pelaku usaha (retailer) terhadap tingkat harga dan suku bunga kredit periode yang akan datang. Data hasil SPE kuantitatif dinyatakan dalam bentuk indeks riil yang menunjukkan perbandingan total penjualan eceran riil bulan berjalan terhadap total penjualan eceran riil pada bulan dasar (Oktober 2000 = 100), dan, apabila terdapat perubahan data yang ekstrim akibat perubahan responden

## LAMPIRAN

### SURVEI HARGA PROPERTI RESIDENSIAL (SHPR)

Ruang lingkup SHPR meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual oleh perusahaan pengembang perumahan (primary market) yang melakukan transaksi penjualan. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan untuk melihat perkembangan harga dan kuantitas properti residensial, baik yang terjadi pada triwulanan berjalan maupun perkiraan harganya untuk triwulan mendatang.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan membandingkan harga dan kuantitas properti triwulan berjalan dengan periode sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk indeks harga properti residensial. Perkembangan indeks harga properti residensial ini juga digunakan sebagai salah satu komponen penghitung dalam penelitian inflasi harga

### SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA (SKDU)

Ruang lingkup SKDU meliputi kegiatan dunia usaha, seperti produksi, investasi, penyerapan tenaga kerja, termasuk ekspektasi mengenai hal tersebut di setiap sektor ekonomi (sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan & perikanan; sektor pertambangan & penggalian; sektor listrik, gas & air bersih; sektor industri pengolahan; sektor bangunan/konstruksi; sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor pengangkutan & komunikasi; sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan sebagai indikasi dan salah satu pendekatan/proksi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil, baik pada triwulan berjalan maupun triwulan yang akan datang.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode saldo bersih dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun." Hasil net balance setiap sektor kemudian dikalikan dengan bobot sektor yang dihitung dari pangsa sektor tersebut dalam PDB tahun 1993, sehingga diperoleh saldo bersih tertimbang (weighted net balance). Jumlah saldo bersih tertimbang seluruh sektor menjadi proksi dari kegiatan usaha sektor riil.

### **SURVEI HARGA: “ Analisis Faktor Penyebab Kenaikan Harga dan Ekspektasi Harga pada Kelompok Bahan Makanan dan Makanan Jadi”**

Ruang lingkup survei ini meliputi kenaikan harga kelompok bahan makanan dan makanan jadi pada bulan Oktober, November, dan Desember, serta ekspektasi kenaikan harga pada bulan Desember, sampai bulan Februari 2006. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan untuk mengetahui (i) faktor penyebab kenaikan harga kelompok bahan makanan dan makanan jadi, (ii) bagaimana ekspektasi produsen terhadap harga kelompok bahan makanan dan makanan jadi dan pada tingkat berapa ekspektasi kenaikan harga tersebut, serta (iii) faktor pembentuk ekspektasi tersebut.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menggunakan program SPSS untuk mendukung metode analisis deskriptif, yang memberikan gambaran tentang kondisi riil hasil penelitian, baik terhadap rumah tangga produksi (produsen, grosir, dan retailer) maupun rumah tangga konsumsi. Sesuai dengan tujuannya, diharapkan melalui survei ini dapat diperjelas mengenai sejumlah variabel yang sebelumnya diduga secara arbitrer menjadi penyebab kenaikan harga pada kelompok barang makanan jadi dan kelompok barang bahan makanan. Disamping itu, survei ini juga diharapkan mampu menerangkan kadar ekspektasi produsen/pelaku ekonomi dan konsumen mengenai kenaikan harga di kedua kelompok barang tersebut mengenai perubahan harganya di bulan-bulan yang akan datang.

### **SURVEI INDUSTRI MAKANAN JADI DI JAWA BARAT**

Ruang lingkup survei ini meliputi volume/jumlah produksi, tenaga kerja, biaya produksi, harga jual, dan profit perusahaan di industri makanan jadi Jawa Barat, sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Informasi yang diperoleh dari hasil survei digunakan untuk mengetahui (i) karakteristik serta perkembangan industri makanan jadi di Jawa Barat, (ii) dampak kenaikan harga BBM terhadap industri makanan jadi di Jawa Barat antara lain terhadap volume/jumlah produksi, harga jual, serta profit perusahaan.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data primer yang berhasil diperoleh dari hasil survei di lapangan terhadap perusahaan makanan jadi di Jawa Barat, serta dari data sekunder yang telah ada sebelumnya. Metode sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan atau purposive sample berdasarkan area industri makanan jadi. Mengingat industri makanan jadi tersebar di hampir seluruh wilayah kota/kab di Jawa Barat, maka pengambilan sampel ditujukan hanya pada perusahaan makanan jadi yang dominan dan menjadi ciri khas di Jawa Barat yaitu antara lain wajit (Garut), kerupuk kulit

**Halaman ini sengaja dikosongkan**  
**This page is intentionally blank**